



Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

2018





KATA PENGANTAR



IRWAN PRAYITNO
GUBERNUR SUMATERA BARAT

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbi'alam, Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang "Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Informasi dalam Laporan Kinerja disajikan secara sistematis dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 ini memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian 18 sasaran strategis berdasarkan 24 indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) yang diperjanjikan dalam dokumen perubahan Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Sebanyak 9 sasaran strategis (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori **memuaskan**, 8 sasaran strategis (44,44%) mencapai keberhasilan dengan kategori **sangat baik** dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori **kurang baik**.



Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan selalu mengupayakan perbaikan secara terus menerus (*continuous improvement*) untuk peningkatan kinerja yang bermanfaat bagi masyarakat melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten dan berkelanjutan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, diucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Keberhasilan/kegagalan tersebut diukur berdasarkan pencapaian 18 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) yang diperjanjikan dalam dokumen perubahan Perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Dari 18 sasaran strategis, sebanyak 9 sasaran strategis (50%) mencapai keberhasilan dengan kategori **memuaskan**, 8 sasaran strategis (44,44%) mencapai keberhasilan dengan kategori **sangat baik** dan 1 sasaran strategis (5,56%) mencapai keberhasilan dengan kategori **kurang baik**.

Sasaran strategis "*meningkatnya pertumbuhan investasi*" yang diukur oleh indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 360,98%. Akan tetapi, sasaran strategis "*meningkatnya nilai ekspor*" yang diukur oleh indikator kinerja peningkatan nilai ekspor berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar -1.102,5%

Rincian pencapaian misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Misi 1 Meningkatkan Tata Kehidupan yang Harmonis, Agamais, Beradat dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

Untuk pencapaian misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 tujuan yaitu "Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama" dan "Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan". Masing-masing tujuan misi 1 memiliki 1 sasaran



yang diukur dengan 2 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan		75,9	62,5	82,35
1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1	Indeks Kerukunan	75,9	62,5	82,35
2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan		10	10	100
2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	2.1.1	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 1						91,18

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 1 yang diukur melalui pencapaian 2 indikator kinerja utama adalah 91,18%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Untuk pencapaian misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 tujuan yaitu "Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi". Tujuan tersebut memiliki 3 sasaran strategis yang diukur dengan 6 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi		64	65,45	102,27
1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1.1.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.1.1	Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	100



NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1	Indeks Profesionalitas ASN	68	76	111,76
		1.2.2	Indeks e-Government	2,6	2,43	93,46
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1.3.1	Indeks Integriras Pelayanan Publik	3,01	3,18	105,65
		1.3.2	Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	78,83	98,54
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 2					101,57	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 2 yang diukur melalui pencapaian 6 indikator kinerja utama adalah 101,57%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Misi 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berakarakter, dan Berkualitas Tinggi.

Untuk pencapaian misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 tujuan yaitu "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia". Tujuan tersebut memiliki 2 sasaran strategis yang diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,27	71,24	99,96	
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.1.1	Harapan lama sekolah	14,4	13,94	96,81
		1.1.2	Rata-rata lama sekolah	8,72	8,72	100
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.2.1	Angka Harapan Hidup	69,06	68,78	99,59
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 3					98,80	

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 3 yang diukur melalui pencapaian 3 indikator kinerja utama adalah 98,80%, termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



Misi 4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kerakyatan yang Tangguh, Produktif, dan Berdaya Saing Regional dan Global, dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah.

Untuk pencapaian misi 4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 1 tujuan yaitu "Meningkatnya Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah". Tujuan tersebut memiliki 4 sasaran strategis yang diukur dengan 5 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,78	5.14	88,93
		Indeks Gini	0,329	0.305	107,29
1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	42,7	42,83	100,30
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	4,1	14,80	360,98
1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	1.3.1 Peningkatan Nilai Ekspor	2	(22,05)	(1.102,50)
1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,48	6,55	98,92
		1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,25	5,55	111,2
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 4					-86,22

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 4 yang diukur melalui pencapaian 5 indikator kinerja utama adalah -86,22%, termasuk kategori keberhasilan kurang baik. Hal ini dikarenakan penurunan nilai ekspor yang sangat signifikan sehingga berpengaruh terhadap rata-rata capaian keseluruhan.

Misi 5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Untuk pencapaian misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditetapkan 2 tujuan yaitu "Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan



Pengembangan Wilayah” dan “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”. Tujuan tersebut memiliki 7 sasaran strategis yang diukur dengan 8 indikator kinerja utama yang diuraikan pada tabel berikut ini:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100
		Rasio Elektrifikasi	93,63	93,83	100,21
1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100
1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio Elektrifikasi	93,63	93,83	100,21
1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	59,60	59,12	99,19
1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	51,33	52,34	101,97
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,63	76,7	110,15
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,63	77,29	117,77
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	82,9	88,37	106,60
2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	62,69	67,5	107,67
2.3	Menurunnya risiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	73	100
Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Misi 5					104,2

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata-rata capaian indikator kinerja misi 5 yang diukur melalui pencapaian 8 indikator kinerja utama adalah 104,2%, termasuk kategori keberhasilan memuaskan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Dasar hukum.....	2
1.4. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat.....	3
1.5. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	8
1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	18
2.2. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1. Metodologi Pengukuran Kinerja	31
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja.....	32
3.3. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	35
Sasaran 1.1.1 Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama	37
Sasaran 1.2.1 Meningkatkan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	42
Sasaran 2.1.1 Meningkatkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	48
Sasaran 2.1.2 Meningkatkan Birokrasi yang Efektif dan Efisien	57
Sasaran 2.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	64
Sasaran 3.1.1 Meningkatkan Tingkat Pendidikan Masyarakat	74
Sasaran 3.1.2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	86
Sasaran 4.1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	99
Sasaran 4.1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	103
Sasaran 4.1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	109
Sasaran 4.1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	115
Sasaran 5.1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	128
Sasaran 5.1.2 Meningkatkan pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	132
Sasaran 5.1.3 Meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	136



Sasaran 5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	142
Sasaran 5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	148
Sasaran 5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	155
Sasaran 5.2.3	Menurunnya risiko bencana	159

3.4.	Realisasi Anggaran	163
------	--------------------------	-----

BAB IV	PENUTUP	166
---------------	----------------------	------------

LAMPIRAN

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Provinsi
2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

10



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	20
Tabel 2.2	Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja	21
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.3.1	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1	36
Tabel 3.3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1	37
Tabel 3.3.3	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	38
Tabel 3.3.4	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.2	41
Tabel 3.3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2.1	42
Tabel 3.3.6	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	43
Tabel 3.3.7	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.1	46
Tabel 3.3.8	Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2018	47
Tabel 3.3.9	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1	49
Tabel 3.3.10	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	50
Tabel 3.3.11	Rincian hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2018	53
Tabel 3.3.12	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	54
Tabel 3.3.13	Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018	55
Tabel 3.3.14	Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Tahun 2018	55
Tabel 3.3.15	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2	57
Tabel 3.3.16	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	59
Tabel 3.3.17	Rincian penilaian indeks e- <i>government</i> Provinsi Sumatera Barat	61
Tabel 3.3.18	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	62
Tabel 3.3.19	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3	64
Tabel 3.3.20	Hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	65
Tabel 3.3.21	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	65
Tabel 3.3.22	Hasil evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2018	66
Tabel 3.3.23	Rincian Hasil Survei IKM tahun 2018	68
Tabel 3.3.24	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	68
Tabel 3.3.25	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.1	71
Tabel 3.3.26	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1	74
Tabel 3.3.27	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	77
Tabel 3.3.28	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	82
Tabel 3.3.29	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3.1.2	86



Tabel 3.3 30	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	88
Tabel 3.3 31	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1	95
Tabel 3.3 32	Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat menurut	96
Tabel 3.3 33	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran	97
Tabel 3.3 34	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1	99
Tabel 3.3 35	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	100
Tabel 3.3 36	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2	103
Tabel 3.3 37	Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018	104
Tabel 3.3 38	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	107
Tabel 3.3 39	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3	109
Tabel 3.3 40	Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang	110
Tabel 3.3 41	Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018	111
Tabel 3.3 42	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	112
Tabel 3.3 43	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4	115
Tabel 3.3 44	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	117
Tabel 3.3 45	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	117
Tabel 3.3 46	Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Sumatera Barat Agustus 2017 - Agustus 2018	121
Tabel 3.3 47	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	123
Tabel 3.3 48	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1	126
Tabel 3.3 49	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1	128
Tabel 3.3 50	Ruas jalan Provinsi Tahun 2018	129
Tabel 3.3 51	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	130
Tabel 3.3 52	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2	132
Tabel 3.3 53	Perbandingan realisasi. capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	134
Tabel 3.3 54	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.3	136
Tabel 3.3 55	Perbandingan realisasi. capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	137
Tabel 3.3 56	Daerah irigasi yang direhabilitasi di Tahun 2018	138
Tabel 3.3 57	Lokasi pengendalian banjir dan pengamanan pantai di Tahun 2018	139
Tabel 3.3 58	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.4	142
Tabel 3.3 59	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	143
Tabel 3.3 60	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2	147
Tabel 3.3 61	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.1	148
Tabel 3.3 62	Kategori dan Kisaran IKA	149
Tabel 3.3 63	Perbandingan realisasi. capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	150
Tabel 3.3 64	Perbandingan realisasi. capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	153



Tabel 3.3 65	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.2	155
Tabel 3.3 66	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	156
Tabel 3.3 67	Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.3	159
Tabel 3.3 68	Peristiwa per Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	160
Tabel 3.3 69	Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021	161
Tabel 3.4. 1	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018	163



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016	7
Grafik 1. 2	Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018	8
Grafik 1. 3	Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018	16
Grafik 1. 4	Komposisi aparatur berdasarkan Golongan	16
Grafik 3.1	Indeks Kerukunan beberapa Provinsi dan Nasional Tahun 2018	39
Grafik 3. 2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2018	53
Grafik 3. 3	Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat	72
Grafik 3. 4	IPM kabupaten/Kota se Sumatera Barat	73
Grafik 3. 5	IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat	73
Grafik 3. 6	Harapan Lama Sekolah Sumatera Barat tahun 2014-2018	76
Grafik 3. 7	Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018	76
Grafik 3. 8	Perbandingan harapan lama sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2014-2018	78
Grafik 3. 9	Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Barat tahun 2014-2018	81
Grafik 3. 10	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018	81
Grafik 3. 11	Perbandingan rata-rata lama sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2014-2018	83
Grafik 3.12	Angka Harapan Hidup Sumatera Barat tahun 2014-2018	87
Grafik 3. 13	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018	88
Grafik 3. 14	Perbandingan Angka Harapan Hidup Sumatera Barat dengan Nasional	89
Grafik 3. 15	Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018	90
Grafik 3. 16	Indeks Gini Sumatera Barat tahun 2015-2018	98
Grafik 3. 17	PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2018	101
Grafik 3. 18	Penyebaran Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam Ribu US \$)	106
Grafik 3. 19	Penyebaran Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam Juta Rp.)	106
Grafik 3. 20	Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam US \$ ribu)	107
Grafik 3. 21	Perbandingan Peningkatan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2018	113
Grafik 3. 22	Perbandingan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2018	119
Grafik 3. 23	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018	122
Grafik 3. 24	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018	124



Grafik 3. 25	Rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota Tahun 2018	133
Grafik 3. 26	Perbandingan Rasio Elektrifikasi Nasional dengan Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat Tahun 2015-2018	135
Grafik 3. 27	Cakupan akses penyediaan air minum Kabupaten/kota tahun 2018	144
Grafik 3. 28	Cakupan akses sanitasi Kabupaten/kota tahun 2018	145
Grafik 3. 29	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten/kota tahun 2018	145
Grafik 3. 30	IKA 11 (sebelas) sungai yang dipantau di tahun 2018	150
Grafik 3. 31	Perbandingan Nilai IKA nasional dengan IKA Provinsi Sumatera Barat	151
Grafik 3. 32	Indeks Kualitas Udara 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat	153
Grafik 3. 33	Perbandingan IKU Nasional dengan IKU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018	154
Grafik 3. 34	Perbandingan IKTL Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2016-2018	157



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas menjadi salah satu asas umum penyelenggaraan negara yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Gubernur sebagai penyelenggara negara di tingkat pemerintah daerah Provinsi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelenggaraan negara kepada masyarakat/rakyat dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan output dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diartikan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Kewajiban menyusun Laporan Kinerja tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 dan pasal 23 yang menyatakan bahwa Gubernur menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Provinsi dan menyampaikannya kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk



teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 merupakan bentuk pemenuhan terhadap ketentuan pada pasal 18 dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat atas apa yang telah dan seharusnya dicapai dan mengevaluasi pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan di masa yang akan datang.

1.3. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah :

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
- b. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

1.4.1. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1.1. Letak dan Luas Wilayah Administrasi



Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara (LU), sampai dengan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (LS), dan antara $98^{\circ} 36'$ sampai $101^{\circ} 53'$ Bujur Timur (BT). Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dan mempunyai



luas wilayah $\pm 42.297,30 \text{ km}^2$ atau setara dengan 2,21% dari luas Republik Indonesia.

Provinsi Sumatera Barat sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi. Provinsi Sumatera Barat berada di Pulau Sumatera yang terdiri dari 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km^2 , sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 23 Km^2 . Sumatera Barat memiliki 391 gugusan pulau dengan jumlah terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai, sedangkan Kabupaten Agam mempunyai pulau paling sedikit.

1.4.1.2. Topografi

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m dpl hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian $>3000 \text{ m}$ di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), areal dengan ketinggian 100-500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500-1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000-1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500–2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl. Dataran rendah ($< 500 \text{ m dpl}$) tercatat hanya 45%, dataran menengah (500 – 1.000 m) 32% dan 23% daerah dataran tinggi. Dataran tinggi berupa jejeran bukit dan gunung adalah rantai dari pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan berbukit dan bergunung dengan kelerengan di atas 40% tercatat 1.017.000 Ha. Wilayah yang lebih datar dijumpai di bahagian Timur Sumatera Barat.



1.4.1.3. Geologi

Struktur yang berkembang di Provinsi Sumatera Barat adalah struktur perlipatan (*antiklinorium*) dan struktur sesar dengan arah umum barat laut tenggara, yang mengikuti struktur regional Pulau Sumatera. Struktur yang terdapat berupa *Great Sumatera Fault* di sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Selain geologi dasar laut, di daratan terdapat patahan semangka yang membujur dari Solok Selatan sampai Pasaman. Kondisi ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi kerawanan bencana gempa bumi yang cukup tinggi.

1.4.1.4. Hidrologi

Provinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya air yang cukup besar. Jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke arah Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dapat dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai (SWS) yaitu SWS Akuaman, Pulau Siberut, Natal-Batahan, Kampar, Batang Hari, Silaut, Rokan, Indragiri dan Masang. Sumber air sungai di provinsi ini berasal dari pegunungan dan danau (Danau Diatas, Danau Dibawah, Danau Maninjau dan Danau Singkarak). Danau Singkarak yang terletak di Kabupaten Solok dan Tanah Datar mempunyai luas 13.011 km², Danau Maninjau terdapat di Kabupaten Agam mempunyai luas 9.950 km², sedangkan Danau Diatas (3.150 km²), Danau Dibawah (1.400 km²), dan Danau Talang (1,02 km²) terdapat di Kabupaten Solok.

1.4.1.5. Klimatologi

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun dengan kecenderungan daerah bagian barat lebih basah bila dibandingkan dengan bagian timur. Keadaan yang lebih basah dibagian barat ini



berkaitan dengan dibawanya uap air oleh tiupan angin laut yang membentur bukit dan gunung sehingga hujan lebih banyak dan sering turun di belahan barat Bukit Barisan. Tingginya curah hujan tersebut menyediakan air yang cukup banyak di bagian barat provinsi ini sehingga sangat menunjang untuk budidaya pertanian antara lain untuk tanaman pangan dan *hortikultura*.

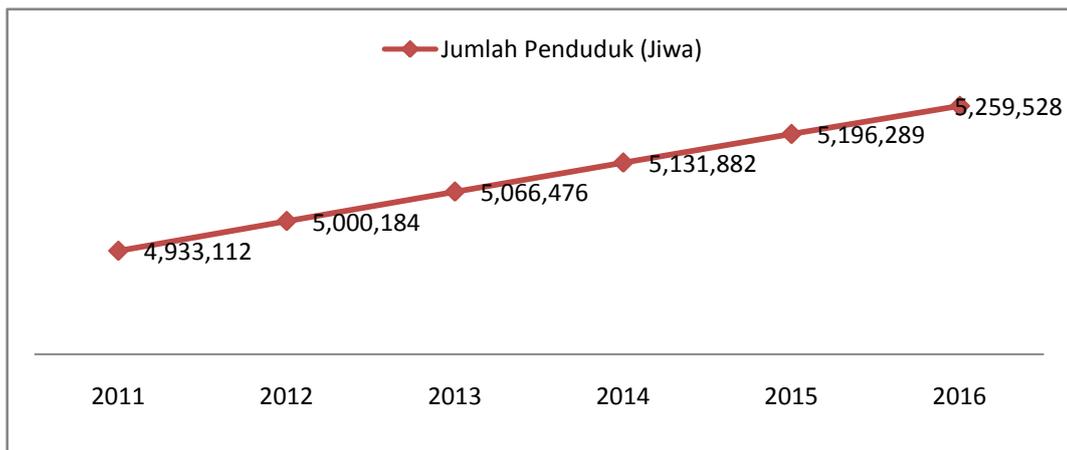
Karakteristik iklim Provinsi Sumatera Barat termasuk iklim *tropika* basah. Adapun klasifikasi iklim berdasarkan sistem *Schmidt-Fergusson* daerah ini dapat dibagi menjadi 3 tipe iklim yaitu tipe A, B dan C. Daerah sepanjang pantai barat tergolong kepada tipe A dengan luas wilayah cakupannya mencapai 2.672.000 Ha. Adapun daerah lereng timur Bukit Barisan yang merupakan daerah bayangan hujan menerima curah hujan lebih kecil tergolong kepada tipe B dengan 265.700 Ha dan tipe C dengan luas wilayah cakupannya 100.800 Ha terdapat di lereng Timur Gunung Merapi yaitu sekitar Danau Singkarak di Kabupaten Tanah Datar dan di selatan Gunung Talang meliputi di Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok. Suhu rata-rata di Sumatera Barat tercatat antara 180 – 340 C dengan suhu rata-rata lebih kurang 25,50 C. Perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 50 – 70 C. Suhu terendah biasanya terjadi antara bulan Oktober sampai dengan Desember dan suhu tertinggi terjadi antara bulan Juli dan Agustus. Pada umumnya daerah dataran tinggi mempunyai suhu 40– 60 C lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah pesisir barat. Lebih rendahnya suhu di daerah pegunungan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sentra *hortikultura* dan dapat dikembangkan sebagai daerah *agrowisata* potensial terutama dipegunungan yang terdapat di wilayah Agam, Tanah Datar, Bukittinggi dan Padang Panjang serta pada kawasan Kayu Aro sampai ke Pantai Cermin di Kabupaten Solok. Kelembaban udara antara 79% – 87% dengan kecepatan angin antara 1,25 – 7,72 knot. Daerah dengan kelembaban yang tinggi terjadi di daerah pesisir dan Kepulauan Mentawai.



1.4.2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, jumlah populasi Sumatera Barat mencapai 4.865,33 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa/km². Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari tahun 2011-2016 dapat dilihat pada grafik 1.1.

Grafik 1. 1 Jumlah Penduduk Sumatera Barat dari Tahun 2011-2016



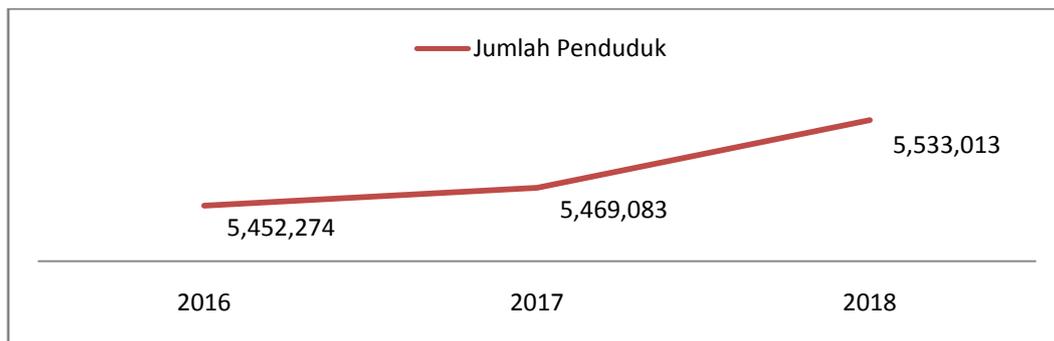
Sumber data: Tabel Statistik BPS 3 November 2017

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 (data konsolidasi bersih semester I) adalah sebanyak 5.533.013 jiwa atau meningkat sebanyak 63.930 jiwa dibandingkan jumlah penduduk di tahun 2017. Penduduk Sumatera Barat tahun 2018 terdiri dari 2.798.074 (50,57%) penduduk pria dan 2.734.939 (49,43%) penduduk wanita.

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada grafik 1.2.



Grafik 1. 2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018



Sumber data: Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri

1.5. PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

1.5.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan

Provinsi Sumatera Barat sebagai Daerah Provinsi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979. Undang-undang ini merupakan landasan legal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah yang untuk Provinsi disebut Gubernur dan perangkat daerah. Dalam Undang-



undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 91 ayat 2, Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota;
2. melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
4. melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5. melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
6. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu dalam pasal 91 ayat 3 diuraikan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat mempunyai wewenang sebagai berikut:

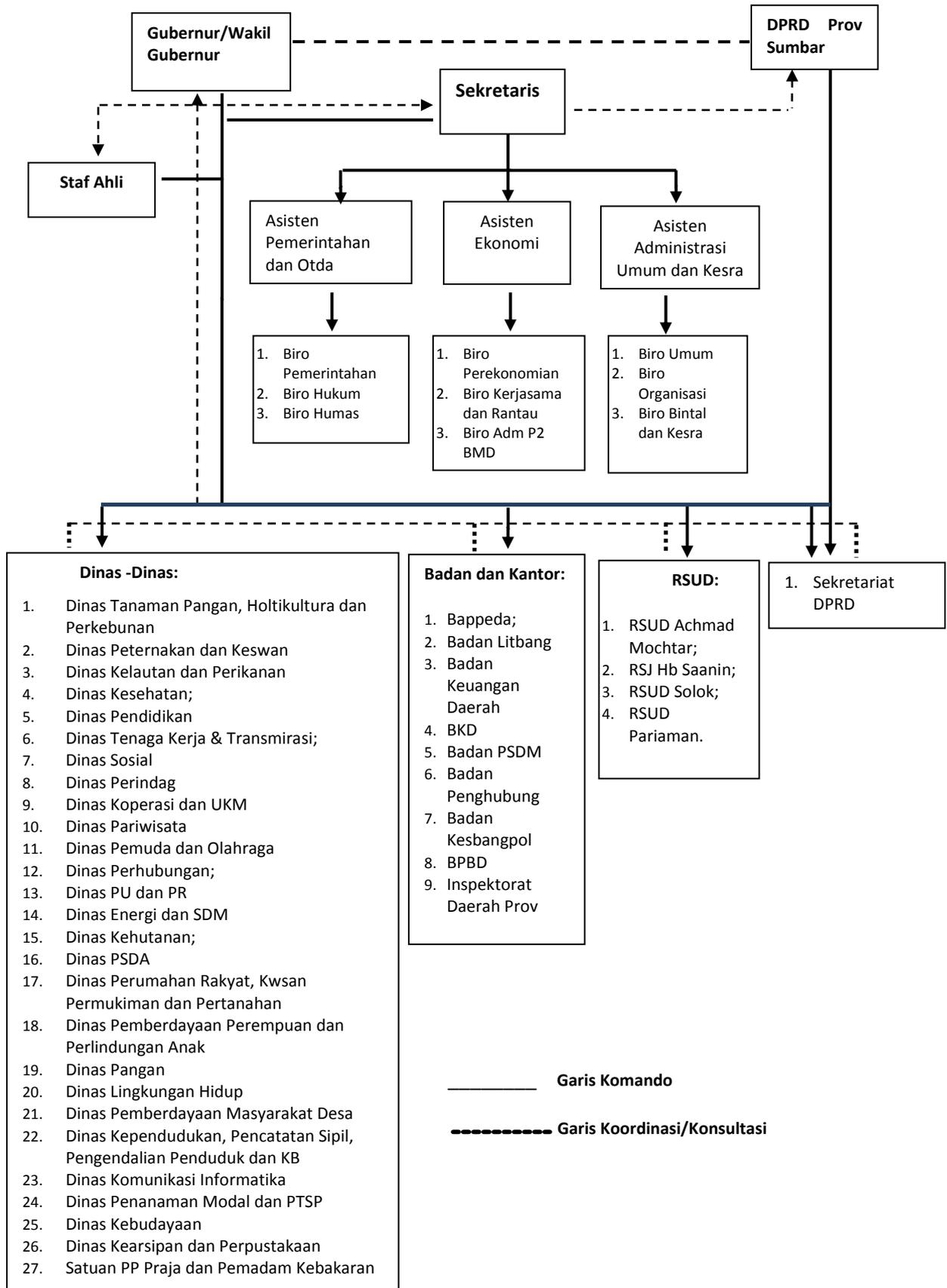
1. membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
4. memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan
5. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat





1.5.3. Isu-isu Strategis

Berikut ini akan diuraikan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021:

1. Pembangunan Mental dan Peningkatan Pengamalan Nilai-nilai Adat dan Agama

Pembangunan mental dan penerapan nilai-nilai adat dan pengamalan ajaran agama penting bagi daerah untuk menangkis pengaruh negatif keterbukaan informasi melalui media sosial dan masuknya budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pembangunan bidang ini dilaksanakan untuk menyiapkan generasi muda Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, berdaya saing dan mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertakwa.

2. Penanganan Bencana Alam

Letak geografis Sumatera Barat yang rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengantisipasi hambatan tersebut, pemerintah Sumatera Barat harus memberikan perhatian yang besar untuk mengurangi resiko, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana. Hal ini diharapkan akan berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat.

3. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan daerah masih merupakan isu penting bagi Sumatera Barat, meskipun sudah terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah selama periode 2010-2015. Persoalan kemiskinan yang dihadapi saat ini sudah bergeser untuk menanggulangi tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kelompok masyarakat yang miskin. Untuk



mengeluarkan atau membebaskan kelompok masyarakat dari kemiskinan diperlukan upaya yang lebih besar lagi dari yang telah dilakukan sebelum ini. Jika kelompok masyarakat miskin dapat diatasi, maka tujuan Sumatera Barat bebas dari kemiskinan dalam arti yang sesungguhnya dapat diwujudkan.

Selanjutnya Sumatera Barat juga ingin mewujudkan keinginan untuk menjadi provinsi yang bebas dari daerah tertinggal. Saat ini masih terdapat tiga daerah tertinggal (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Pasaman Barat). Ketiga daerah kabupaten ini mempunyai karakteristik yang relatif berbeda, tetapi sama-sama menghadapi keterbatasan akses untuk keluar masuk, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi dan percepatan pembangunan. Untuk membebaskan ketiga daerah kabupaten ini dari ketertinggalannya, diperlukan dana yang besar dan usaha yang terintegrasi, fokus, terukur dan tepat sasaran.

4. Penguatan Struktur Ekonomi Daerah

Untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor-sektor produktivitas tinggi dan menyerap banyak lapangan kerja. Oleh sebab itu, penguatan struktur ekonomi dijadikan isu strategis dalam rangka lebih menumbuh kembangkan industri pengolahan pertanian, industri kerajinan dan industri pariwisata untuk mendorong penguatan dan perubahan struktur ekonomi Sumatera Barat.

5. Peningkatan Infrastruktur

Sumatera Barat mempunyai daya saing daerah yang belum mencukupi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha. Salah satu faktor penghalang adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur; jalan, listrik, transportasi, (darat, laut, udara, kereta api), pantai, sungai, irigasi, perumahan/permukiman, bangunan gedung serta prasarana air minum sanitasi. Oleh sebab itu peningkatan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan untuk



untuk meningkat daya saing daerah, sehingga menarik bagi investor untuk mengembangkan berbagai usaha di Sumatera Barat.

6. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik

Pemerintahan yang baik dan bersih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk mendukung terlaksananya pemerintah yang baik dan bersih diperlukan peningkatan integritas dan kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik, memantapkan sistem manajemen kepegawaian, keterbukaan informasi kepada publik dan keterlibatan serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

7. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia adalah faktor penentu kemajuan suatu negara dan daerah. Pentingnya isu peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah untuk mengatasi ketimpangan kualitas sumberdaya manusia antar daerah di Sumatera Barat dan untuk menyiapkan generasi muda yang siap bersaing di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Sumatera Barat diperlukan pembenahan pembangunan pendidikan, kesehatan dan lingkungan seperti peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan dengan menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan.

8. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan daerah karena bahagian terbesar yang menggerakkan ekonomi Sumatera Barat adalah usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Jika UMKMK tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesempatan kerja akan terjadi di Sumatera Barat.



9. Peningkatan Ketahanan Pangan

Peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan menjadi isu penting bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat. Untuk pemenuhan kebutuhan pangan, Sumatera Barat perlu berupaya untuk menjadi provinsi penghasil pangan nasional untuk mendukung kedaulatan pangan.

10. Pemanfaatan Potensi Kelautan dan Kemaritiman

Dalam upaya pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman guna meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan memanfaatkan potensi kelautan dan kemaritiman secara optimal dengan peningkatan sumberdaya manusia, menyediakan sarana dan prasarana seperti penyediaan armada dan alat tangkap di bidang perikanan serta sarana prasarana untuk pariwisata bahari dan sarana transportasi untuk pembangunan kemaritiman.

11. Pengurangan Pengangguran

Pengurangan pengangguran menjadi isu pembangunan daerah karena pengangguran menjadi hambatan dalam pembangunan dan menambah beban tanggungan yang berat bagi rumah tangga dan daerah serta berkaitan dengan kemiskinan. Untuk penanganan pengangguran di Sumatera Barat diperlukan pembenahan pada sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja. Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi penawaran adalah peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga cocok dengan permintaan di pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, pembenahan balai latihan yang dapat menghasilkan dan mengembangkan wirausaha baru untuk sektor UMKMK dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aspek yang perlu mendapat perhatian dari sisi permintaan tenaga kerja adalah meningkatkan dan membuka lapangan kerja baru dan alternatif bagi pekerja yang masuk kategori setengah pengangguran. Membuka lapangan kerja tentu memerlukan pengembangan berbagai sektor yang dapat diunggulkan Sumatera



Barat seperti sektor pariwisata, kelautan dan kemaritiman dan konstruksi bangunan.

12. Peningkatan Daya Saing Daerah

Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, seperti Asean Economic Community (AEC) dan Asean China Free Trade Area (ACFTA) menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk Sumatera Barat terbuka cukup besar terutama ke negara Asean dan China. Untuk itu, upaya pemanfaatan pasar global tersebut guna percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat perlu diiringi dengan peningkatan daya saing daerah yang ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumberdaya manusia yang berkualitas serta tingkat keamanan yang tinggi. Oleh sebab itu peningkatan daya saing daerah perlu dirumuskan sedemikian rupa dengan mengintegrasikan dengan pembangunan bidang-bidang lainnya.

13. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dijadikan isu pembangunan agar pembangunan yang akan dilaksanakan berbasis daya dukung dan daya tampung. Pembangunan dan pengembangan berbagai sektor yang akan dilaksanakan di masa mendatang harus dipastikan tidak merusak dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mewujudkan hal ini, konsep pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau (*green economy*) perencanaan tata ruang perlu menjadi acuan semua pihak-pihak yang berkepentingan.

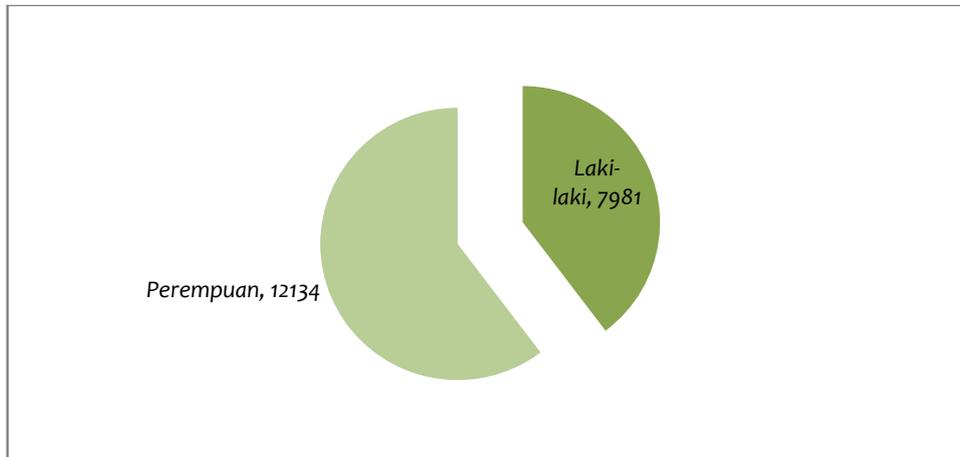
1.5.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia aparatur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2018 adalah sebanyak 20.115 orang atau mengalami penurunan sebanyak 824 orang dibandingkan tahun 2017. Dari total pegawai tersebut terdiri



dari 7.981 orang laki-laki (39,68%) dan 12.134 orang perempuan (60,32%) sebagaimana tergambar pada grafik 1.3.

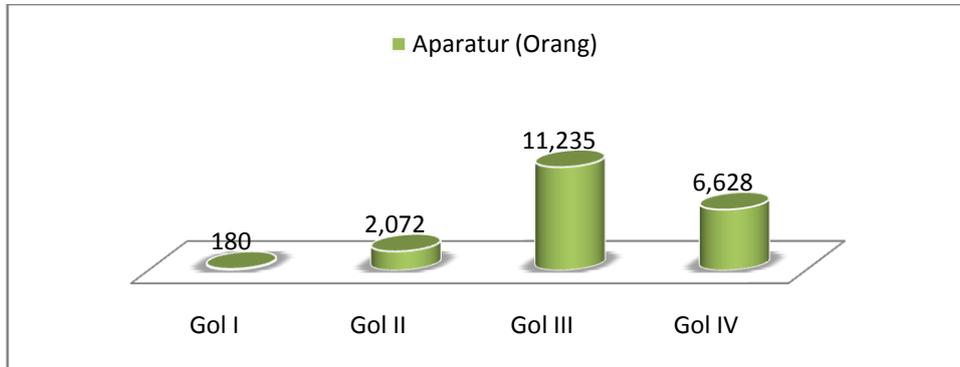
Grafik 1.3 Komposisi pegawai berdasarkan Jenis Kelamin per 31 Desember 2018



Sumber: BKD Provinsi Sumbar

Komposisi aparatur Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik 1.4.

Grafik 1.4 Komposisi aparatur berdasarkan Golongan



Sumber: BKD Provinsi Sumbar



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, dasar hukum, isu strategis dan sistematika penyajian.

Bab II : **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2018.

Bab III : **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:

a. Metodologi Pengukuran Kinerja

b. Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud.

d. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

Bab IV : **Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Sesuai dengan visi gubernur dan wakil Gubernur, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Madani

Sumatera Barat *Madani* adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Sejahtera

Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan



sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi, misi telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD tahun 2016-2021 disempurnakan berdasarkan kerangka berpikir logis yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1.



Tabel 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI: "TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA"

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".	1.1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 1.2 Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	1.1.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama 1.2.1 Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya 1.2.2 Meningkatnya implementasi Adat Basandi Syara'- Syara' basandi kitabullah dalam kehidupan bermasyarakat
2	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.	2.1 Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi	2.1.1 Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel 2.1.2 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien 2.1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi	3.1 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	3.1.1 Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 3.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
4	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah	4.1 Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	4.1.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat 4.1.2 Meningkatnya Pertumbuhan investasi 4.1.3 Meningkatnya Nilai Ekspor 4.1.4 Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
5	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.	5.1 Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5.1.1 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah 5.1.2 Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan 5.1.3 Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air 5.1.4 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat



MISI	TUJUAN	SASARAN
	5.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	5.2.1 Meningkatkan Kualitas Air dan Udara 5.2.2 Meningkatkan kualitas hutan dan lahan 5.3.1 Menurunnya risiko bencana

2.2. PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah ditetapkan pada Bulan Maret 2018. Penyusunan dokumen tersebut berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Akan tetapi, pada bulan November 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan perubahan (revisi) terhadap dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dikarenakan adanya penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini akan diuraikan Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

Tabel 2. 2 Perubahan (Revisi) Perjanjian Kinerja

PROVINSI : SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2018

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".			
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	75,9	Satpol PP, B. Kesbangpol
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	75,9	Satpol PP, B. Kesbangpol



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	Dinas Kebudayaan
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	Dinas Kebudayaan
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL			
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64	OPD terkait 8 Area Perubahan
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Biro AP2BMD, Inspektorat
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Bappeda, Biro Organisasi, Inspektorat
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	68	B. Kepegawaian Daerah
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,6	D. Kominfo
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Indeks Integrasi Pelayanan Publik	3,01	Biro Organisasi
		2.1.3.2 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	Biro Organisasi
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI			
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,27	Lintas PD
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,4	D. Pendidikan
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,72	
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,06	D. Kesehatan dan RSUD
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH			



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini	5,78 0,329	Lintas PD Lintas PD
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	42,7	Lintas PD
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	4,1	D. Penanaman Modal dan PTSP
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Peningkatan Nilai Ekspor	2	Disperindag
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan 4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,48 6,25	Lintas PD Lintas PD
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN			
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap Rasio Elektrifikasi	36 93,63	D.PU dan PR D. ESDM
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	D. PU dan PR
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	93,63	D. ESDM
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	59,60	D. PSDA
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	51,33	D. PU dan PR dan D. Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,63	D. Lingkungan Hidup dan D. Kehutanan



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1	Indeks Kualitas Air	65,63	D. Lingkungan Hidup
		5.2.1.2	Indeks Kualitas Udara	82,9	
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1	Indeks Tutupan Hutan	62,69	D. Kehutanan
5.3.1	Menurunnya risiko bencana	5.3.1.1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	BPBD

No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
A	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	39,190,565,630	
1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	523,883,500	B. Kembangpol
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,347,927,432	
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,810,904,881	
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,705,410,460	
5	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	418,962,700	Satpol PP dan Damkar
6	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3,506,547,763	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	151,063,500	
8	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	967,553,265	
9	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	538,520,785	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	20,941,871,253	Biro Bina Mental dan Kesra
11	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	5,648,728,299	
12	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	1,629,191,792	
B	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	13,278,319,984	
1	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	1,314,040,160	D. Kebudayaan
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	99,838,170	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3,848,740,909	
4	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	359,238,530	
5	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	4,503,481,210	
6	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.	3,152,981,005	
C	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	46,888,595,897	
1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5,617,670,709	B. Keuangan Daerah



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	611,956,026	
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	8,097,838,030	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,135,873,129	Biro Umum
5	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213,100,000	Inspektorat Provinsi
6	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7,417,989,282	
7	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	734,287,650	Bappeda
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,531,661,863	
9	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9,811,321,675	
10	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	521,052,825	Biro Organisasi
11	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,213,398,567	Biro Adm Pengelolaan BMD
12	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	4,261,431,800	Biro Pemerintahan
13	Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	711,545,600	
14	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2,009,468,741	
D	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	42,299,127,382	
1	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	8,718,575,786	BKD, BPSDM dan Biro Organisasi
2	Program Pendidikan Kedinasan	12,612,674,216	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,611,545,070	
4	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1,446,340,048	
5	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	83,991,000	D. Komunikasi dan Informatika
6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90,258,987	
7	Program Informasi dan Komunikasi Publik	917,664,134	
8	Program Keterbukaan Informasi	2,360,281,141	
9	Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	3,333,746,094	
10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,599,067,614	
11	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9,319,960,920	Biro Humas
12	Program Pengembangan Data dan Informasi	205,022,372	
E	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	106,598,717,758	
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan	6,900,007,692	Balitbang
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	2,648,125,524	B. Penghubung, B. Keuda
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	268,580,826	D. Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	464,104,345	
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan	2,948,320,577	
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	384,879,728	Setda, B.



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
7	Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	432,417,447	Penghubung
8	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2,800,801,316	
9	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	4,977,135,147	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13,407,418,586	
11	Program Manajemen Perubahan	184,500,800	
12	Program Pembangunan Materi Hukum	1,193,913,128	
13	Program Peningkatan Budaya Hukum	49,385,000	
14	Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM	336,527,500	
15	Program Sarana dan Informasi Hukum	125,484,800.00	Setda, B.
16	Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan	783,753,400.00	Penghubung
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,082,100,268.00	D. Pengendalian
18	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1,135,120,300.00	Penduduk, KB,
19	Program Pengembangan Data dan Informasi	37,880,000.00	kependudukan dan capil
20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64,438,261,374.00	Sekretariat DPRD
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	763,353,170,839	
1	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA	399,716,044,575	D. Pendidikan
2	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK	266,094,673,870	
3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	5,706,158,115	
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	40,057,061,722	
5	Program Pendidikan Berkarakter	1,351,696,940	
6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	32,936,015,307	
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	3,124,036,150	D. Pemuda
8	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	10,987,624,495	Olahraga
9	Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	489,958,600	
10	Program Peningkatan Penysadaran Kepemudaan	1,769,061,810	
11	Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya	304,117,905	
12	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	675,631,350	Biro Bina Mental
13	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	141,090,000	dan Kesra
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	581,463,492,669	
1	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	9,302,946,572	D. Kesehatan, 4
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12,819,413,916	RSUD
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,513,406,114	
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	919,119,989	
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	846,255,198	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	2,314,114,732	
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/RS. Mata	155,066,813,420	



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	423,000,000	
9	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	852,591,860	
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	543,968,982	
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	35,098,629,425	
12	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	347,681,634,891	
13	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	1,806,250,000	
14	Program Diversifikasi Pangan	740,160,000	D. Pangan
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5,247,613,000	
16	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	50,000,000	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan capil
17	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	100,000,000	
18	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	150,000,000	
19	Program Pelayanan Kontrasepsi	155,000,000	
20	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	306,048,000	
21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2,460,460,475	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174,016,915	
23	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	241,448,665	
24	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	1,281,347,365	
25	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	1,067,327,980	
26	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	301,925,170	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	160,703,493,023	
1	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	8,916,907,545	D. Tanaman Pangan dan hortikultura, D. Peternakan dan Keswan dan D Kelautan Perikanan
2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	33,575,475,189	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	19,509,783,904	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	7,679,252,015	
5	Program Pengembangan Ekonomi Maritim	10,051,282,500	
6	Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	8,115,275,310	
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	15,071,174,038	
8	Program Pengamanan Sumber Daya Hewani	3,529,338,910	
9	Program Pembedayaan Penyuluhan	518,819,000	
10	Program Peningkatan SDM Pertanian	1,412,631,250	D. Tanaman Pangan dan hortikultura
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	1,309,000,000	
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	13,466,013,007	D. Pariwisata
13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	11,219,587,350	
14	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,486,189,050	
15	Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	1,253,761,200	
16	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	1,012,631,764	D. Perindustrian dan Perdagangan
17	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3,404,143,050	
18	Program Pengembangan Kewilayahan Industri	2,225,509,441	
19	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,963,887,500	



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90,550,000	
21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3,770,479,350	D. Koperasi dan UKM
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1,587,547,350	
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	6,613,127,900	
24	Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	921,126,400	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	11,427,552,866	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi	3,797,846,700	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4,491,539,725	
3	Program Kerjasama Pembangunan	3,138,166,441	Biro Kerjasama dan Rantau
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	5,415,955,580	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	5,415,955,580	D. Perindag
K	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	80,986,032,919	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	217,070,620	D. Sosial
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	6,668,077,240	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	2,938,531,175	
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia	2,672,534,121	
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)	879,396,600	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3,569,775,000	
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	24,404,887,505	
8	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	497,293,180	
9	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	168,845,970	
10	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	500,340,000	
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	939,296,890	
12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	9,474,765,145	
13	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	941,768,600	
14	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8,654,049,090	
15	Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	3,105,072,950	
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1,838,500,000	
17	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	1,380,823,870	



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,662,716,745	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha	2,111,340,800	
20	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	772,966,000	
21	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	1,377,395,418	
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210,586,000	
L	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	442,698,758,899	
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	204,488,943,817	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	65,298,230,300	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1,982,623,465	
4	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	157,341,202,743	
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1,463,838,965	
6	Program Perencanaan Penataan Ruang	4,929,252,510	
7	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	479,701,250	
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	302,700,755	
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkerataapian	484,574,050	D. Perhubungan
10	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1,582,308,404	
11	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	983,765,870	
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	243,725,560	
13	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,117,891,210	
M	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	8,020,102,636	
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	4,387,779,020	D. Energi Sumber Daya Mineral
2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	394,598,000	
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2,003,192,070	
4	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	905,855,746	
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	328,677,800	
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	163,973,049,447	
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	53,058,519,033	D. Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1,290,918,400	
3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	98,579,931,923	



No	Sasaran/Program	Anggaran	Ket
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1,953,966,265	
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	9,089,713,826	
O	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat	12,663,424,801	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,254,423,000	D. Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Pengembangan Perumahan	1,623,188,392	
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4,556,321,659	
4	Program Pengelolaan Pertanahan	983,000,000	
5	Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	638,335,750	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota	2,771,215,000	
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	836,941,000	
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	8,500,327,569	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,569,575,720	D. Lingkungan Hidup
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	240,078,000	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,351,597,100	
4	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	712,410,100	
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	3,626,666,649	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	50,867,337,183	
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	9,880,165,060	D. Kehutanan
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4,253,399,935	
3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	4,937,286,025	
4	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	1,184,109,440	
5	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	12,298,000,000	
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,519,931,510	
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	983,290,313	
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	12,811,154,900	
R	Menurunnya resiko bencana	8,283,319,760	
1	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	1,465,219,080	BPBD
2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	3,854,398,480	
3	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1,671,600,200	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	583,625,500	
5	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	708,476,500	
		2,546,611,344,842	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab akuntabilitas kinerja Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 menyajikan informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian 7 tujuan dengan 9 indikator kinerja tujuan dan 18 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut:

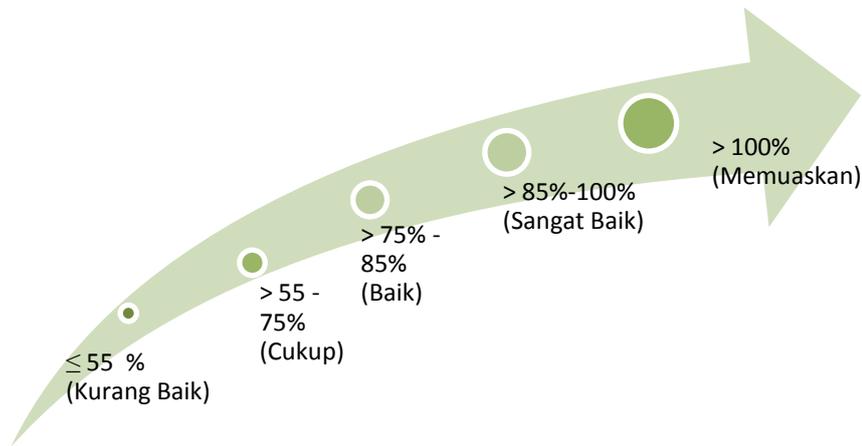
1. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, % capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut dikategorikan sebagai berikut:



3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran pencapaian 7 (tujuh) tujuan dengan 9 (sembilan) indikator kinerja tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1 Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 1	MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAS, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH" ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".				
Tujuan 1.1	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan	75,9	62,5	82,35
1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1.1.1.1 Indeks Kerukunan	75,9	62,5	82,35
Tujuan 1.2	Terpelihara dan berkembangnya kebudayaan	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100
1.2.1	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	1.2.1.1 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 2	MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESSIONAL				
Tujuan 2.1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	64	65,45	102,27
2.1.1	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	2.1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		2.1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	100
2.1.2	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	2.1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	68	76	111,76
		2.1.2.2 Indeks e-Government	2,6	2,43	93,46
2.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	2.1.3.1 Indeks Integritas Pelayanan Publik	3,01	3,18	105,65
		2.1.3.2 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit Pelayanan Publik	80	78,83	98,54
MISI 3	MENINGKATKAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI				
Tujuan 3.1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	71,27	71,24	99,96
3.1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	3.1.1.1 Harapan lama sekolah	14,4	13,94	96,81
		3.1.1.2 Rata-rata lama sekolah	8,72	8,72	100
3.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3.1.2.1 Angka Harapan Hidup	69,06	68,78	99,59
MISI 4	MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF, DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN DAERAH				
Tujuan 4.1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,78	5.14	88,93
		Indeks Gini	0,329	0.305	107,29
4.1.1	Meningkatnya pendapatan masyarakat	4.1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp.Juta)	42,7	42,83	100,30
4.1.2	Meningkatnya Pertumbuhan investasi	4.1.2.1 Persentase pertumbuhan investasi	4,1	14,80	360,98
4.1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	4.1.3.1 Peningkatan Nilai Ekspor	2	(22,05)	(1.102,50)
4.1.4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	4.1.4.1 Tingkat Kemiskinan	6,48	6,55	98,92
		4.1.4.2 Tingkat Pengangguran	6,25	5,55	111,2



NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
MISI 5	MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN SERTA BERWAWASAN LINGKUNGAN				
Tujuan 5.1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100
		Rasio Elektrifikasi	93,63	93,83	100,21
5.1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	5.1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100
5.1.2	Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	5.1.2.1 Rasio Elektrifikasi	93,63	93,83	100,21
5.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumberdaya air	5.1.3.1 Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan Sumber Daya air	59,60	59,12	99,19
5.1.4	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	5.1.4.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	51,33	52,34	101,97
Tujuan 5.2	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,63	76,7	110,15
5.2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	5.2.1.1 Indeks Kualitas Air	65,63	77,29	117,77
		5.2.1.2 Indeks Kualitas Udara	82,9	88,37	106,60
5.2.2	Meningkatnya kualitas hutan dan lahan	5.2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	62,69	67,5	107,67
5.3.1	Menurunnya risiko bencana	5.3.1.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	73	100

Dari tabel 3.2.1 diketahui dari 24 indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) yang digunakan untuk mengukur 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 tingkat capaian terendah adalah indikator kinerja peningkatan nilai ekspor sebesar -1.102,5% dan capaian tertinggi pada indikator



kinerja persentase pertumbuhan investasi sebesar 360,98%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2017, indikator kinerja peningkatan nilai ekspor merupakan indikator kinerja dengan capaian tertinggi sebesar 988,5%.

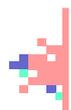
Rekapitulasi capaian indikator kinerja 24 indikator kinerja sasaran (indikator kinerja utama) adalah sebagai berikut:

No	Kategori Keberhasilan	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	10 Indikator Kinerja Utama
2	Sangat Baik	12 Indikator Kinerja Utama
3	Baik	1 Indikator Kinerja Utama
4	Cukup	-
5	Kurang Baik	1 Indikator Kinerja Utama

3.3. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

MISI 1 MENINGKATKAN TATA KEHIDUPAN YANG HARMONIS, AGAMAI, BERADAT, DAN BERBUDAYA BERDASARKAN FALSAFAH "ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH".

Misi pertama RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah Meningkatkan Tata Kehidupan Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah". Untuk mewujudkan misi tersebut perlu ditingkatkan kualitas kehidupan beragama dan memelihara serta mengembangkan kebudayaan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 2 (dua) tujuan. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 1.1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama

Tujuan pertama misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel 3.3.1.



Tabel 3.3 1 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.1

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Indeks Kerukunan	75,9	62,5	82,35	67

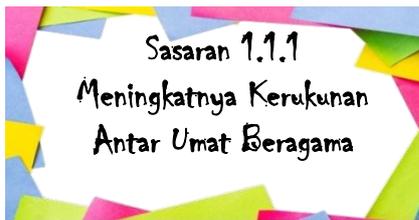
Indeks Kerukunan mengukur harmonisasi kerukunan antarumat beragama di Indonesia dengan menggunakan 3 indikator sebagai tolok ukurnya yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

Dari tabel 3.3.1 dapat dilihat indikator kinerja tujuan indeks kerukunan target 75,9 terealisasi 62,5 dengan tingkat capaian 82,35% termasuk kategori keberhasilan baik.

Indeks kerukunan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,5 dibandingkan dengan indeks kerukunan tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan 1 misi 1 belum tercapai dengan maksimal. Kendati belum mencapai target, secara umum skor kerukunan umat beragama di Sumatera Barat masih tinggi karena berada di atas angka 60 yang termasuk kategori rukun. Hal ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Sumatera Barat dengan etnis Minangkabau memiliki komitmen beragama yang sangat tinggi dan relevan dengan Prioritas 1 Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah Dalam Kehidupan Masyarakat, dan sangat menghargai perbedaan dan keragaman, sebagaimana adagium, "lamak di awak, katuju dek urang"
2. Kerukunan beragama di Sumatera Barat juga terpelihara dengan baik yang ditandai dengan sudah sejak lama tidak ada konflik keagamaan yang terjadi. Hubungan antar dan intern umat beragama berjalan cukup harmonis.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya Kualitas Kehidupan Beragama telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 2 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Kerukunan	75,9	62,5	82,35

Indeks kerukunan diharapkan akan meningkat setiap tahunnya. Untuk tahun 2018, indeks kerukunan ditargetkan 75,9 meningkat 8,9 dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 67.

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat indikator kinerja indeks kerukunan target 75,9 terealisasi 62,5 dengan tingkat capaian 82,35% termasuk kategori keberhasilan baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan riset oleh Balitbang Kementerian Agama dengan metode survei pada umat beragama atau masyarakat Sumatera Barat di 3 (tiga) daerah yaitu Kota Padang, Kota Solok dan Kabupaten Pasaman Barat, yang dalam pelaksanaannya Kabupaten Pasaman Barat tidak jadi diambil sampelnya, tinggal 2 (dua) kota untuk sampel yaitu Kota Padang dan Kota Solok. Indeks kerukunan sebesar 62,5 menunjukkan masyarakat Sumatera Barat hidup rukun. Hal ini sesuai dengan level indeks kerukunan sebagai berikut:

Range indeks	Level/kategori
0 – 20	Sangat Tidak Rukun
21- 40	Tidak Rukun
41 – 60	Rukun tingkat sedang
61 - 80	Rukun
81 - 100	Sangat Rukun

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3 3 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja indeks kerukunan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks kerukunan	62,5	67	82,35	-	73,4

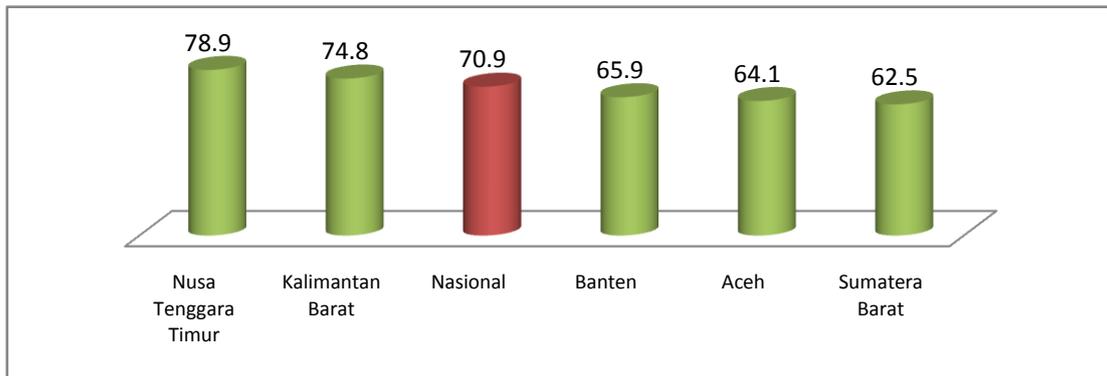
Dari tabel 3.3.3 diketahui bahwa indeks kerukunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,5 dibandingkan dengan indeks kerukunan tahun 2017. Capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 menunjukkan nilai <100% yang berarti realisasi tercapai di bawah target yang ditetapkan. Akan tetapi, untuk capaian indikator kinerja indeks kerukunan tahun 2017-2018 tidak dapat dibandingkan karena indeks kerukunan baru ditetapkan dan ditargetkan di tahun 2018 sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Indeks kerukunan tahun 2018 sebesar 62,5 menunjukkan pencapaian 85,15% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, Indeks kerukunan ditargetkan 73,4% atau meningkat 10,9% (dengan rata-rata peningkatan pertahun 3,63) dari realisasi di tahun 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Dibandingkan dengan indeks kerukunan Provinsi lain di Indonesia dan rerata indeks kerukunan nasional, indeks kerukunan Sumatera Barat (62,5) adalah yang terendah. Indeks kerukunan tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (78,9). Perbandingan indeks kerukunan Sumatera Barat dengan beberapa Provinsi di Indonesia dan Nasional tergambar pada grafik 3.1.



Grafik 3.1 Indeks Kerukunan beberapa Provinsi dan Nasional Tahun 2018



Hambatan dan kendala peningkatan indeks kerukunan di Sumatera Barat salah satunya disebabkan oleh tingkat homogenitas agama di Sumatera Barat. Umat beragama yang berada di wilayah kategori heterogen cenderung memiliki nilai indeks kerukunan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang homogen.

Untuk meningkatkan indeks kerukunan di Provinsi Sumatera Barat, upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Mencegah terjadinya konflik dalam kelompok masyarakat yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) dengan cara:
 - Melakukan pemetaan konflik sosial untuk meminimalisir meluasnya konflik yang dipicu oleh berbagai faktor.
 - Dibentuknya tim dan forum-forum strategis oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Kominda, Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan.
 - Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.



- Melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya generasi muda dari berbagai etnis dan paguyuban di Sumatera Barat dalam rangka memberikan pemahaman tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan untuk membangun kesadaran bela negara dan menciptakan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Mewujudkan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dengan cara:
- Meningkatkan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Mengutamakan tindakan kuratif dan preventif dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi resiko lebih besar dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Meningkatkan peran serta masyarakat yang memberikan informasi-informasi tentang pelanggaran Peraturan Daerah di daerahnya. Seperti di bidang pertambangan yaitu: pertambangan tanpa izin, pertambangan yang berizin namun berada di luar titik koordinat ataupun gangguan tambam lainnya yang berhubungan dengan pertambangan.
 - Meningkatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat serta tahapan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah.

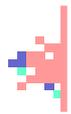
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama sebesar Rp 39.190.565.630,- dan terealisasi Rp 37.125.396.350,- atau 94,73%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.065.169.280,- (5,27%).

Anggaran tersebut tersebar pada 12 program sebagai berikut: Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) (2 kegiatan), Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan (9 kegiatan), Program Pendidikan Politik Masyarakat (9 kegiatan), Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (10 kegiatan), Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat (3 kegiatan), Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (11 kegiatan), Program Pembinaan dan Pengembangan



Kompetensi Aparatur (2 kegiatan), Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS (7 kegiatan), Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat (2 kegiatan), Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama (4 kegiatan), Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama (8 kegiatan), dan Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan (5 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama. Capaian indikator kinerja sebesar 82,35% lebih rendah dari realisasi anggarannya sebesar 94,73% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan belum efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Tujuan 1.2: Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan

Tujuan kedua misi 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah terpelihara dan berkembangnya kebudayaan. Pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel 3.3.4.

Tabel 3.3 4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan 1.2

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Persentase peningkatan objek kebudayaan yang dilestarikan pemajuan yang	10	10	100	-

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional.



Dari tabel 3.3.4 dapat dilihat indikator kinerja tujuan persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan target 10 terealisasi 10 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Berdasarkan realisasi indikator kinerja persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan 2 Misi 1 baru tercapai 10%. Selama tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan peningkatan objek pemajuan kebudayaan dengan cara menjaga keberlanjutan kebudayaan, menghidupkan ekosistem kebudayaan, mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan.

Untuk mencapai tujuan terpelihara dan berkembangnya kebudayaan telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 5 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 1.2.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100

Objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 ditargetkan 1 dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu, peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 ditargetkan 10%.

Dari tabel 3.3.5 dapat dilihat indikator kinerja tujuan persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan target 10 terealisasi 10 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan}}{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan}} = \frac{1}{10} \times 100\% = 10\%$$

Ket: Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Prov. Sumbar tahun 2018 = 1 objek
 Jumlah objek pemajuan kebudayaan = 10 objek

Objek pemajuan kebudayaan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan ada 10 objek yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, situs, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional. Untuk tahun 2018, pemerintah Provinsi Sumatera Barat melestarikan objek “seni”.

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.6.

Tabel 3.3 6 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	-	100	-	40

Dari tabel 3.3.6 diketahui bahwa persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 sebesar 10%. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan indikator kinerja persentase peningkatan objek



pemajuan kebudayaan yang dilestarikan baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan tahun 2018 sebesar 10% menunjukkan pencapaian 25% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan ditargetkan 40% atau meningkat 30% dari realisasi di tahun 2018. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada untuk mencapai target tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pelestarian objek pemajuan kebudayaan di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menjaga keberlanjutan kebudayaan dengan cara:
 - Inventarisasi Pemajuan Kebudayaan dengan melalui tahapan pencatatan, pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data.
 - Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan serta mewariskan dan memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.
 - Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan guna mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
 - Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan restorasi.
 - Publikasi dengan cara penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
2. Menghidupkan ekosistem kebudayaan melalui penyebarluasan, pengkajian dan pengayaan keberagaman yang ada di Sumatera Barat.
3. Mendayagunakan objek pemajuan kebudayaan dengan cara melakukan internalisasi nilai budaya, membuat inovasi, mengolah Objek Pemajuan



Kebudayaan menjadi produk, meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional di bidang kebudayaan.

4. Memberdayakan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya sebesar Rp 13.278.319.984,- dan terealisasi Rp 12.346.238.005,- atau 92,98%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 932.081.979,- (7,02%).

Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya (3 kegiatan), Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya (1 kegiatan), Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (3 kegiatan), Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya (2 kegiatan), Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya (3 kegiatan) dan Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya (1 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya. Capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 92,98% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



MISI 2 MENINGKATKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL

Misi kedua RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah "Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional". Untuk mewujudkan misi ini perlu dilakukan perubahan (reformasi) di berbagai sektor antara lain reformasi institusi pemerintahan, reformasi manajemen sektor publik dan reformasi birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera



Barat menetapkan “meningkatnya penerapan reformasi birokrasi” sebagai tujuan untuk mencapai misi kedua RPJMD tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 2.1: Meningkatkan Penerapan Reformasi Birokrasi

Tujuan misi 2 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya penerapan reformasi birokrasi. Bagaimana penerapan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan daerah dapat diketahui melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Oleh karena itu, pencapaian tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel 3.3.7.

Tabel 3.3 7 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 2.1

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Indeks Reformasi Birokrasi	64	65,45	102,27	62,87

Indeks reformasi birokrasi menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Untuk mengetahui indeks reformasi birokrasi instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi terhadap penerapan reformasi Birokrasi setiap tahunnya.

Indeks reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat diharapkan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, indeks reformasi birokrasi tahun 2018 ditargetkan 64 atau meningkat sebesar 1,13 dari indeks reformasi birokrasi tahun 2017.

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat indikator kinerja tujuan indeks reformasi birokrasi target 64 terealisasi 65,45 dengan tingkat capaian 102,27% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.



Realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2018 diukur berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/03/M.RB.06/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 dengan indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah 65,45 (kategori B) sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.8.

Tabel 3.3 8 Rincian Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2017-2018

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I Komponen Pengungkit				
1	Manajemen Perubahan	5	2,14	2,01
2	Penataan Peraturan PerUUan	5	2,09	2,09
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6	2,82	2,84
4	Penataan Tatalaksana	5	2,79	2,83
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15	10,81	11,89
6	Penguatan Akuntabilitas	6	3,30	3,6
7	Penguatan Pengawasan	12	4,14	5,34
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6	3,33	3,38
Total Komponen Pengungkit (A)		60	31,42	39,98
II Komponen Hasil				
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14	9,87	10,04
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6	5,10	4,86
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7	5,64	5,74
4	Opini BPK	3	3	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10	7,84	7,83
Total Komponen Hasil (B)		40	31,45	31,47
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	62,87	65,45

Indeks reformasi birokrasi tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,58 dibandingkan dengan indeks reformasi birokrasi tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan misi 2 tercapai dengan baik.

Dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi, ada beberapa hambatan dan kendala yang masih dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hambatan tersebut antara lain:

1. Masih rendahnya komitmen pimpinan terhadap perlunya melaksanakan reformasi birokrasi.
2. Kesulitan merubah *mindset* aparatur yang masih ingin dilayani bukannya ingin melayani.

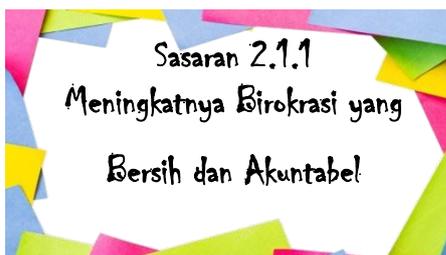


3. Belum maksimalnya penerapan manajemen kinerja
4. Masih rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan membentuk tim percepatan Reformasi Birokrasi untuk masing-masing area perubahan.
2. Melibatkan pihak terkait baik eksternal maupun internal dalam melakukan evaluasi, fasilitasi dan klarifikasi produk hukum daerah.
3. Meningkatkan implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui pembentukan Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-408-2018 dan penyempurnaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,84 menjadi 74,76 di tahun 2018.
4. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Provinsi Sumatera Barat.
5. Melaksanakan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:



Tabel 3.3 9 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
2. Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	100
Rata-rata Capaian			100

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel adalah sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1 *Opini BPK terhadap Laporan Keuangan*

Opini terhadap laporan keuangan ada 4 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat dan Tidak Wajar. WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap instansi Pemerintah yang pengelolaan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dikarenakan Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh opini WTP maka di tahun 2018 juga ditargetkan akan dapat mempertahankan opini WTP.

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan target WTP terealisasi WTP dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD tahun 2017 Nomor LHP. No. 22.A/LHP/VIII.PDG/04/2018 tanggal 18 April 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian.



Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.10.

Tabel 3.3 10 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	100	100	WTP

Dari tabel 3.3.10 diketahui bahwa tahun 2017-2018 pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh opini WTP terhadap Laporan Keuangan. Opini WTP ini sudah diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Capaian indikator kinerja opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan dapat mempertahankan opini WTP. Dengan mempertimbangkan realisasi dari tahun 2013-2018 dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Atas keberhasilan mempertahankan opini WTP 5 kali berturut-turut pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari 8 (delapan) Provinsi yang memperoleh penghargaan yang diberikan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Adapun pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan



Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Gorontalo. Sementara itu, semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sudah memperoleh opini WTP untuk LKPD tahun 2017.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempertahankan opini WTP di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara konsisten antara DPKD-Bidang akuntansi, DPKD Bidang BUD dan DPKD-UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi, Bank Nagari dan SKPD.
- b. Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap, aset lainnya, investasi jangka panjang dan hutang antara DPKD-bidang akuntansi, Biro Pengelolaan Aset Daerah, Biro Perekonomian, Bank Nagari dan SKPD
- c. Melaksanakan reuiu laporan keuangan SKPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara berkala (semesteran dan tahunan)
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi penyelesaian masalah aset pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- e. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu aplikasi Sistem Informasi Keuangan Pemerintah Daerah (SIPKD) yang selalu di *update* untuk memudahkan pengguna.
- f. Meningkatkan pengetahuan bendahara, PPK, dan sekretaris semua OPD melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Pembinaan dan pengawasan penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah melalui PKPT (Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator opini BPK terhadap laporan keuangan adalah sebesar Rp 19.676.736.461,- dan terealisasi Rp 17.616.761.409,- atau 89,53%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.059.975.052,- (10,47 %).



Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (17 kegiatan), Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota (4 kegiatan), Program Peningkatan Pendapatan Daerah (6 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (2 kegiatan) dan Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (8 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan. Capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 89,53% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

2

Nilai Evaluasi SAKIP

Implementasi sistem AKIP terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Nilai evaluasi SAKIP diharapkan akan selalu meningkat setiap tahun. Dikarenakan di tahun 2017 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh prediket BB dengan nilai 72,92 maka di tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap menargetkan BB dengan nilai yang lebih tinggi.

Dari tabel 3.3.9 dapat dilihat indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP target BB terealisasi BB dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018. Sesuai dengan surat Menteri PAN dan RB nomor B/872/M.AA.05/2018 perihal hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh prediket BB dengan nilai 74,76.



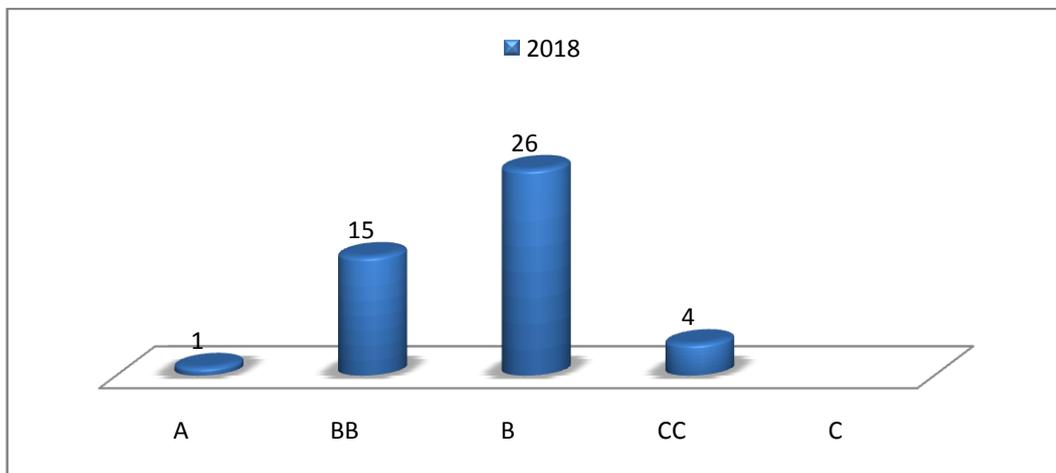
Rincian hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 diuraikan pada tabel 3.3.11.

Tabel 3.3 11 Rincian hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2018

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,93
2	Pengukuran Kinerja	25	17,06
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59
4	Evaluasi Internal	10	7,45
5	Capaian Kinerja	20	13,73
Nilai Hasil Evaluasi		100	74,76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Hasil evaluasi akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dengan nilai 74,76 (Prediket BB) didukung dengan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi terhadap 46 OPD. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa ada 1 OPD yang memperoleh nilai A (2,17%), 15 OPD memperoleh nilai BB (32,61%), 26 OPD memperoleh nilai B (56,52%), 4 OPD memperoleh nilai CC (8,7%) sebagaimana tergambar pada grafik 3.2.

Grafik 3. 2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun 2018



Sumber data: Inspektorat Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3 12 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Nilai evaluasi SAKIP	BB (74,76)	BB (72,92)	100	100	A

Dari tabel 3.3.12 diketahui bahwa prediket hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018 masih BB dengan kenaikan nilai sebesar 1,84 di tahun 2018. Capaian indikator kinerja ini tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang sama yaitu 100% yang berarti realisasi indikator kinerja tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, nilai evaluasi SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ditargetkan memperoleh nilai A (80,01) atau diperlukan kenaikan sebanyak 5,25 dari nilai evaluasi tahun 2018 (74,76). Untuk memperoleh nilai tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang maksimal terutama untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan tentang implementasi SAKIP di Sumatera Barat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat di tahun 2018 diketahui sebanyak 3 kabupaten/kota memperoleh nilai BB (15,79%), 9 kabupaten/kota memperoleh nilai B (47,37%) dan 7 kabupaten/kota memperoleh nilai CC (36,84%), sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.13.



Tabel 3.3 13 Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018

No	Kabupaten/kota	Prediket nilai
1	Kota Padang	BB
2	Kota Solok	B
3	Kota Pariaman	CC
4	Kota Sawahlunto	B
5	Kota Payakumbuh	BB
6	Kota Bukittinggi	BB
7	Kota Padang Panjang	CC
8	Kab Solok Selatan	CC
9	Kab Sijunjung	CC
10	Kab Darmasraya	B
11	Kab Tanah Datar	B
12	Kab Pasaman	CC
13	Kab 50 Kota	CC
14	Kab Agam	B
15	Kab Solok	B
16	Kab Padang Pariaman	B
17	Kab Kep Mentawai	B
18	Kab Pasaman Barat	CC
19	Kab Pesisir Selatan	B

Sumber data: data diolah

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap 34 Provinsi di Indonesia tahun 2018 menunjukkan 1 Provinsi memperoleh nilai AA, 4 Provinsi memperoleh nilai A, 6 Provinsi memperoleh nilai BB, 18 Provinsi memperoleh nilai B dan 5 Provinsi memperoleh nilai CC. Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2018 Provinsi yang memperoleh peringkat 11 besar diuraikan pada tabel 3.3.14.

Tabel 3.3 14 Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Tahun 2018

No	Provinsi	Prediket Nilai
1	DI Yogyakarta	AA
2	Provinsi Jawa Timur	A
3	Provinsi Jawa Barat	A
4	Provinsi Kalimantan Selatan	A
5	Provinsi Jawa Tengah	A
6	Provinsi Kalimantan Timur	BB
7	Provinsi Sumatera Selatan	BB
8	Provinsi Bali	BB
9	Provinsi Sumatera Barat	BB
10	Provinsi Kepulauan Riau	BB
11	Provinsi DKI Jakarta	BB

Hambatan peningkatan implementasi SAKIP di tahun 2018 antara lain:

1. Cascading kinerja belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.



2. Komitmen dan pemahaman pimpinan dalam hal menerapkan SAKIP masih belum merata.
3. Keterlibatan Bappeda dan Inspektorat dalam meningkatkan implementasi SAKIP masih belum maksimal.

Upaya yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan implementasi SAKIP di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-408-2018. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja berasal dari unsur Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi.
2. Pembahasan Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi dan beberapa OPD dengan narasumber dari Kementerian PAN dan RB.
3. Rekomendasi tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018.
4. Penyempurnaan Cascading kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menyalarkasikan sasaran Pemerintah Provinsi dengan tujuan perangkat daerah.

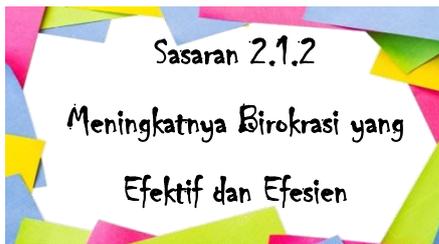
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator nilai evaluasi SAKIP adalah sebesar Rp 27.211.859.436,- dan terealisasi Rp 25.333.810.868,- atau 93,10%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.878.048.568,- (6,9%).

Anggaran tersebut tersebar pada 9 program sebagai berikut Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat (1 kegiatan), Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum (11 kegiatan), Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan (4 kegiatan), Program



Perencanaan Pembangunan Daerah (7 kegiatan), Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (27 kegiatan), Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat (4 kegiatan), Program Pengelolaan Otonomi Daerah (16 kegiatan), Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah (4 kegiatan) dan Program Penerapan Pemerintahan yang Baik (19 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP. Capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 93,10% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Akan tetapi, terdapat ketidaksesuaian antara kegiatan dengan programnya yaitu 19 kegiatan yang ada pada Program Pemerintahan yang Baik.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 15 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Indeks Profesionalitas ASN	68	76	111,76
2. Indeks e-Government/SPBE	2,6	2,43	93,46
Rata-rata Capaian			102,61

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 102,61% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:



1

Indeks Profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas ASN ditetapkan untuk melihat sejauh mana tingkat profesionalitas aparatur. Indeks profesionalitas ASN diharapkan akan meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, untuk tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks profesionalitas ASN 68 lebih rendah 20,43 dari realisasi tahun 2017. Hal ini dikarenakan adanya formula dalam penghitungan indeks profesionalitas ASN mengalami perubahan mulai tahun 2018.

Dari tabel 3.3.15 dapat dilihat indikator kinerja indeks profesionalitas ASN target 68 terealisasi 76 dengan tingkat capaian 111,76% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan 4 indikator yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin 3.330 aparatur Provinsi Sumatera Barat (1.096 Esselon dan 2.234 staf) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Pengukuran	Bobot (%)	Nilai
1	Kualifikasi	25	17
2	Kompetensi	40	30
3	Kinerja	30	24
4	Disiplin	5	5
Total		100	76
Kategori			Sedang

Sumber data: BKD Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.16.



Tabel 3.3 16 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja indeks profesionalitas ASN

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks profesionalitas ASN	76	88,43	111,76	119,5	74

Dari tabel 3.3.16 diketahui bahwa indeks profesionalitas ASN tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 12,43 di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh perbedaan metode untuk menghitung indeks profesionalitas ASN dan objek yang dihitung indeks profesionalitasnya. Tahun 2017 penghitungan Indeks profesionalitas ASN menggunakan komponen kompetensi gap, kinerja, kompensasi dan pelanggaran disiplin terhadap ASN yang mempunyai jabatan. Capaian indikator kinerja ini tahun 2017-2018 menunjukkan nilai >100% yang berarti realisasi indikator kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN tahun 2017, capaian tahun 2018 menurun sebesar 7,74%.

Untuk tahun 2021, indeks profesionalitas ASN ditargetkan 74 lebih rendah dibandingkan realisasi di tahun 2018. Walaupun demikian, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan tetap menargetkan indeks profesionalitas ASN sebesar 74 di tahun 2021 karena formula perhitungan indikator kinerja ini mengalami perubahan setiap tahunnya.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain:

1. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara data pegawai yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara berasal dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Kendalanya, terjadi ketidaksesuaian data Pegawai Negeri antara SAPK yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketidaksesuaian data dikarenakan belum terhubungnya aplikasi SAPK dengan SIMPEG sehingga



data pegawai yang berubah harus diupload ulang, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan updating data ke SAPK sangat lama dikarenakan lambatnya jaringan.

2. Kurangnya anggaran pelatihan/bimtek bagi Aparatur Sipil Negara, yang mana jumlah pelatihan/bimtek merupakan salah satu indikator penghitungan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Upaya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN di tahun yang akan datang antara lain:

1. Melakukan koordinasi terkait percepatan *updating* data SAPK ke BKN.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui penambahan kegiatan pelatihan/bimtek bagi Aparatur Sipil Negara.
3. Meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara melalui penambahan kegiatan sosialisasi/workshop penanganan kasus-kasus kepegawaian yang diharapkan dapat menekan jumlah Aparatur Sipil Negara yang bermasalah dengan disiplin.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator indeks profesionalitas ASN adalah sebesar Rp 24.389.135.120,- dan terealisasi Rp 14.606.807.841,- atau 59,89%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.782.327.279,- (40,11 %).

Anggaran tersebut tersebar pada 4 program sebagai berikut Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur (76 kegiatan), Program Pendidikan Kedinasan (35 kegiatan), Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (11 kegiatan), dan Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah (7 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja indeks profesionalitas ASN. Capaian indikator kinerja sebesar 117,76% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 59,89% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Indeks *e-government*/SPBE tahun 2018 ditargetkan meningkat 0,17 dibandingkan realisasi tahun 2017 (2,43).

Dari tabel 3.3.15 dapat dilihat indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE target 2,6 terealisasi 2,43 dengan tingkat capaian 93,46% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh tim penilai dan pemeringkatan *e-government* (PeGI) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk tahun 2018, dengan dikeluarkannya PermenPAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) maka penilaian PeGI dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Akan tetapi, nilai PeGI tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB sehingga untuk realisasi indeks *e-government*/SPBE tahun 2018 masih menggunakan realisasi tahun 2017.

Rincian penilaian indeks *e-government* Provinsi Sumatera Barat tergambar pada tabel 3.3.17.

Tabel 3.3 17 Rincian penilaian indeks *e-government* Provinsi Sumatera Barat

No	Dimensi Penilaian	Nilai
1	Kebijakan	2,54
2	Kelembagaan	2,67
3	Infrastruktur	2,19
4	Aplikasi	2,61
5	Perencanaan	2,13
Nilai rata-rata		2,43
Kategori		Kurang

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.18.

Tabel 3.3 18 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks <i>e-government</i> /SPBE	2,43	2,43	93,46	101,25	3

Dari tabel 3.3.18 diketahui bahwa indeks *e-government* tahun 2017-2018 mempunyai nilai yang sama. Hal ini dikarenakan indeks *e-government* tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB sehingga realisasi 2017-2018 masih menggunakan data realisasi yang sama. Capaian kinerja indeks *goverment*/SPBE tahun 2017-2018 menunjukkan tren menurun sebesar 7,79%.

Indeks *e-government* sebesar 2,43 di tahun 2018 menunjukkan pencapaian 81% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, terjadi peningkatan sebesar 0,57 untuk pencapaian target di tahun 2021. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2018, target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks *e-government* tahun 2018 antara lain:

1. Diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 tahun 2018 tentang SPBE Provinsi Sumatera Barat.
2. Meningkatkan jumlah website dan aplikasi

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan indeks *e-government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas *bandwith* yang masih belum memadai.
2. Aplikasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum maksimal.



3. Masih banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi.
4. Belum optimalnya dukungan anggaran dalam pengelolaan e-government.

Upaya untuk meningkatkan indeks *e-government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang adalah:

1. Melakukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan *e-government* khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.
2. Menyusun Peraturan Gubernur tentang infrastruktur jaringan.
3. Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwidth yang lebih memadai.
4. Pengintergrasian aplikasi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan.
5. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM tenaga ahli IT pengelola/penyelenggara *e-Government*.

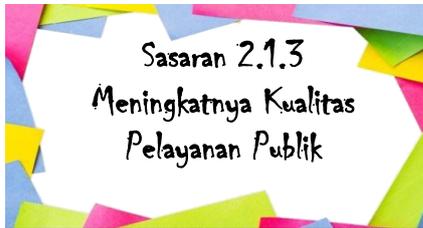
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator indeks *e-government*/SPBE adalah sebesar Rp 17.909.992.262,- dan terealisasi Rp 16.443.966.688,- atau 91,81%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.466.025.574,- (8,19%).

Anggaran tersebut tersebar pada 8 program sebagai berikut Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi (1 kegiatan), Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi (1 kegiatan), Program Informasi dan Komunikasi Publik (4 kegiatan), Program Keterbukaan Informasi (1 kegiatan), Pengelolaan *e-Government* Provinsi Sumatera Barat (9 kegiatan), Program Kerjasama Informasi dan Media Massa (2 kegiatan), Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (9 kegiatan) dan Program Pengembangan Data dan Informasi (4 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja indeks *e-government*/SPBE. Capaian indikator kinerja sebesar 93,46% lebih tinggi dari



realisasi anggarannya sebesar 91,81% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 19 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 2.1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Indeks integritas pelayanan publik	3,01	3,18	105,65
2. Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada unit pelayanan publik	80	78,83	98,54
Rata-rata Capaian			102,09

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya birokrasi yang efektif dan efisien adalah sebesar 100,09% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1 Indeks Integritas Pelayanan Publik

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seharusnya berkualitas baik. Oleh karena itu berdasarkan range penilaian indeks pelayanan publik di tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan indeks 3,01 (baik) untuk indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik.

Dari tabel 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik target 3,01 terealisasi 3,18 dengan tingkat capaian 105,65% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik diukur berdasarkan hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2018. Aspek yang dinilai oleh kementerian PAN dan RB adalah:



Aspek	Persentase (%)
Kebijakan Pelayanan	30
Profesionalisme SDM	18
Sarana Prasarana	15
Sistem Informasi Pelayanan Publik	15
Konsultasi dan Pengaduan	15
Inovasi	7
	100

Unit penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dievaluasi adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Solok dan Kantor Samsat Bukittinggi. Hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 tergambar pada tabel 3.3.20.

Tabel 3.3 20 Hasil evaluasi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai	Kategori
1	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3,32	Baik dengan Catatan (B-)
2	RSUD Solok	3,33	Baik dengan Catatan (B-)
3	Kantor Samsat Bukittinggi	2,89	Cukup (C)

Sumber data: Biro Organisasi

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.21.

Tabel 3.3 21 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks integritas pelayanan publik	3,18	-	105,65		4

Dari tabel 3.3.21 diketahui bahwa realisasi dan capaian indikator kinerja indeks integritas pelayanan publik tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun



2017. Hal ini dikarenakan, indikator ini baru ditetapkan di tahun 2018 sebagai dampak dari penyempurnaan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Indeks integritas pelayanan publik tahun 2018 sebesar 3,18 menunjukkan pencapaian 79,5% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, indeks integritas pelayanan publik ditargetkan 4 atau meningkat 0,82 dari realisasi di tahun 2018. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya yang optimal agar indeks integritas pelayanan unit penyelenggara pelayanan publik bernilai minimal 4 (kategori baik)

Evaluasi penyelenggara pelayanan publik tahun 2018 juga menilai UPPP 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil evaluasi menunjukkan 6 kabupaten/kota (Kabupaten Solok, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Padang Pariaman) memperoleh nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan UPPP Provinsi dan UPPP Kota Padang memperoleh nilai yang sama dengan Provinsi. Rincian hasil evaluasi UPPP tergambar pada tabel 3.3.22.

Tabel 3.3 22 Hasil evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai
1	Kabupaten Solok	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
		RSUD Arosuka	B
2	Kota Solok	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
3	Kota Padang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B-
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B-
		RSUD dr. Rasyidin	C
4	Kota Padang Panjang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	B
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
		RSUD Padang Panjang	B
5	Kabupaten Tanah Datar	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	B
		RSUD Ali Hanafiah	A-



No	Kabupaten/Kota	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Nilai
6	Kota Payakumbuh	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A-
		RSUD Dr. Adnan WD	B
7	Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A-
		Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A-
		RSUD Parit Malintang	B-

Sumber data: Biro Organisasi

2

Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik

Rata-rata survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2018 ditargetkan 80 lebih rendah 0,78 dibandingkan realisasi tahun 2017. Penetapan target 80 dikarenakan indeks kepuasan masyarakat sebesar 80 sudah termasuk kategori baik.

Dari tabel 3.3.19 dapat dilihat indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik target 80 terealisasi 78,83 dengan tingkat capaian 98,54% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang melakukan survei di tahun 2018. Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Tahun 2018, sebanyak 21 unit penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik (UKPP) Provinsi Sumatera Barat melakukan survei IKM yang penilaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Rincian hasil survei IKM UKPP Provinsi Sumatera tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.3.23.



Tabel 3.3 23 Rincian Hasil Survei IKM tahun 2018

No	UKPP	Skor	Kategori
1	RSUD Dr. Achmad Muchtar Bukittinggi	91,06	A
2	RSUD Muhammad Natsir Solok	89,50	A
3	RSUD Pariaman	92,02	A
4	RSJ. Prof. HB. Sa'anin Padang	85	B
5	UPTD. Balai Kesehatan Indra Mata padang	97,00	A
6	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sumbar	84,65	A
7	UPTD. Rumah Sakit Hewan , Dinas Peternakan Prov. Sumbar	90,02	A
8	UPTD. Balai Pengembangan Teknik dan Sumber Daya Tuah Sakato Payakumbuh	89,39	A
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sumbar	81,26	B
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumbar	75,28	C
11	UPTD. Balai Latihan Kerja Payakumbuh, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	84,05	B
12	UPTD. Balai Latihan Kerja Padang Panjang , Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	75,31	B
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	79, 19	B
14	UPTD. Pengawasan Wilayah I Padang , Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat	78,07	B
15	UPTD. Pengawasan Wilayah II (Sijunjung)	78,84	B
16	UPTD. Pengawasan Wilayah III (Payakumbuh)	73,58	KB
17	UPTD. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	79,05	B
18	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	76,85	B
19	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Lubuk Sikaping	79,6	B
20	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Padang Panjang	77,6	B
21	UPTD. Pelayanan Pendapatan Provinsi di Dharmasraya	77,3	B
TOTAL		1.655,43	
Rata-rata		78,83	B

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.24.

Tabel 3.3 24 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	78,83	80,78	98,54	100,98	80



Dari tabel 3.3.24 diketahui rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik (UKPP) di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 1,95 dibandingkan dengan tahun 2017. Sebanyak 21 UKPP melakukan survei di tahun 2018 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017 (23 UKPP). Capaian indikator kinerja ini tahun 2017-2018 juga mengalami penurunan sebesar 2,44%, dimana capaian tahun 2018 <100% yang berarti pencapaian realisasi tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk tahun 2021, rata-rata survei kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik (UKPP) ditargetkan 80. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya untuk dapat mencapai target tersebut karena memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang harus dicapai.

Kendala dalam *meningkatkan kualitas pelayanan publik* antara lain:

1. Belum optimalnya pengelolaan pengaduan pelayanan publik dikarenakan belum maksimalnya sosialisasi tentang penggunaan aplikasi lapor SP4N untuk penyampaian keluhan masyarakat.
2. Belum sempurnanya inovasi yang dilaksanakan oleh UKPP Provinsi dan Kabupaten/kota serta masih adanya inovasi yang belum menyentuh terhadap peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk *meningkatkan kualitas pelayanan publik* adalah:

1. Mengadakan pembinaan survei kepuasan masyarakat kepada pemangku kepentingan di sektor pelayanan publik pada OPD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota se Sumatera Barat
2. Meningkatkan inovasi pada UKPP
3. Meningkatkan penerapan Standar Operasional Prosedur dan standar pelayanan pada perangkat daerah dan UKPP.



Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis *meningkatkan kualitas pelayanan publik* adalah sebesar Rp 106.598.717.758,- dan terealisasi Rp 97.643.079.107,- atau 91,60%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 8.955.638.651,- (8,4%).

Anggaran tersebut tersebar pada 20 program sebagai berikut: Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan (14 kegiatan), Program Peningkatan Pelayanan Publik (2 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan (6 kegiatan), Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan (8 kegiatan), Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan (23 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (5 kegiatan), Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah (4 kegiatan), Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik (11 kegiatan), Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah (17 kegiatan), Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan (1 kegiatan), Program Manajemen Perubahan (1 kegiatan), Program Pembangunan Materi Hukum (4 kegiatan), Program Peningkatan Budaya Hukum (1 kegiatan), Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM (4 kegiatan), Program Sarana dan Informasi Hukum (1 kegiatan), Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan (4 kegiatan), Program Penataan Administrasi Kependudukan (26 kegiatan), Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan (1 kegiatan), Program Pengembangan Data dan Informasi (1 kegiatan) dan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (11 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik. Capaian indikator kinerja sebesar 102,09% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 91,60% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



MISI 3 MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT, BERIMAN, BERKARAKTER, DAN BERKUALITAS TINGGI

Misi ketiga RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi”. Untuk mewujudkan misi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia” sebagai tujuan untuk mencapai misi ketiga RPJMD tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 3.1: *Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*

Tujuan misi 3 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan dalam suatu negara. Kualitas sumber daya manusia diukur dengan menggunakan indikator indeks pembangunan manusia. Realisasi dan capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.3.25.

Tabel 3.3 25 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 3.1

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,27	71,24	99,06	70,73

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM diharapkan akan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, di tahun 2018 IPM ditargetkan 71,27 atau meningkat sebesar 0,54 dari realisasi tahun 2017.

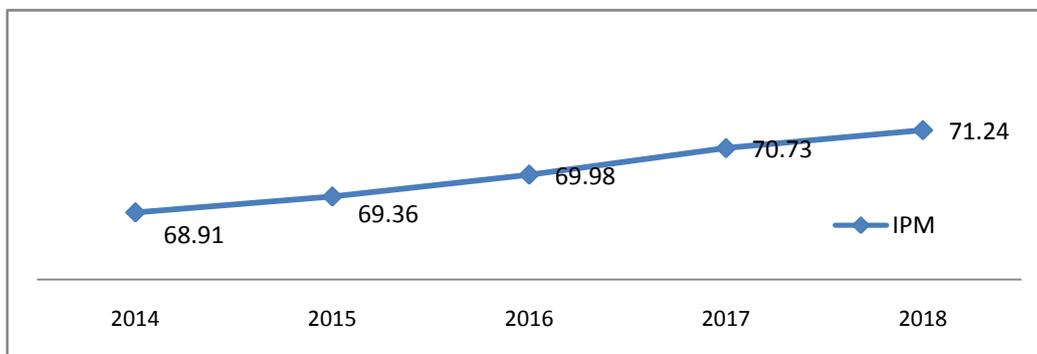


Dari tabel 3.3.25 diketahui bahwa indikator kinerja tujuan indeks pembangunan manusia target 71,27 terealisasi 71,24 dengan tingkat capaian 99,06% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), Pengetahuan (*knowledge*), Standar hidup layak (*decent standard*). Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu : sangat tinggi ($IPM \geq 80$), tinggi ($70 \leq IPM < 80$), sedang ($60 \leq IPM < 70$) dan rendah ($IPM < 60$). Realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data tahun 2017 karena realisasi indeks pembangunan manusia keluar setelah $n+1$.

Realisasi indeks pembangunan manusia tahun 2017-2018 yang > 70 , berarti pembangunan manusia Sumatera Barat termasuk kelompok tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Dibandingkan dengan tahun 2017, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat meningkat sebesar 0,51. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan meningkatnya kualitas sumber daya manusia tercapai dengan baik. Indeks Pembangunan Manusia Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dan sejak tahun 2017 IPM sudah termasuk kelompok tinggi. Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2018 tergambar pada grafik 3.3.

Grafik 3.3 Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat

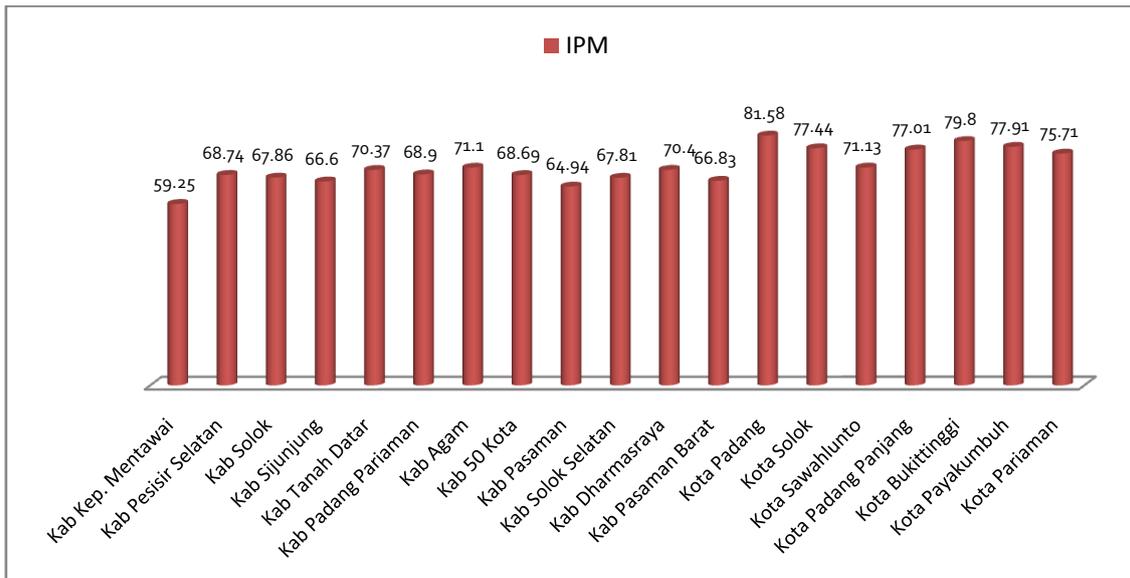


Sumber data: BPS Sumatera Barat



Nilai IPM Sumatera Barat merupakan akumulasi dari nilai IPM 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat 1 Kota dengan IPM sangat tinggi yaitu Kota Padang, 9 Kabupaten/Kota dengan IPM tinggi, 8 Kabupaten/Kota dengan IPM sedang, dan 1 Kabupaten dengan IPM rendah yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana tergambar pada grafik 3.4.

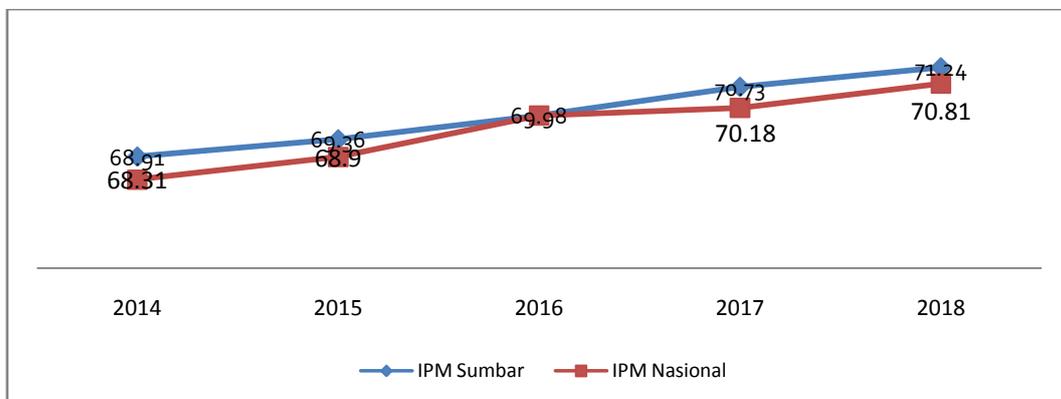
Grafik 3. 4 IPM kabupaten/Kota se Sumatera Barat



Sumber data: BRS no. 27/05/13/Th.XXI (7 Mei 2018)

Dibandingkan dengan rata-rata IPM Nasional, IPM Provinsi Sumatera Barat berada di atas rata-rata Nasional. Perbandingan IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir tergambar pada grafik 3.5.

Grafik 3. 5 IPM Nasional dan IPM Provinsi Sumatera Barat



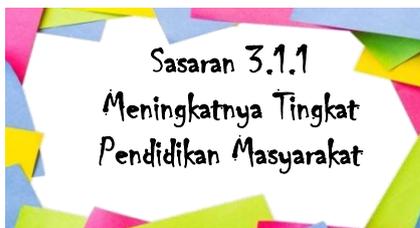
Sumber data: BPS Sumatera Barat



Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan harapan lama sekolah
Angka harapan lama sekolah di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,15 dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tahun 2017 menjadi 13,94.
2. Meningkatkan rata-rata lama sekolah
Angka rata-rata lama sekolah di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,13 dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2017 menjadi 8,72.
3. Meningkatkan angka harapan hidup
Angka harapan hidup di tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibandingkan dengan angka harapan hidup di tahun 2017 menjadi 68,78.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia telah ditetapkan 2 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian dua sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 26 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Harapan lama sekolah	14,4	13,94	96,81
Rata-rata lama sekolah	8,72	8,72	100
Rata-rata Capaian			98,41

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar 98,41% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:



1

Harapan lama sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan metode perhitungan untuk mengukur lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang sehingga diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah penduduk Sumatera Barat diharapkan selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, di tahun 2018 target harapan lama sekolah ditetapkan sebesar 14,4 atau meningkat sebesar 0,61 dari realisasi di tahun 2017 (13,79).

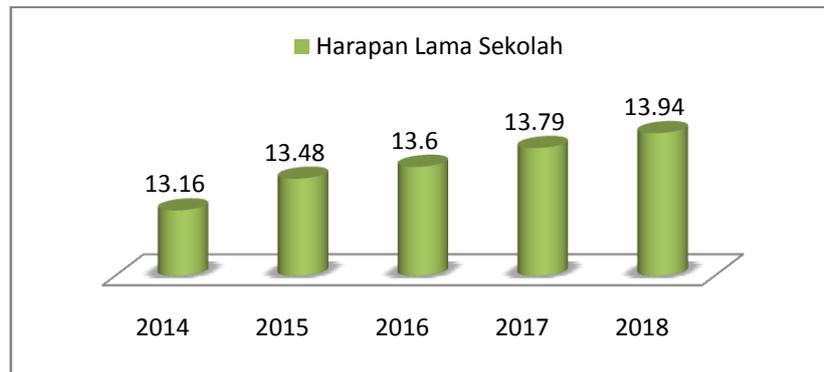
Dari tabel 3.3.26 dapat dilihat indikator kinerja harapan lama sekolah yang target 14,4 terealisasi 13,94 dengan tingkat capaian 96,81% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja Harapan lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data tahun 2017 dikarenakan realisasi harapan lama sekolah baru keluar setelah $n+1$.

Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 0,195. Perkembangan angka harapan lama sekolah dari tahun 2014-2018 tergambar pada grafik 3.6.



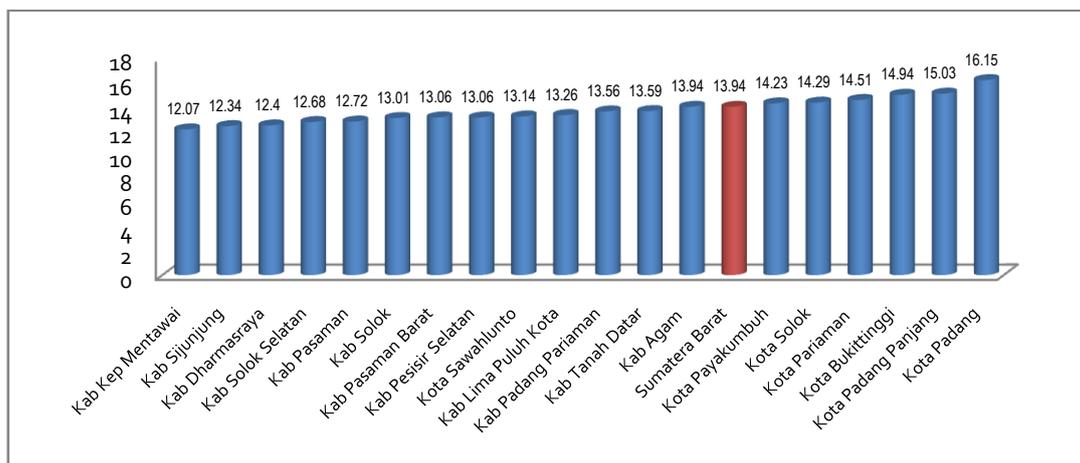
Grafik 3. 6 Harapan Lama Sekolah Sumatera Barat tahun 2014-2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat angka harapan lama sekolah tertinggi adalah Kota Padang dengan angka 16,15, terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 12,07, dan ada 6 kabupaten/kota yang angka harapan lama sekolahnya di atas Provinsi yaitu Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Padang. Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik 3.7.

Grafik 3. 7 Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.



Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja harapan lama sekolah tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.27.

Tabel 3.3 27 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja harapan lama sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Harapan lama sekolah	13,94	13,79	96,81	97,32	15,09

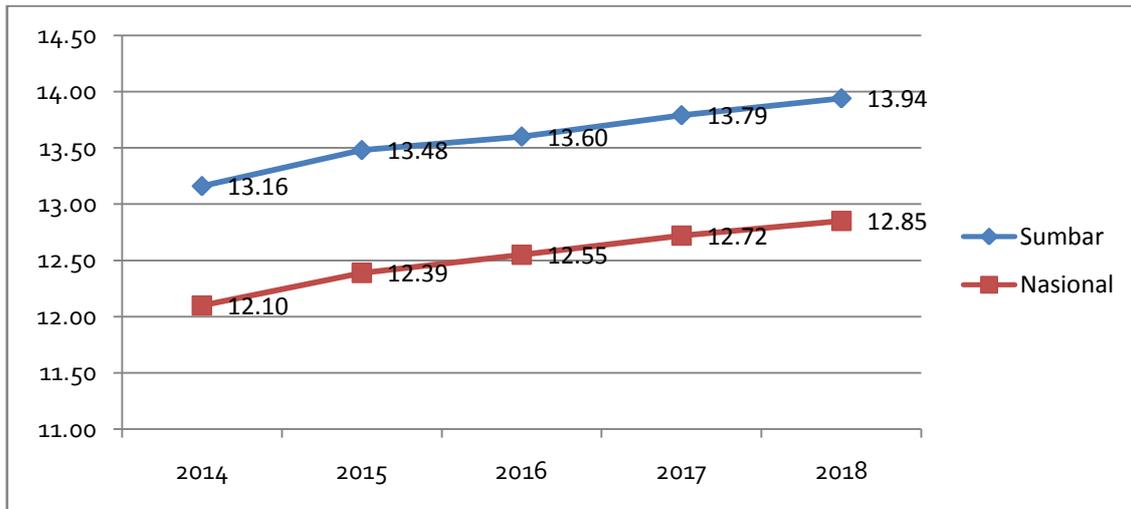
Dari tabel 3.3.27 diketahui bahwa harapan lama sekolah di tahun 2018 sebesar 13,94 atau mengalami peningkatan sebesar 0,15 dibandingkan dengan harapan lama sekolah di tahun 2017. Dengan harapan lama sekolah Sumatera Barat 13,94 berarti anak-anak umur 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan sampai jenjang D1 atau D2. Capaian indikator kinerja harapan lama sekolah di tahun 2018 dan 2017 menunjukkan nilai yang masih <100% yang berarti realisasi indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini tahun 2017-2018 menunjukkan tren menurun sebesar 0,51.

Harapan lama sekolah tahun 2018 sebesar 13,94% menunjukkan pencapaian 92,38% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, harapan lama sekolah ditargetkan 15,09% atau meningkat 1,15 dari realisasi di tahun 2018. Dikarenakan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dengan mempertimbangkan peningkatan angka harapan lama sekolah dari tahun 2017-2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya untuk mencapai target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan harapan lama sekolah tingkat nasional, harapan lama sekolah Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 berada di atas nasional. Selisih tertinggi terjadi di tahun 2015 dan 2018 yaitu sebesar 1,09. Perbandingan harapan lama sekolah tingkat nasional dengan Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.8.



Grafik 3. 8 Perbandingan harapan lama sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2014-2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Masih rendahnya realisasi harapan lama sekolah Sumatera Barat disebabkan oleh:

1. Cara pandang masyarakat terutama masyarakat perdesaan akan pendidikan sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan yang berperan meningkatkan kualitas hidup.
2. Masih rendahnya tingkat ekonomi masyarakat khususnya di daerah perdesaan untuk menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi mengingat pasca Pendidikan Menengah membutuhkan biaya yang lebih besar.
3. Pendidikan tinggi yang layak dan berakreditasi hanya berada di daerah Kota seperti Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan pasca tamat Pendidikan Menengah menjadi rendah dan berbiaya tinggi. Hal ini terlihat pada data statistik Pendidikan, dimana realisasi Lulusan SMA pada Tahun 2018 sebesar 99,26% namun yang melanjutkan ke Perguruan tinggi hanya sekitar 44,64%.
4. Masih rendahnya lulusan SMK yang dapat bekerja sehingga memberikan gambaran bahwa lulusan dari SMK hanya akan menjadi pengangguran. Hal ini terlihat dari Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa Lulusan SMK yang menamatkan SMK pada tahun 2018 sebesar 90,56% namun lulusan yang diterima di dunia usaha dan dunia industri hanya sebesar 21,01% dan ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi 14,31%.



Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan realisasi harapan lama sekolah Sumatera Barat antara lain:

1. Memfokuskan pembangunan urusan pendidikan ke depan terutama yang mengarahkan pada perubahan paradigma masyarakat untuk lebih mementingkan pendidikan akan dioptimalkan pada daerah-daerah perdesaan yang pada umumnya berada di Kabupaten terutama Kabupaten yang memiliki wilayah geografis yang cukup luas seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman dan termasuk Kabupaten yang merupakan pemekaran yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan.
2. Meningkatkan peran serta orang tua dalam dunia pendidikan dengan memberikan *parenting education* agar pendidikan anak menjadi prioritas dalam pengeluaran rumah tangga.
3. Meningkatkan mutu lulusan SMA untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi melalui Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMA di satuan pendidikan, pengadaan Alat Laboratorium SMA, pengadaan Alat Peraga Pendidikan SMA dan bimbingan Teknis Guru Mata Pelajaran SMA dengan Nilai UN Rendah.
4. Meningkatkan mutu lulusan SMK untuk dapat diterima pada Dunia Usaha dan Dunia Industri melalui Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK, Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum 2013 SMK, Lomba kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional, Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT, serta Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT.
5. Bekerjasama dengan Lembaga Keterampilan yang bersertifikasi untuk mencetak pemuda yang terampil dan siap pakai dengan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
6. Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan tinggi untuk melakukan rintisan Sekolah Jauh di daerah kabupaten/Kota seperti Universitas Andalas yang membuka Fakultas Pertanian di Kabupaten Dharmasraya untuk menjangkau Lulusan SMA melanjutkan pendidikan.



7. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara maksimal untuk menjangkau proses pembelajaran jarak jauh pada daerah-daerah yang minim akses dan sarana parasarana sekolah.
8. Meningkatkan akses, sarana dan prasarana serta mutu pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

2

Rata-rata lama sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan kegunaan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi angka Rata-Rata Lama Sekolah penduduk suatu wilayah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya dan juga diartikan semakin baiknya tingkat pengetahuan penduduk tersebut. Oleh karena itu, di tahun 2018, rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,72 atau meningkat sebesar 0,13 dari realisasi di tahun 2017 (8,59).

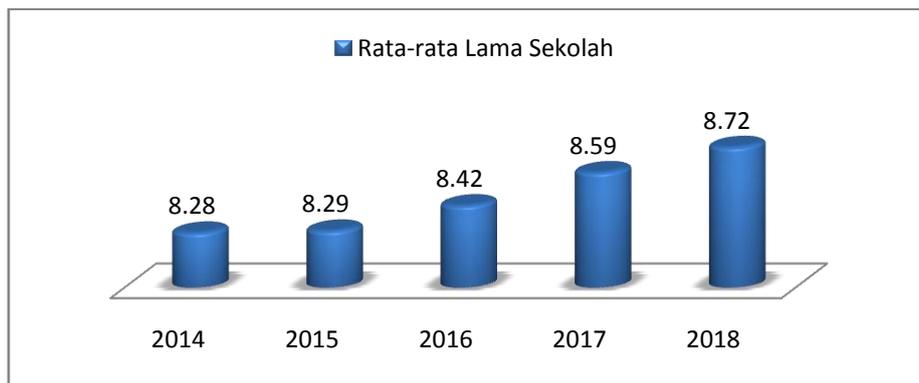
Dari tabel 3.3.26 dapat dilihat indikator kinerja rata-rata lama sekolah target 8,72 terealisasi 8,72 dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja rata-rata lama sekolah diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data tahun 2017 dikarenakan realisasi harapan lama sekolah baru keluar setelah $n+1$.

Rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,11. Perkembangan angka harapan lama sekolah dari tahun 2014-2018 tergambar pada grafik 3.9.



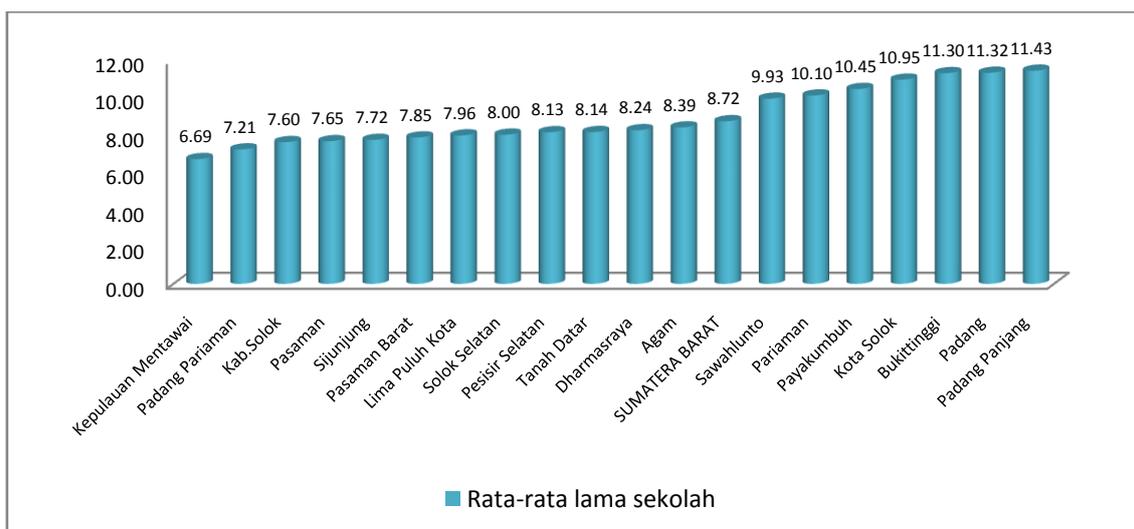
Grafik 3. 9 Rata-rata Lama Sekolah Sumatera Barat tahun 2014-2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata dari rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, rata-rata lama sekolah tertinggi diperoleh oleh Kota Padang Panjang dengan angka 11,43, terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan angka 6,69 dan ada 7 Kota yang angka rata-rata lama sekolahnya di atas rata-rata lama sekolah Provinsi yaitu Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Realisasi rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.10.

Grafik 3. 10 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat



Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.28.

Tabel 3.3 28 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja rata-rata lama sekolah

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Rata-rata lama sekolah	8,72	8,59	101,53	100	8,92

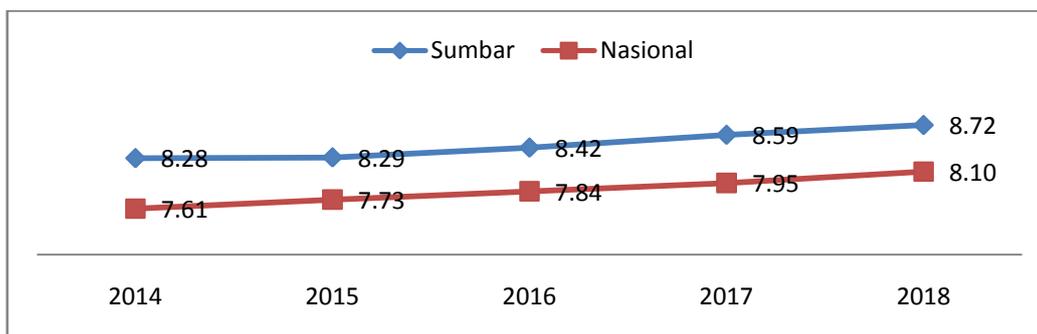
Dari tabel 3.3.28 diketahui bahwa rata-rata lama sekolah di tahun 2018 sebesar 8,72 atau mengalami peningkatan sebesar 0,13 dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah di tahun 2017. Capaian indikator kinerja harapan lama sekolah di tahun 2018 dan 2017 menunjukkan nilai $\geq 100\%$ yang berarti realisasi indikator kinerja tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja rata-rata lama sekolah tahun 2017-2018 menunjukkan tren meningkat sebesar 1,53%.

Rata-rata lama sekolah tahun 2018 sebesar 8,72 menunjukkan pencapaian 97,76% target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, rata-rata lama sekolah ditargetkan 8,92 atau meningkat 0,2 dari realisasi di tahun 2018. Dengan mempertimbangkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2017-2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera optimis dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah tingkat nasional, rata-rata lama sekolah Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 berada di atas nasional. Selisih tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar 0,67. Perbandingan rata-rata lama sekolah tingkat nasional dengan Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.11.



Grafik 3. 11 Perbandingan rata-rata lama sekolah Tingkat Nasional dengan Sumatera Barat tahun 2014-2018



Sumber data: BPS Sumatera Barat

Angka rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat sangat erat kaitannya dengan capaian beberapa indikator berikut ini:

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Sumatera Barat.

Berdasarkan data Sistem Database Perencanaan Pembangunan Daerah, berdasarkan jenjang pendidikannya, capaian APS pada kelompok SD/Sederajat yakni sebesar 93,69, kelompok SMP/Sederajat yakni sebesar 78,4 dan kelompok SMA/Sederajat 69,5. Hal ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan semakin tingginya jenjang pendidikan maka semakin rendah partisipasi penduduk untuk bersekolah.

2. Berdasarkan realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada setiap jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah realisasi APK dan APM nya sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

	SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat
Angka Partisipasi Kasar (APK)	106,61	103,59	94,58
Angka Partisipasi Murni (APM)	93,69	79,42	69,00

3. Kualitas Sumber Daya Manusia Sumatera Barat juga dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkannya, hal ini untuk memberikan gambaran bahwa semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi maka semakin baik keadaan kualitas penduduk tersebut. Berdasarkan data BPS menunjukkan pada tahun 2018, penduduk Sumatera Barat yang tamat jenjang



pendidikan SMA/ sederajat penduduk yang tamat MA/ sederajat sebesar 28,34%, diikuti tamat SMP/ sederajat sebesar 17,43%, dan tamat SD/ sederajat sebesar 20,70%, sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 12,28%. Disamping itu masih terdapat sebesar 21,25% penduduk 15 tahun ke atas yang pernah bersekolah di SD/ sederajat namun tidak tamat

4. Angka Putus Sekolah berdasarkan data BPS juga menunjukkan bahwa semakin tingginya jenjang pendidikan maka Angka Putus Sekolah juga semakin tinggi. Untuk tahun 2018, Angka putus sekolah di jenjang SD sebesar 0,42%, naik ke jenjang SMP angka putus sekolah naik menjadi 1,83% (naik lebih dari 4 kali lipat). Ketika mencapai jenjang SMA, angka putus sekolah naik hingga mencapai 2,77%. Kenaikan angka putus sekolah dari jenjang SD sampai SMA juga terlihat di hampir semua golongan pengeluaran.

Hambatan dan kendala Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan rata-rata lama sekolah antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran orang tua terhadap penuntasan pendidikan anak untuk menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa anak diharapkan telah dapat dengan segera mendukung ekonomi keluarga.
2. Masih terbatasnya satuan pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah pada daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga lulusan SMP sederajat harus mengalokasikan biaya tambahan untuk operasional pribadi guna memperoleh layanan pendidikan menengah di luar daerah (letak geografis).
3. Masih rendahnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak berkebutuhan khusus, serta masih terbatasnya kemudahan atau akses pada pendidikan khusus.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain dengan:



1. Mempertahankan pengalokasian anggaran 20% untuk belanja fungsi pendidikan pada APBD Provinsi dan juga menjadi bahan dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota.
2. Melakukan program-program selektif sesuai dengan kewenangan Provinsi pada pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa dengan meningkatkan akses dan mutu pendidikan.
3. Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan pendidikan anak usia dini dan menengah untuk melakukan terobosan peningkatan rata-rata lama sekolah.
4. Pemberian bantuan pendidikan tepat sasaran, baik Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI dan SMP/MTs dan SMA dan Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM) pada jenjang SMA/MA serta SMK yang memberikan dampak bertambahnya jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi kasar maupun angka partisipasi murni.
5. Meningkatkan sarana dan parasana sekolah seperti pembangunan gedung sekolah baru dan juga yang berasrama, pembangunan Ruang Kelas Baru untuk menjangkau peserta didik yang berada terutama di daerah terisolir, terluar dan tertinggal serta penyebaran dan sosialisasi pendidikan menengah, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, hingga penyelenggaraan sekolah gratis.

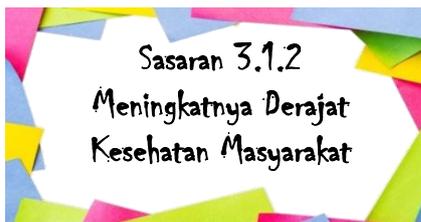
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat adalah sebesar Rp 763.353.170.839,- dan terealisasi Rp 708.310.711.603,- atau 92,79%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 55.042.459.236,- (7,21%).

Anggaran tersebut tersebar pada 13 program sebagai berikut: Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA (262 kegiatan), Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK (140 kegiatan), Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (12 kegiatan), Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (24 kegiatan), Program Pendidikan



Berkarakter (6 kegiatan), Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (51 kegiatan), Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan (20 kegiatan), Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (21 kegiatan), Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga (2 kegiatan), Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan (7 kegiatan), Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya (3 kegiatan) dan Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitas Pendidikan (1 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Capaian indikator kinerja sebesar 98,41% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 92,79% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 29 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 3.1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Angka harapan hidup	69,06	68,78	99,59

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen pembentuk IPM untuk menggambarkan umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat diharapkan selalu meningkat setiap



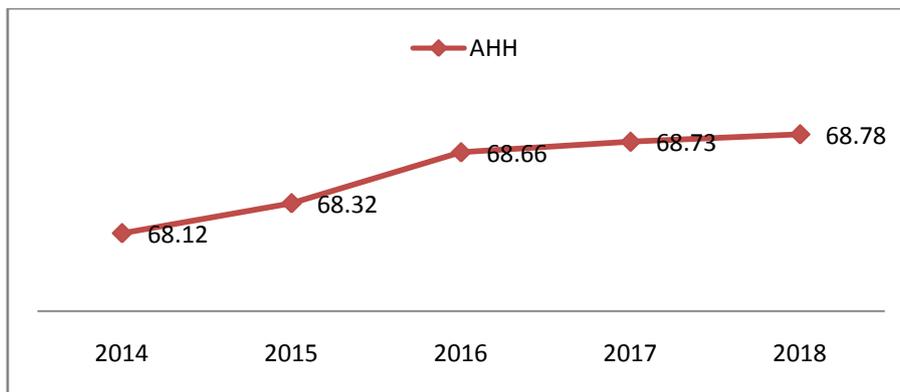
tahunnya. Oleh karena itu, di tahun 2018 angka harapan hidup ditargetkan 69,06 atau meningkat 0,33 dari realisasi tahun 2017 (68,73).

Dari tabel 3.3.29 dapat dilihat indikator kinerja angka harapan hidup target 69,06 terealisasi 68,78 dengan tingkat capaian 99,59% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja angka harapan hidup diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan data tahun 2017 dikarenakan realisasi angka harapan hidup baru keluar setelah n+1.

Perkembangan Angka harapan hidup penduduk Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 0,165 sebagaimana tergambar pada grafik 3.12.

Grafik 3.12 Angka Harapan Hidup Sumatera Barat tahun 2014-2018

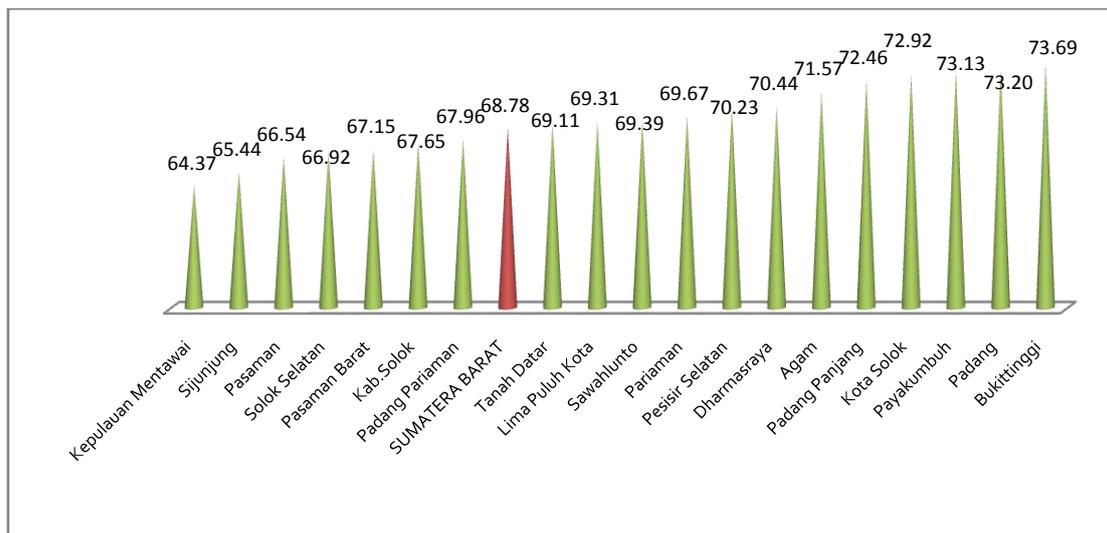


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan rata-rata Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Dari 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat angka harapan hidup tertinggi berada di Kota Bukittinggi 73,69 dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai 64,37 dengan gap sebesar 9,32. Sebanyak 12 kabupaten/kota mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tergambar pada grafik 3.13.



Grafik 3. 13 Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja angka harapan hidup tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.30

Tabel 3.3 30 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja angka harapan hidup

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Angka harapan hidup	68,78	68,73	99,59	99,72	69,54

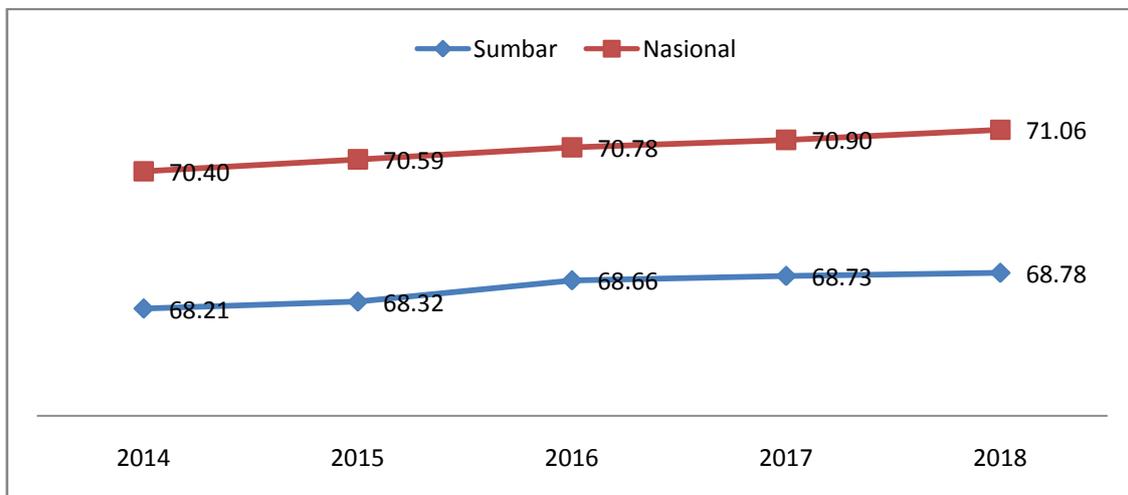
Dari tabel 3.3.30 diketahui bahwa angka harapan hidup di tahun 2018 sebesar 68,78 atau mengalami peningkatan sebesar 0,05 dibandingkan dengan angka harapan hidup di tahun 2017. Capaian indikator kinerja angka harapan hidup di tahun 2018 dan 2017 menunjukkan nilai < 100% yang berarti realisasi indikator kinerja tercapai di bawah target yang telah ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2017, capaian indikator kinerja angka harapan hidup di tahun 2018 menunjukkan tren menurun sebesar 0,13%.



Angka harapan hidup tahun 2018 sebesar 68,78 menunjukkan pencapaian 98,91% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, angka harapan hidup ditargetkan 69,54 atau meningkat 0,76 dari realisasi di tahun 2018. Dikarenakan urusan kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dan dengan mempertimbangkan peningkatan angka harapan hidup dari tahun 2017-2018 yang relatif kecil maka Pemerintah Provinsi Sumatera akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan angka harapan hidup tingkat nasional, angka harapan hidup Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 masih berada di bawah nasional. Selisih tertinggi terjadi di tahun 2018 sebesar 2,28. Perbandingan angka harapan hidup tingkat nasional dengan Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.14.

Grafik 3. 14 Perbandingan Angka Harapan Hidup Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2014-2018



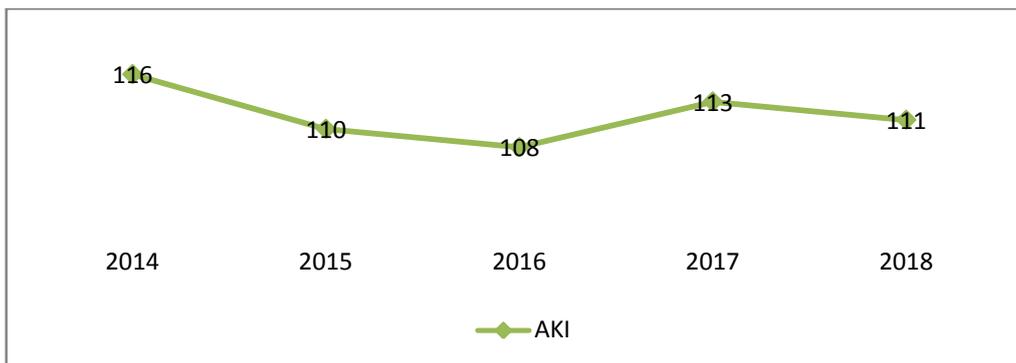
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Peningkatan angka harapan hidup didukung oleh capaian indikator berikut ini:

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi
 - a. Jumlah kematian ibu dari tahun 2014-2018 menunjukkan tren penurunan sebagaimana tergambar pada grafik 3.15.



Grafik 3. 15 Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

- b. Angka kematian bayi juga menunjukkan tren penurunan selama 3 tahun terakhir (2016-2018). Pada tahun 2016, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 289 jiwa, turun 21,8% di tahun 2017 menjadi 226 jiwa dan di tahun 2018 turun kembali sebesar 3,54% menjadi 218 jiwa.
2. Peningkatan jumlah fasilitas kesehatan terakreditasi.
Sampai dengan tahun 2018 sebanyak 245 puskesmas dan 21 rumah sakit sudah terakreditasi. Total puskesmas yang ada sebanyak 275 puskesmas, sedangkan total rumah sakit sebanyak 64 rumah sakit
3. Menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada Baduta dengan melakukan upaya perbaikan gizi secara spesifik dan sensitif.
4. Meningkatkan cakupan pelayanan neonatus pertama (pelayanan sesuai standar 6-48 jam setelah lahir). Semakin meningkat cakupan pelayanan neonatus pertama berarti angka kematian bayi semakin menurun. Peningkatan cakupan neonatus pertama dilakukan melalui penempatan bidan desa dan bidan jorong, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pembiayaan kunjungan neonatus melalui dan BOK, pelaksanaan kelas ibu hamil, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan pemberian buku KIA bagi ibu hamil.
5. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak 0-11 bulan. Sampai tahun 2018 baru 8 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang sudah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap.



6. Meningkatkan peserta jaminan kesehatan Sumatera Barat. Sebanyak 77,4% dari penduduk Sumatera Barat (5.462.129 jiwa) sudah memiliki jaminan kesehatan
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada rumah sakit daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hambatan/kendala dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain:

1. Masih terdapat 30 Puskesmas yang belum terakreditasi dari total 275 Puskesmas. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tim pendamping akreditasi puskesmas di Kabupaten.
2. Upaya perbaikan gizi masyarakat terkendala permasalahan mendasar seperti kemiskinan, kerawanan pangan, akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi dan akses terhadap air bersih, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pendidikan di dalam kelas dan perlindungan anak.
3. Masih rentannya bayi baru lahir terhadap penyakit yang dapat menyebabkan kematian.
4. Masih berkembangnya isu halal haram dan vaksin inefektif di beberapa wilayah yang menurunkan kepercayaan dan keinginan masyarakat untuk memberikan imunisasi dasar kepada bayi.
5. Masih rendahnya cakupan jaminan kesehatan, yang disebabkan masih banyaknya badan usaha belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat.
6. Masih belum optimalnya peran Puskesmas, pustu dan balai pengobatan lainnya sebagai pusat upaya kesehatan masyarakat yang antara lain disebabkan karena *inefisiensi* dan buruknya kualitas dalam sektor kesehatan, buruknya kualitas infrastruktur dan banyaknya pusat kesehatan yang tidak memiliki perlengkapan yang memadai, jumlah dokter/tenaga kesehatan lainnya yang tidak memadai di daerah terpencil dan tingginya ketidakhadiran tenaga kesehatan di puskesmas.
7. Tingkat perekonomian masyarakat yang masih rendah sehingga berkunjung ke sarana kesehatan mengakibatkan beban pengeluaran baru.



8. Pola kesadaran untuk melakukan upaya deteksi dini terhadap kesehatan yang cenderung masih rendah sehingga cenderung untuk menyepelekan sakit yang diderita.
9. Masih minimnya keberadaan Rumah Sakit Swasta dan masih terdapat beberapa Rumah Sakit Swasta yang belum terakreditasi A, sehingga layanan rawat inap menumpuk di Rumah Sakit Pemerintah dan menyebabkan banyaknya pasien yang tidak terlayani.
10. Peran ganda wanita di tengah kehidupan saat ini mengakibatkan pemberian ASI menjadi tidak maksimal.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup:

1. Mempertahankan pengalokasian anggaran 10% untuk belanja langsung urusan kesehatan pada APBD Provinsi dan juga menjadi bahan dalam evaluasi RAPBD Kabupaten/Kota.
2. Melakukan program-program selektif sesuai dengan kewenangan Provinsi yang lebih diarahkan pada kegiatan promotif dan preventif dibandingkan dengan kegiatan kuratif.
3. Pelaksanaan akreditasi sarana pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas ke Rumah Sakit, dimana dengan pelaksanaan akreditasi tersebut maka harus dilakukan perbaikan terhadap sistem pelayanan, perbaikan dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dan ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
4. Peningkatan upaya-upaya kesehatan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan gerakan masyarakat sehat (Germas).
5. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
6. Melakukan peningkatan penjaminan kesehatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan peningkatan tata kelola organisasi kesehatan.



7. Meningkatkan cakupan layanan imunisasi kepada Balita sebagai bentuk upaya preventif sejak dini dan dengan mendukung secara maksimal Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN), Program Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Program Penguatan Kekebalan dengan Imunisasi Pentavalen serta Program Imunisasi Lanjutan.
8. Meningkatkan kemampuan Puskesmas sebagai pusat upaya kesehatan masyarakat sebagai bentuk upaya promotif dan preventif.
9. Meningkatkan pengawasan layanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Swasta.
10. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang telah ada dengan memberikan pelatihan secara kontinue dan konsisten.
11. Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat akan manfaat pemberian ASI serta mendorong setiap tempat bekerja untuk menyediakan ruang Laktasi.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat adalah sebesar Rp 581.463.492.669,- dan terealisasi Rp 502.554.927.755,68,- atau 86,43%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp 78.908.564.913,32,- (13,57%).

Anggaran tersebut tersebar pada 26 program sebagai berikut: Program Obat dan Pembekalan Kesehatan (7 kegiatan), Program Upaya Kesehatan Masyarakat (50 kegiatan), Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (6 kegiatan), Program Perbaikan Gizi Masyarakat (9 kegiatan), Program Pengembangan Lingkungan Sehat (8 kegiatan), Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular) (20 kegiatan), Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata (22 kegiatan), Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata (1 kegiatan), Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan (8 kegiatan), Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (6 kegiatan), Program Penanggulangan Kemiskinan (2 kegiatan), Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (5



kegiatan), Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba (1 kegiatan), Program Diversifikasi Pangan (5 kegiatan), Program Peningkatan Ketahanan Pangan (24 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi (1 kegiatan), Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak (2 kegiatan), Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (3 kegiatan), Program Pelayanan Kontrasepsi (3 kegiatan), Program Peningkatan Pengendalian Penduduk (6 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (7 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Keluarga (2 kegiatan), Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak (4 kegiatan), Program Peningkatan Perlindungan Perempuan (6 kegiatan), Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak (9 kegiatan) dan Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak (4 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Capaian indikator kinerja sebesar 99,59% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 86,43% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



MISI 4 MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KERAKYATAN YANG TANGGUH, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING REGIONAL DAN GLOBAL DENGAN MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Misi keempat RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan”. Untuk mewujudkan misi tersebut telah ditetapkan 1 tujuan yaitu meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 4.1: Meningkatkan Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi serta Daya Saing Daerah

Tujuan pertama misi 4 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah **Meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah.** Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah dapat diketahui melalui laju pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Pencapaian kedua indikator kinerja tujuan tersebut dapat dilihat dari realisasi dan capaian indikator kinerja pada tabel 3.3.31.

Tabel 3.3 31 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 4.1

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,78	5,14	88,93	5,29
2	Indeks Gini	0,329	0,305	107,29	0,33

Uraian masing-masing indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 ditargetkan 5,78% atau meningkat sebesar 0,49% dibandingkan realisasi tahun 2017 (5,29%).

Dari tabel 3.3.31 dapat dilihat indikator kinerja tujuan laju pertumbuhan ekonomi target 5,78% terealisasi 5,14% dengan tingkat capaian 88,93% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi laju pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th. XXII tanggal 6 Februari 2019 tentang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat Tahun 2018. Laju pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat dari sisi lapangan usaha dan dari sisi pengeluaran, yang diuraikan sebagai berikut:

**a. Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha**

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi (8,57%), diikuti oleh Penyediaan akomodasi dan makan minum (8,23%) dan jasa lainnya sebesar 7,86%. Untuk lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan sebesar (-0,57). Pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha tergambar pada tabel 3.3.32.

Tabel 3.3 32 Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 (%)

No.	Lapangan Usaha	Trw IV-2018 terhadap Trw IV-2017	Laju Pertumbuhan 2018	Sumber Pertumbuhan 2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.	4,42	3,46	0,79
2	Pertambangan dan Penggalian	8,21	5,79	0,24
3	Industri Pengolahan	-2,91	-0,57	-0,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	4,09	0,00
5	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,48	2,24	0,00
6	Konstruksi	8,26	7,04	0,64
7	Perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	8,36	7,03	1,09
8	Transportasi dan Pergudangan	7,22	6,47	0,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,25	8,23	0,09
10	Informasi dan Komunikasi	8,82	8,57	0,59
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,57	0,99	0,03
12	Real Estate	6,24	4,67	0,09
13	Jasa Perusahaan	7,18	5,45	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,31	5,97	0,33
15	Jasa Pendidikan	7,39	7,19	0,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,63	7,28	0,10
17	Jasa Lainnya	7,86	7,86	0,13
Total Pertumbuhan		5,50	5,14	5,14

Sumber data: Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th. XXII tanggal 6 Februari 2019

b. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi LNPR (6,54%) diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (4,7%) dan pengeluaran konsumsi pemerintah (4,63%). Untuk net ekspor antar daerah mengalami penurunan yang tinggi yaitu sebesar -127,49%. Pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tergambar pada tabel 3.3.33.



Tabel 3.3 33 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Pengeluaran Tahun 2018 (%)

No.	Komponen Pengeluaran	Trw IV-2018 terhadap Trw IV-2017	Laju Pertumbuhan 2018	Sumber Pertumbuhan 2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,34	4,7	2,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	7,86	6,54	0,07
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,04	4,63	0,53
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	4,28	3,29	0,97
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Luar Negeri	-29,98	-14,05	-1,91
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	5,34	0,51	0,02
8	Net Ekspor Antar Daerah	-97,51	-127,49	3,16
	Total Pertumbuhan	5,5	5,14	5,14

Sumber data: Berita Resmi Statistik Nomor 12/02/13/Th. XXII tanggal 6 Februari 2019

2. Indeks Gini

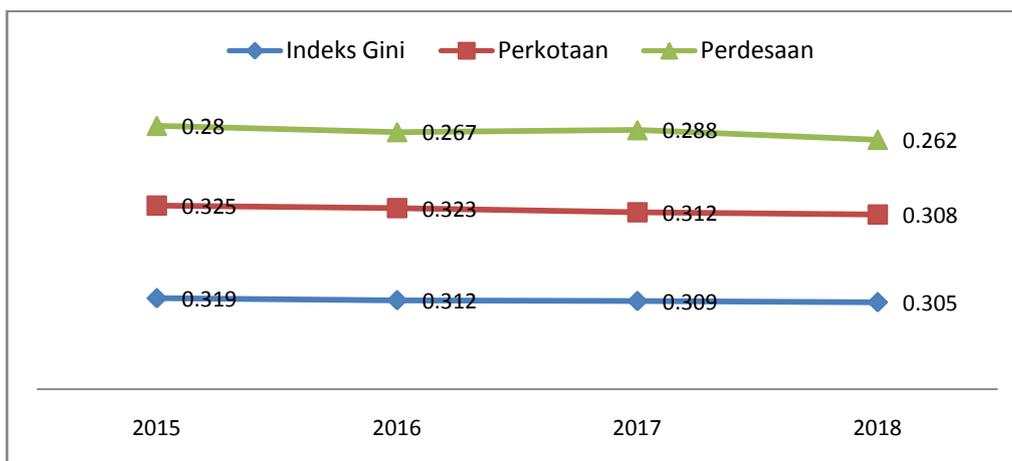
Indeks gini (rasio gini) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat. Sehingga semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik atau semakin minim ketimpangan ekonomi penduduk Sumatera Barat. Oleh karena itu, indeks gini tahun 2018 ditargetkan 0,329 atau menurun 0,001 dari indeks gini 2017 (0,33).

Dari tabel 3.3.31 dapat dilihat indikator kinerja tujuan indeks gini target 0,329% terealisasi 0,305% dengan tingkat capaian 107,29% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indeks gini diukur berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik Nomor 06/01/13/Th. XXII tanggal 15 Januari 2019 tentang tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat September 2018. Perkembangan indeks gini Sumatera Barat tahun 2015-2018 tergambar pada grafik 3.16.



Grafik 3. 16 Indeks Gini Sumatera Barat tahun 2015-2018



Sumber data: Berita Resmi Statistik 06/01/13/Th. XXII tanggal 15 Januari 2019

Berdasarkan grafik 3.16 diketahui bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Barat dari tahun 2015-2018 menunjukkan tren menurun dengan rata-rata penurunan pertahun sebesar 0,0047. Berdasarkan daerah tempat tinggal, indeks gini di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini berarti tingkat ketimpangan di area perkotaan selalu di atas area perdesaan.

Berdasarkan realisasi 2 indikator tujuan 4.1 yang tercantum pada tabel 3.3.31 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pertama misi 4 belum tercapai dengan maksimal. Hal ini dikarenakan oleh:

1. Tidak tercapainya target indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 5,78%. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,14%, tumbuh melambat dibandingkan tahun 2017 dengan laju pertumbuhan sebesar 5,29%. Sumber utama perlambatan ekonomi berasal dari tren menurunnya pertumbuhan investasi swasta sejak tahun lalu dan maraknya penerapan proteksionisme perdagangan internasional yang berdampak pada kinerja ekspor secara keseluruhan serta terjadinya penurunan beberapa lapangan usaha seperti pertanian, industri pengolahan dan transportasi.



2. Sementara itu, indikator kinerja indeks gini pada tahun 2018 mengalami perbaikan yaitu 0,33 pada tahun 2017 menjadi 0,305 pada tahun 2018. Hal ini berarti pemerataan distribusi ekonomi di Sumatera Barat telah terjaga dengan baik, karena semakin kecil angka rasio gini maka akan semakin baik atau semakin minim ketimpangan ekonomi penduduk Sumatera Barat.

Kendati tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah belum tercapai secara maksimal, tetapi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap mengupayakan untuk mencapai tujuan tersebut. Peningkatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing didukung oleh:

1. Meningkatnya pendapatan perkapita sebesar 2,51 juta rupiah di tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah pendapatan perkapita di tahun 2017 (40,32 juta rupiah).
2. Meningkatnya investasi daerah sebesar Rp. 609.903.600.000 di tahun 2018 dibandingkan dengan jumlah investasi di tahun 2017 (Rp. 4.122.261.980.000)

Untuk mencapai tujuan meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah, telah ditetapkan 4 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 34 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah Pendapatan per kapita (Rp Juta)	42,7	42,83	100,30

Jumlah pendapatan per Kapita berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah. Jumlah pendapatan perkapita



diharapkan meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, jumlah pendapatan perkapita tahun 2018 ditargetkan 42,7 juta rupiah atau meningkat sebesar 2,38 juta rupiah dari realisasi tahun 2017.

Dari tabel 3.3.34 dapat dilihat indikator kinerja jumlah pendapatan per kapita di Sumatera Barat pada tahun 2018 target 42,7 juta rupiah terealisasi 42,83 juta rupiah dengan tingkat capaian 100,30% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja jumlah pendapatan per kapita diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik No. 12/02/13/Th. XXII tanggal 6 Februari 2019. Perhitungan kinerja jumlah pendapatan per Kapita adalah dengan membagi nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun.

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah pendapatan per kapita tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.35.

Tabel 3.3 35 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja jumlah pendapatan per kapita

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Jumlah pendapatan perkapita (juta rupiah)	42,83	40,32	100,3	104,24	48,91

Dari tabel 3.3.35 diketahui bahwa jumlah pendapatan perkapita di tahun 2018 adalah 42,83 juta rupiah atau meningkat 2,51 juta rupiah dibandingkan dengan jumlah pendapatan perkapita di tahun 2017. Capaian indikator kinerja jumlah pendapatan perkapita tahun 2017-2018 menunjukkan nilai > 100% yang berarti

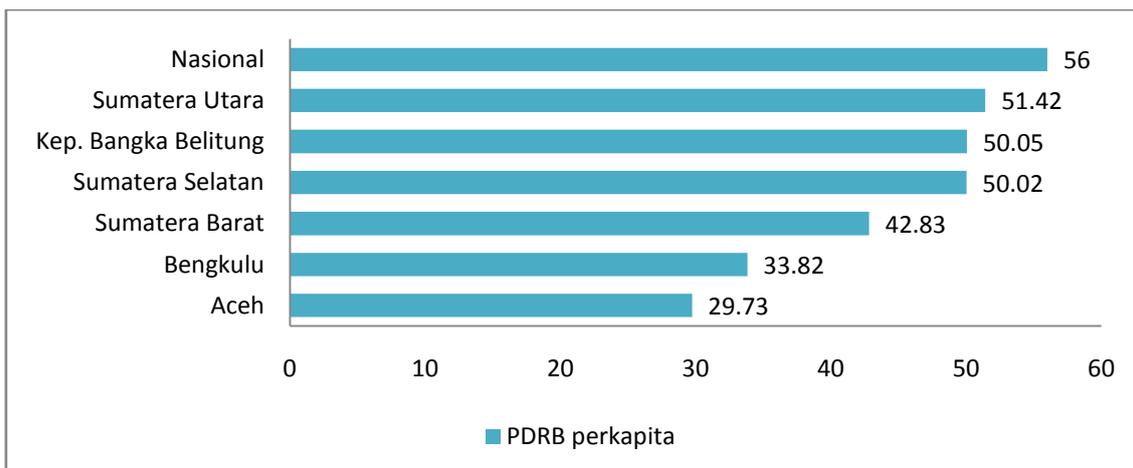


realisasi indikator kinerja ini tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Capaian tahun 2017 dibandingkan dengan capaian tahun 2018 menunjukkan tren menurun 3,94%.

Jumlah pendapatan perkapita tahun 2018 sebesar 42,83 juta rupiah menunjukkan pencapaian 87,57% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, jumlah pendapatan perkapita ditargetkan 48,91 juta rupiah atau meningkat sebesar 6,08 juta rupiah dari realisasi di tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan 2,15 juta per tahun. Dengan upaya yang optimal dan pemanfaatan sumber daya yang ada maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional 6 provinsi di Pulau Sumatera, tampak bahwa Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke empat di atas Bengkulu dan Aceh. Jika dibandingkan dengan nasional nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat masih berada di bawah PDRB perkapita nasional dengan gap/selisih 13,17 juta rupiah. Perbandingan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional tergambar pada grafik 3.17.

Grafik 3. 17 PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera dan Nasional Tahun 2018 (Juta Rupiah)



Sumber data: Berita Resmi Statistik



Sumber penopang meningkatnya jumlah pendapatan perkapita terutama berasal dari perbaikan kinerja beberapa lapangan usaha seperti terjadinya penguatan pada lapangan usaha transportasi dan penyediaan akomodasi sebagai dampak tingginya masyarakat yang menikmati liburan ke Sumatera Barat serta meningkatnya permintaan pemenuhan souvenir kampanye pemilu.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat adalah sebesar Rp 160.703.493.023,- dan terealisasi Rp 150.870.959.259,- atau 93,88%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 9.832.533.764,- (6,12%).

Anggaran tersebut tersebar pada 24 program sebagai berikut: Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis (13 kegiatan), Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas (57 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana (12 kegiatan), Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil (25 kegiatan), Program Pengembangan Ekonomi Maritim (13 kegiatan), Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (15 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM (50 kegiatan), Program Pengamanan Sumber Daya Hewani (10 kegiatan), Program Pembedayaan Penyuluhan (4 kegiatan), Program Peningkatan SDM Pertanian (1 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian (1 kegiatan), Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (9 kegiatan), Program Pengembangan Ekonomi Kreatif (7 kegiatan), Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (8 kegiatan), Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata (4 kegiatan), Program Peningkatan Perlindungan Konsumen (4 kegiatan), Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri (9 kegiatan), Program Pengembangan Kewilayahan Industri (9 kegiatan), Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (11 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (1 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (27 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi (9



kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM (20 kegiatan), Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal (5 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya jumlah pendapatan masyarakat. Capaian indikator kinerja sebesar 100,30% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 93,88% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 36 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase pertumbuhan investasi	4,1	14,80	360,98

Dari tabel 3.3.36 dapat dilihat indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi di Sumatera Barat pada tahun 2018 dengan target 4,1% terealisasi 14,80% dengan tingkat capaian 360,98% termasuk kategori memuaskan.

Realisasi indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi diukur berdasarkan data investasi BKPM dan PPT Provinsi Sumatera Barat dari 206 proyek yang terdiri dari 74 proyek PMA dengan nilai investasinya sebesar US\$ (ribu) 180.799,70 atau (Rp. 2,422,715,980,000,-) dan 132 proyek PMDN dengan nilai investasi sebesar Rp. 2.309.449,60 juta. Secara total realisasi investasi PMA dan PMDN tahun 2018 sebesar Rp. 4.732.165.580.000,00 (Empat triliun tujuh ratus tiga puluh dua milyar seratus enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh rupiah) meningkat dibandingkan realisasi investasi tahun 2017 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14,80%. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:



$$\text{Persentase pertumbuhan investasi} = \frac{\text{Rp. } 4.732.165.580.000 - 4.122.261.980.000}{4.122.261.980.000} \times 100 = 14,80\%$$

Ket: Realisasi Investasi Tahun 2018 sebesar Rp. 4.732.165.580.000,-
Realisasi Investasi Tahun 2017 sebesar Rp. 4.122.261.980.000,-

Realisasi investasi PMA dan PMDN berdasarkan sektor usaha dapat dilihat pada tabel 3.3.37.

Tabel 3.3 37 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2018

No	Sektor Usaha Menurut Perka No 17 Tahun 2015 BKPM RI	Investasi PMA		Investasi PMDN	
		US \$ (Ribu)	%	Juta Rupiah	%
SEKTOR PRIMER					
1	Tanaman Pangan dan Perkebunan	34.251,00	18,94	315.946,80	13,68
2	Peternakan	-	-	-	-
3	Kehutanan	18,70	0,01	-	-
4	Perikanan	-	-	-	-
5	Pertambangan	51.781,10	28,64	5.430,00	0,24
Jumlah Sektor Primer		86.050,80		321.376,80	
SEKTOR SEKUNDER					
6	Industri Makanan	40.649,20	22,48	379.441,60	16,43
7	Industri Tekstil	-	-	-	-
8	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	-	-	13.892,60	0,60
9	Industri Kayu	41,30	0,02	20,00	0,00
10	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-
11	Industri Kimia dan Farmasi	9.933,40	-	300,20	0,01
12	Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-
13	Industri Mineral Non Logam	-	-	223.034,10	9,66
14	Industri Logam. Mesin dan Elektronika	175,00	-	161.421,10	6,99
15	Industri Instrumen Kedokteran. Presisi. Optik dan Jam	-	-	-	-
16	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya	-	-	-	-
17	Industri Lainnya.	-	-	-	-
Jumlah Sektor Sekunder		50.798,90		778.109,60	
SEKTOR TERSIER					
18	Listrik. Gas dan Air	6.996,90	3,87	912.484,40	39,51
19	Konstruksi	-	-	35.255,00	1,53
20	Perdagangan dan Reparasi	-	-	27.694,50	1,20
21	Hotel dan Restoran	21.470,50	11,88	101.342,00	4,39
22	Transportasi. Gudang dan Komunikasi	6.143,70	3,40	3.323,00	0,14
23	Perumahan. Kawasan Industri dan Perkantoran	1.148,60	0,64	42.159,10	1,83
24	Jasa Lainnya	8.190,30	4,53	87.705,20	3,80
Jumlah Sektor Tersier		43.950,00		1.209.963,2	
TOTAL		180.799,70		2.309.449,60	

Ket: 1 US \$ = Rp. 13.400,- Total PMA Rp. 2,422,715,980,000,-



Dari tabel 3.3.37 diketahui bahwa:

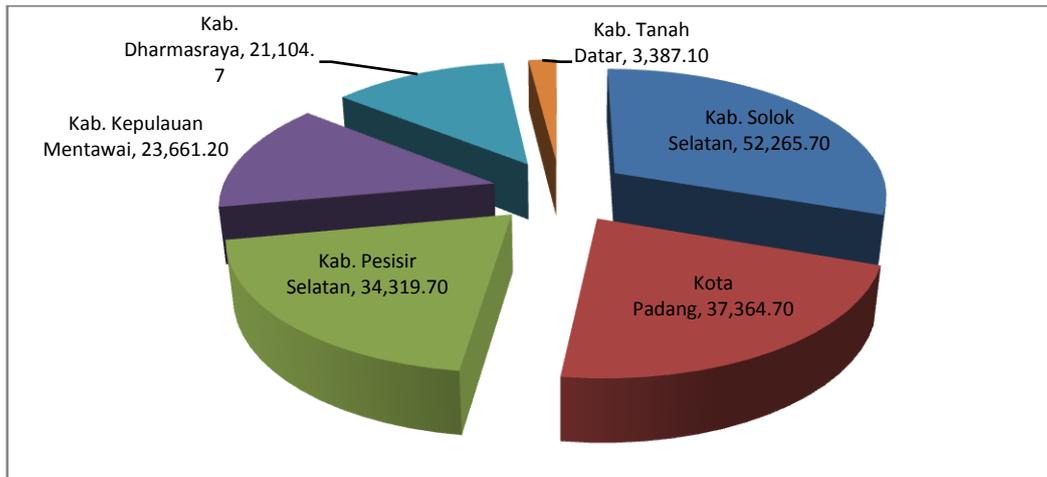
1. Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha pada tahun 2018 didominasi oleh sektor Pertambangan dengan realisasi sebesar US \$ 51.781,10 ribu (28,64%), sektor Industri Makanan dengan realisasi sebesar sebesar US \$ 40.649,20 (22,48%), sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan realisasi investasi sebesar US \$ 34.251,00 (18,94%), sektor Hotel dan Restoran dengan realisasi sebesar US \$ 21.470,50 (11,87%), sektor Industri Kimia dan Farmasi dengan realisasi sebesar US \$ 9.933,40 (5,49%), sektor Jasa Lainnya dengan realisasi investasi sebesar US \$ 8.190,30 (4,53%).
2. Realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha didominasi oleh sektor Listrik, Gas dan Air sebesar 39,51% (Rp. 912.484,10 juta), Industri Makanan sebesar 16,43% (Rp. 379.441,60 juta), Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar 13,68% (Rp. 315.946,80 juta), Industri Mineral Non Logam sebesar 9,66% (Rp. 223.034,10 juta) dan Industri Logam, Mesin dan Elektronika sebesar 6,99% (Rp. 161.421,10 juta) serta Hotel dan Restoran sebesar 4,39% (Rp. 101.342,00 juta).

Berdasarkan lokasi, penyebaran investasi PMA dan PMDN diuraikan sebagai berikut:

1. Penyebaran realisasi investasi PMA di Sumatera Barat 6 besar kabupaten/kota berada di Kab. Solok Selatan dengan kontribusi terhadap realisasi investasi PMA sebesar 28,91% (US \$ 52.265,70 ribu). Kemudian secara berurutan Kota Padang terhadap realisasi investasi PMA sebesar 20,67% (US \$ 37.364,70 ribu), Kab. Pesisir Selatan realisasi investasi PMA sebesar 18,98% (US \$ 34.319,70 ribu), Kab. Kepulauan Mentawai realisasi investasi PMA sebesar 13,09% (US \$ 23.661,20 ribu), Kab. Dharmasraya realisasi investasi PMA sebesar 11,67% (US \$ 21.104,70 ribu), Kab. Tanah Datar realisasi investasi sebesar 1,87% (US \$ 3.387,10), sebagaimana tampak pada grafik 3.18.



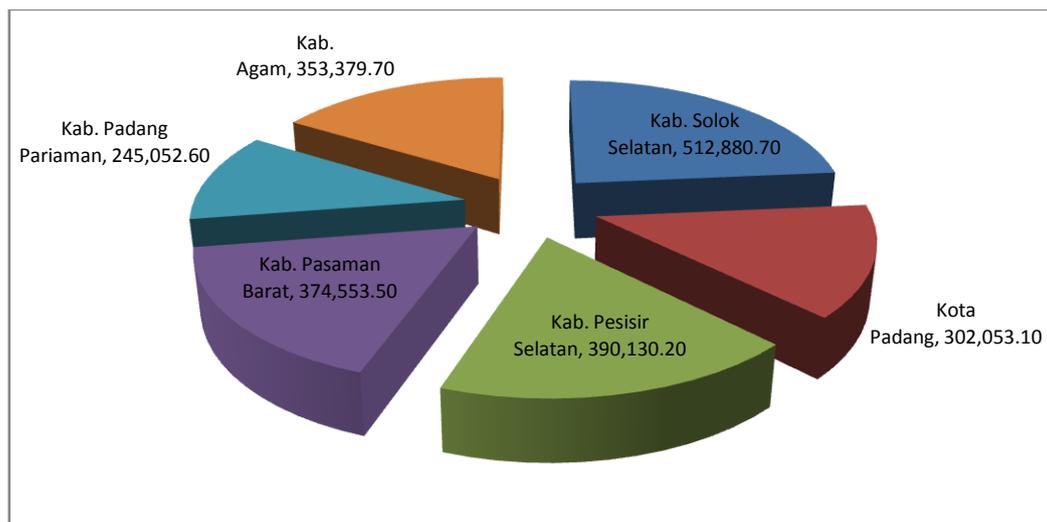
Grafik 3. 18 Penyebaran Realisasi PMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam Ribu US \$)



Sumber data: Dinas PMPTSP

2. Penyebaran realisasi investasi PMDN terbesar berada di Kab. Solok Selatan sebesar 22,21% (Rp. 512.880,70 Juta). Kemudian disusul secara berurutan oleh Pesisir Selatan sebesar 16,89% (Rp. 390.130,20 juta), Kab. Pasaman Barat sebesar 16,22% (Rp. 374.553,50 juta), Kab. Agam sebesar 15,30% (Rp.353.379,70 juta), Kota Padang sebesar 13,08% (Rp. 302.053,10 juta), Kab. Padang Pariaman sebesar 10,61% (Rp. 245.052,60 Juta) sebagaimana tergambar pada grafik 3.19.

Grafik 3. 19 Penyebaran Realisasi PMDN di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam Juta Rp.)

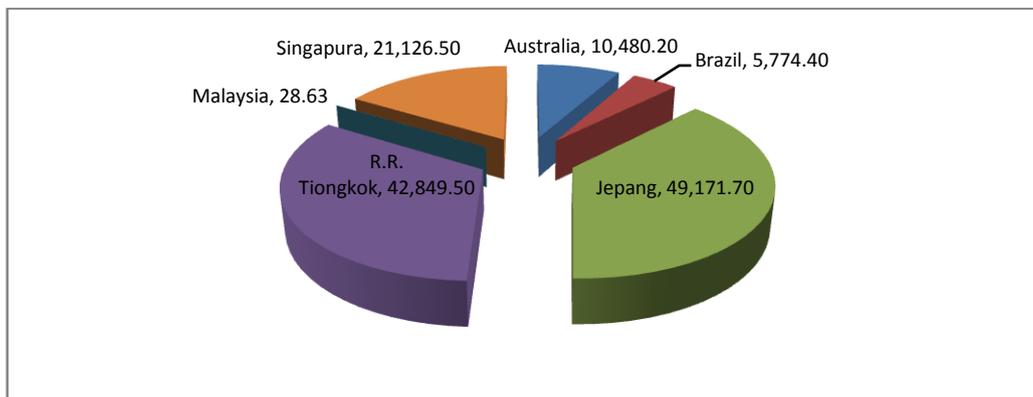


Sumber data: Dinas PMPTSP



Realisasi investasi PMA tahun 2018 berdasarkan asal negara (6 besar) adalah Negara Jepang dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 49.171,70 ribu (27,20%), Negara R.R. Tiongkok dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 42.849,50 ribu (23,70%), Negara Malaysia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 28.634,00 ribu (15,84%), Negara Singapura dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 21.126,50 ribu (11,66%), Negara Australia dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 10.480,20 ribu (5,80%), dan Negara Brazil dengan jumlah realisasi investasi sebesar US \$ 5.774,40 ribu (3,19%), sebagaimana tergambar pada grafik 3.20.

Grafik 3. 20 Realisasi PMA Berdasarkan Asal Negara Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 (dalam US \$ ribu)



Sumber data: Dinas PMPTSP

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.38.

Tabel 3.3 38 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja persentase peningkatan investasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Persentase peningkatan investasi	14,80	(15,42)	360,98		3,03



Dari tabel 3.3.38 diketahui bahwa pertumbuhan investasi di tahun 2018 adalah 14,80% atau secara absolut meningkat sebesar Rp. 609.903.600.000 dibandingkan dengan jumlah investasi di tahun 2017. Ini berarti, pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah memiliki komitmen yang tinggi dalam menggerakkan para investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Sumatera Barat. Capaian indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi tahun 2018 menunjukkan nilai > 100% yang berarti realisasi indikator kinerja ini tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, untuk capaian indikator tahun 2018 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 sebagai bentuk penyempurnaan dari indikator kinerja tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2021, persentase peningkatan investasi ditargetkan 3,03. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Masih membaiknya kondisi investasi di Sumatera Barat selama tahun 2018 disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Semakin tingginya komitmen pemerintah Sumatera Barat dalam meningkatkan promosi investasi ke mancanegara.
2. Perbaikan permintaan global yang menyebabkan pelaku usaha berorientasi ekspor untuk meningkatkan investasi di Sumatera Barat khususnya untuk pembelian mesin.

Untuk meningkatkan investasi di Sumatera Barat di tahun yang akan datang Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan infrastruktur berupa penyediaan dan perbaikan jalan, jaringan komunikasi dan ketersediaan energi.
2. Mendorong kinerja pariwisata di berbagai daerah.



3. Mensinergikan kebijakan dan program pengembangan investasi sesuai dengan sektor/subsektor dan komoditas yang berdaya saing tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menekan *high cost economy* yang terjadi karena retribusi atau pungutan-pungutan liar yang meberatkan investor.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi daerah adalah sebesar Rp 11.427.552.866,- dan terealisasi Rp 11.124.903.828,- atau 97,35%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 302.649.038,- (2,65%).

Anggaran tersebut tersebar pada 3 program sebagai berikut: Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi (17 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu (10 kegiatan) dan Program Kerjasama Pembangunan (11 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan investasi daerah. Capaian indikator kinerja sebesar 360,98% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 97,35% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan nilai ekspor dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 39 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Peningkatan nilai ekspor (%)	2	-22,05	-1102,5



Nilai ekspor Sumatera Barat diharapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, di tahun 2018 nilai ekspor ditargetkan meningkat sebesar 2% dari realisasi nilai ekspor tahun 2017.

Dari tabel 3.3.39 dapat dilihat indikator kinerja peningkatan nilai ekspor dengan target 2% terealisasi -22,05% dengan tingkat capaian -1102,5% termasuk kategori kurang baik.

Realisasi indikator kinerja peningkatan nilai ekspor diukur berdasarkan hasil pengukuran oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Resmi Statistik No. 04/01/13/Th.XXII, 15 Januari 2019. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Peningkatan Nilai Ekspor} = \frac{1.595,01 - 2.046,27}{2.046,27} \times 100\% = (22,05)\%$$

Ket = Nilai Ekspor Tahun 2018 sebesar US\$ 1.595,01 juta
 Nilai Ekspor Tahun 2017 sebesar US\$ 2.046,27 juta

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, nilai terbesar ekspor non migas Sumatera Barat adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1.136,22 juta, diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 290,43 juta. Data selengkapnya tergambar pada tabel 3.3.40.

Tabel 3.3 40 Ekspor Non Migas Sumatera Barat Berdasarkan Beberapa Golongan Barang Tahun 2016-2018

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US \$)			Perubahan Jan-Des 2018 terhadap 2017 (%)	Peran terhadap Total Jan-Des 2018 (%)
		Januari-Desember 2016	Januari-Desember 2017	Januari-Desember 2018		
1	Lemak & minyak hewan /Nabati	1,177.10	1,416.44	1,136.22	(19.78)	71.24
2	Karet dan Barang dari Karet	358.90	443.48	290.43	(34.51)	18.21
3	Garam, Belerang, Kapur	-	41.26	65.01	57.55	4.08
4	Berbagai Produk Kimia	-	38.06	29.90	(21.43)	1.87
5	Bahan-bahan Nabati	-	24.00	23.64	(1.47)	1.48
6	Lak, Getah dan Damar	-	0.03	0.16	366.84	0.01
7	Ikan dan Udang	-	0.25	0.26	2.01	0.02



No	Golongan Barang	Nilai FOB (Juta US \$)			Perubahan Jan-Des 2018 terhadap 2017 (%)	Peran terhadap Total Jan-Des 2018 (%)
		Januari- Desember 2016	Januari- Desember 2017	Januari- Desember 2018		
8	Daging dan Ikan Olahan	-	0.11	0.16	53.52	0.01
9	Buah-buahan	7.80	3.11	0.14	(95.43)	0.01
10	Perangkat Musik	-	0.51	-	(99.85)	-
	Total 10 Golongan Barang	1,543.80	1,967.25	1,545.94	(21.42)	96.92
	Lainnya	164.30	79.02	49.07	(37.90)	3.08
	Total Ekspor	1,708.10	2,046.27	1,595.01	(22.05)	100.00

Sumber data: Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sumbar No.10/02/13/Th. XXII, 1 Februari 2019

Berdasarkan tabel 3.3.40 diketahui bahwa peranan golongan barang yang terbesar terhadap total ekspor Sumatera Barat tahun 2018 adalah golongan lemak & minyak hewan/nabati sebesar US\$ 1.136,22 juta (71,24%), diikuti golongan karet dan barang dari karet sebesar US\$ 290,43 juta (18,21%) dan golongan garam, belerang, kapur sebesar US\$ 65,01 juta (4,08%). Dari sisi perubahan nilai ekspor tahun 2018 terhadap 2017, penurunan nilai yang paling besar terhadap total ekspor Sumatera Barat berasal dari golongan perangkat musik yang menurun sebesar 99,85%, golongan buah-buahan menurun sebesar 95,43%, golongan karet dan barang dari karet menurun sebesar 34,51%, golongan berbagai produk kimia menurun sebesar 21,43%.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, periode Januari-Desember 2018 ekspor non migas Sumatera Barat terbesar adalah ke negara India yaitu sebesar US\$ 438,85 juta, selanjutnya ke negara Amerika Serikat sebesar US\$ 393,07 juta, Bangladesh sebesar US\$ 131,56 juta dan Singapura sebesar US\$ 121,67 juta dengan persentase peran terhadap total ekspor Sumatera Barat sebagaimana tergambar pada tabel 3.3.41.

Tabel 3.3 41 Negara Tujuan Ekspor Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018

No	Golongan Barang	Nilai FOB (Ribu US \$)			Perubahan Jan-Des 2018 terhadap 2017 (%)	Peran terhadap Total Jan-Des 2018 (%)
		Januari- Desember 2016	Januari- Desember 2017	Januari- Desember 2018		
1	Amerika Serikat	460.48	460.48	393.07	(14.64)	24.64
2	Bangladesh	62.48	62.48	131.56	110.56	8.25
3	Pakistan	16.09	16.09	49.69	208.75	3.12
4	Singapura	219.27	219.27	121.67	(44.51)	7.63



No	Golongan Barang	Nilai FOB (Ribu US \$)			Perubahan Jan-Des 2018 terhadap 2017 (%)	Peran terhadap Total Jan-Des 2018 (%)
		Januari- Desember 2016	Januari- Desember 2017	Januari- Desember 2018		
5	India	758.02	758.02	438.85	(42.11)	27.51
6	Malaysia	40.92	40.92	55.35	35.28	3.47
7	Spanyol	77.26	77.26	78.33	1.38	4.91
8	Belanda	49.17	49.17	55.49	12.87	3.48
9	Srilanka	29.45	29.45	37.19	26.27	2.33
10	Myanmar	69.60	69.60	44.12	(36.60)	2.77
	Total 10 Negara	1,782.73	1,782.73	1,405.34	(21.17)	88.11
	Tujuan Lainnya	263.53	263.53	189.67	(28.03)	11.89
	Total Ekspor	2,046.26	2,046.26	1,595.01	(22.05)	100.00

Sumber data: Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sumbar No.10/02/13/Th. XXII, 1 Februari 2019

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.42.

Tabel 3.3 42 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja peningkatan nilai ekspor

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Peningkatan nilai ekspor	-22,05	19,77	-1102,5	988,50	3

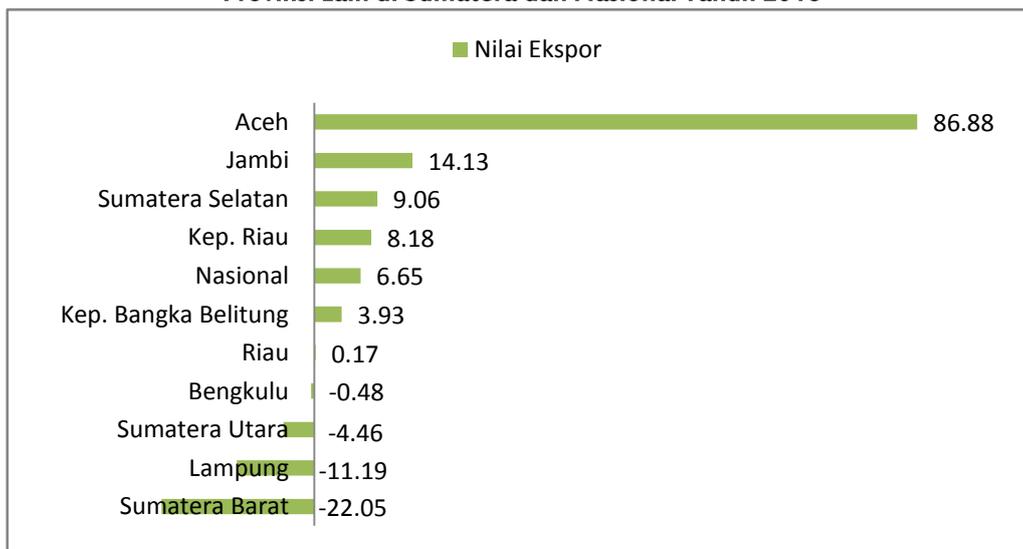
Dari tabel 3.3.42 diketahui bahwa nilai ekspor di tahun 2018 menurun sebesar 41,82% atau sebesar US \$ 451,26 dibandingkan dengan nilai ekspor di tahun 2017. Seiring dengan menurunnya nilai ekspor tahun 2017-2018, capaian indikator kinerja peningkatan nilai ekspor tahun 2017-2018 juga menunjukkan tren menurun sebesar 2.091% yang berarti bahwa realisasi yang dicapai belum mencapai target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2021, peningkatan nilai ekspor ditargetkan 3%. Dengan mempertimbangkan realisasi di tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat harus berupaya seoptimal mungkin agar dapat mencapai target tersebut.



Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera dan nasional, peningkatan nilai ekspor Sumatera Barat cenderung melambat. Provinsi di Pulau Sumatera yang menunjukkan peningkatan nilai ekspor yang sangat signifikan yaitu Provinsi Aceh sebesar 86,88%, Provinsi Jambi sebesar 14,13% dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 9,06%, sebagaimana tergambar pada grafik 3.21.

Grafik 3. 21 Perbandingan Peningkatan Nilai Ekspor di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2018



Sumber data: Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sumbar No.10/02/13/Th. XXII, 1 Februari 2019

Penurunan kinerja nilai ekspor Sumatera Barat selama periode Januari - Desember 2018 ini disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Berkurangnya produktivitas tanaman perkebunan karena umur yang sudah tua tanpa diiringi dengan penanaman kebun baru.
2. Turunnya harga komoditas dunia, terutama untuk komoditas utama ekspor Sumbar, yakni *Crude Palm Oil* (CPO) dan karet yang disebabkan oleh melimpahnya stok CPO dari Malaysia karena pembebasan pajak ekspor CPO di negara tersebut.
3. Banyaknya restriksi perdagangan internasional, seperti kampanye negatif produk CPO di Eropa serta penerapan pajak impor CPO menjadi 44% di India.
4. Dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang mengemuka dari awal tahun juga menyebabkan menurunnya permintaan dari negara-negara tujuan ekspor.



5. Mayoritas produk ekspor komoditas Sumbar masih bertumpu pada *primary product* dan teknologi yang digunakanpun tidak terlalu canggih sehingga memiliki nilai tambah yang rendah.

Untuk mencapai target kinerja peningkatan nilai ekspor dengan yang diharapkan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemudahan berusaha perdagangan luar negeri melalui peningkatan pemanfaatan fasilitas layanan perdagangan luar negeri dan peningkatan kompetensi calon eksportir dan eksportir;
2. Meningkatkan standar dan mutu produk ekspor, melalui peningkatan pengawasan terhadap komoditi ekspor, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengujian produk ekspor dan peningkatan kompetensi SDM Labor penguji;
3. Melakukan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara non tradisional, melalui kegiatan-kegiatan promosi (pameran/misi dagang) untuk memperkenalkan produk-produk potensial Sumatera Barat.
4. Hilirisasi komditi utama Sumatera Barat, melalui penumbuhan dan pengembangan IKM yang mengolah komoditi potensial daerah Sumatera Barat, fasilitasi penumbuhan kawasan dan sentra industri untuk pengolahan komoditi utama. Hilirisasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi sehingga diharapkan komoditi primer petani juga akan meningkat. Upaya ini didukung dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya nilai ekspor adalah sebesar Rp 5.415.955.580,- dan terealisasi Rp 3.984.583.281,- atau



73,57%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.431.372.299,- (26,43%).

Anggaran tersebut tersebar pada 1 program sebagai berikut: Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri (6 kegiatan).

Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah, begitupun dengan kegiatan-kegiatan pada program tersebut. Berdasarkan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis ini sebesar (1.102,50)% lebih rendah dari realisasi anggarannya sebesar 73,57% yang menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ternyata belum optimal untuk mencapai sasaran. Untuk itu, kegiatan yang diusulkan di tahun yang akan datang akan lebih disinkronkan dengan program dan sasaran yang ingin dicapai.



Gambaran pencapaian sasaran Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 43 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 4.1.4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Tingkat Kemiskinan	6,48	6,55	98,92
2. Tingkat Pengangguran	6,25	5,55	111,2
Rata-rata capaian			105,06

Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran adalah sebesar 105,06% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:



Tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Barat ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tingkat kemiskinan di tahun 2018 ditargetkan 6,48% atau turun sebesar 0,27% dari tingkat kemiskinan tahun 2017 (6,75%).

Dari tabel 3.3.43 dapat dilihat indikator kinerja tingkat kemiskinan target 6,48 terealisasi 6,55 dengan tingkat capaian 98,92% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data BPS yang diterbitkan melalui Berita Resmi Statistik Nomor 05/01/13/Th XXII tanggal 15 Januari 2019. Untuk mengukur tingkat kemiskinan, konsep yang digunakan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin pada September 2018 adalah Rp.485.633,- (Kapita/bulan). Persentase Penduduk miskin kondisi September 2018 mencapai 6,55%, dengan jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mencapai 353,24 ribu orang, berkurang 6,75 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 359,99 ribu orang (6,75%).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Karena, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Berikut disajikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Penduduk Miskin di Sumatera Barat pada tabel 3.3.44.



Tabel 3.3 44 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2016-2018

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
P1			
September 2016	1,038	1,180	1,122
September 2017	0,599	1,275	0,990
September 2018	0,884	1,025	0,959
P2			
September 2016	0,249	0,299	0,278
September 2017	0,107	0,324	0,233
September 2018	0,212	0,214	0,213

Sumber data: Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Sumbar 05/01/13/Th XXII tanggal 15 Januari 2019

Berdasarkan tabel 3.3.44, secara total baik indeks Kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan dari tahun 2016 sampai 2018 selalu menurun. Dilihat berdasarkan daerah, indeks kedalaman kemiskinan (P1) di daerah perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Namun untuk daerah Perkotaan P1 di September 2018 mengalami kenaikan dibandingkan September 2017 dari 0,599 menjadi 0,884, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan dari 1,275 di September 2017 menjadi 1,025 di September 2018. Kondisi yang hampir sama untuk Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), pada daerah Perkotaan juga lebih rendah dibandingkan dengan Perdesaan. Namun pada September 2018, P2 di perkotaan mengalami kenaikan dibanding September 2017, dari 0,107 menjadi 0,212. Berbeda dengan di perdesaan, P2 menurun dari 0,324 di September 2017 menjadi 0,214 di September 2018.

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria kedua*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.45

Tabel 3.3 45 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja tingkat kemiskinan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target 2021
		2018	2017	2018	2017	
1	Tingkat kemiskinan	6,55	6,75	98,92	90,24	5,09



Dari tabel 3.3.45 diketahui bahwa tingkat kemiskinan di tahun 2018 menurun sebesar 0,2 dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di tahun 2017. Hal ini berarti, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang tergolong miskin mengalami penurunan. Untuk capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2017-2018 menunjukkan nilai <100% yang artinya realisasi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tingkat kemiskinan tahun 2017, capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 8,68%.

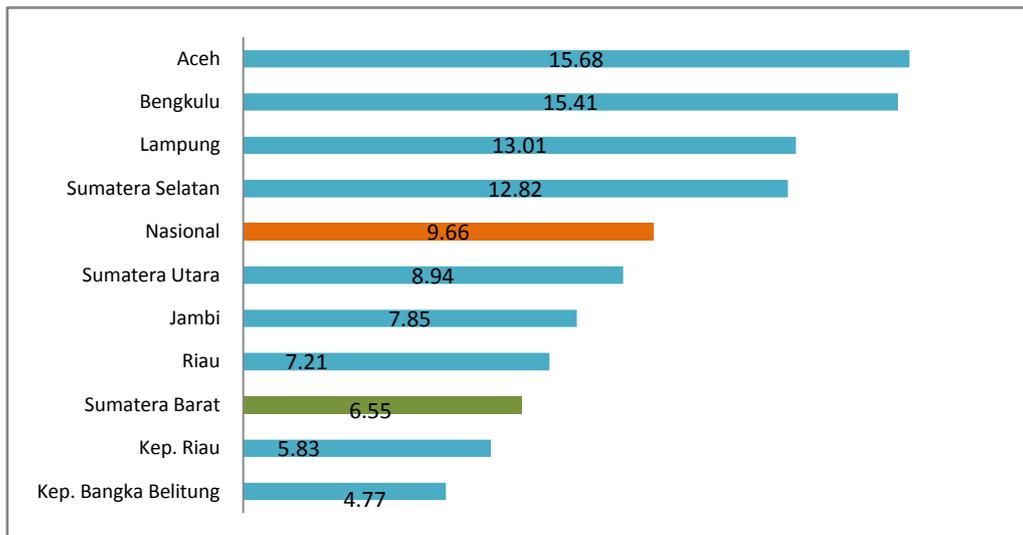
Tingkat kemiskinan Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 6,55 menunjukkan pencapaian 71,32% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, tingkat kemiskinan ditargetkan 5,09 atau menurun sebesar 1,46 dari realisasi di tahun 2018 dengan rata-rata penurunan 0,49 per tahun. Dengan upaya yang optimal dan pemanfaatan sumber daya yang ada maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, tingkat kemiskinan Sumatera Barat berada di urutan ketiga setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Tingkat kemiskinan tertinggi berada di Provinsi Aceh dan yang terendah berada di Kepulauan Bangka Belitung.

Tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan tingkat nasional dengan selisih sebesar 3,11. Perbandingan tingkat kemiskinan Sumatera Barat dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera dan Nasional tahun 2018 tergambar pada grafik 3.22.



Grafik 3. 22 Perbandingan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi Lain di Sumatera dan Nasional Tahun 2018



Sumber data: Berita Resmi Statistik (BRS) No.07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain:

1. Pendampingan terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Nagari/badan Usaha Milik Desa.
2. Fasilitasi penambahan permodalan bagi perkembangan BumNag.
3. Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui bimbingan keterampilan.
4. Pengembangan usaha melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Pesisir dan Kepulauan dengan mekanisme bantuan usaha ekonomis produktif (UEP).
5. Adanya kredit mikro nagari.
6. Meningkatkan kualitas koperasi dan UKM dengan cara meningkatkan nilai aset koperasi, omset koperasi dan koperasi aktif.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan adalah sebesar Rp 68.851.027.956,- dan terealisasi Rp 63.245.482.465,- atau 91.86%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 5.605.545.491,- (8,14%).



Anggaran tersebut tersebar pada 17 program sebagai berikut: Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (4 kegiatan), Program Pembinaan Anak Terlantar (13 kegiatan), Program Pembinaan Para Penyandang Dissabilitas dan Eks Trauma (9 kegiatan), Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia (7 kegiatan), Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya) (4 kegiatan), Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (17 kegiatan), Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya (17 kegiatan), Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial (7 kegiatan), Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba (3 kegiatan), Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (3 kegiatan), Program Penanggulangan Kemiskinan (11 kegiatan), Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari (11 kegiatan), Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha (3 kegiatan), Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (11 kegiatan), Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari (5 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari (2 kegiatan) dan Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial (7 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian indikator kinerja tingkat kemiskinan. Capaian indikator kinerja sebesar 98.92% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 91,86% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran penduduk Sumatera Barat ditargetkan menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di tahun 2018 ditargetkan 6,25%.



Dari tabel 3.3.43 dapat dilihat indikator kinerja tingkat pengangguran target 6,25% terealisasi 5,55% dengan tingkat capaian 111,2% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data BPS yang diterbitkan melalui Berita Resmi Statistik Nomor 64/11/13/Th XXII tanggal 5 November 2018. Jumlah angkatan kerja Agustus 2018 sebanyak 2,55 juta orang, naik 68,46 ribu orang dibanding agustus 2017. Perhitungan tingkat pengangguran sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{141.680}{2.552.130} \times 100 = 5,55\%$$

Ket = Jumlah Pengangguran (Agustus 2018) = 141.680 orang
 Jumlah Angkatan kerja tahun 2018 = 2.552.130 orang

Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada agustus 2018, sebanyak 2,41 juta orang penduduk bekerja sedangkan sebanyak 141,68 ribu orang menganggur. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 65,48 ribu orang dan pengangguran bertambah 2.980 orang. Naiknya jumlah angkatan kerja, diiringi dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK). TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 67,26%, naik sebesar 0,97 point dibanding Agustus 2017. Berikut disajikan Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tabel 3.3.46.

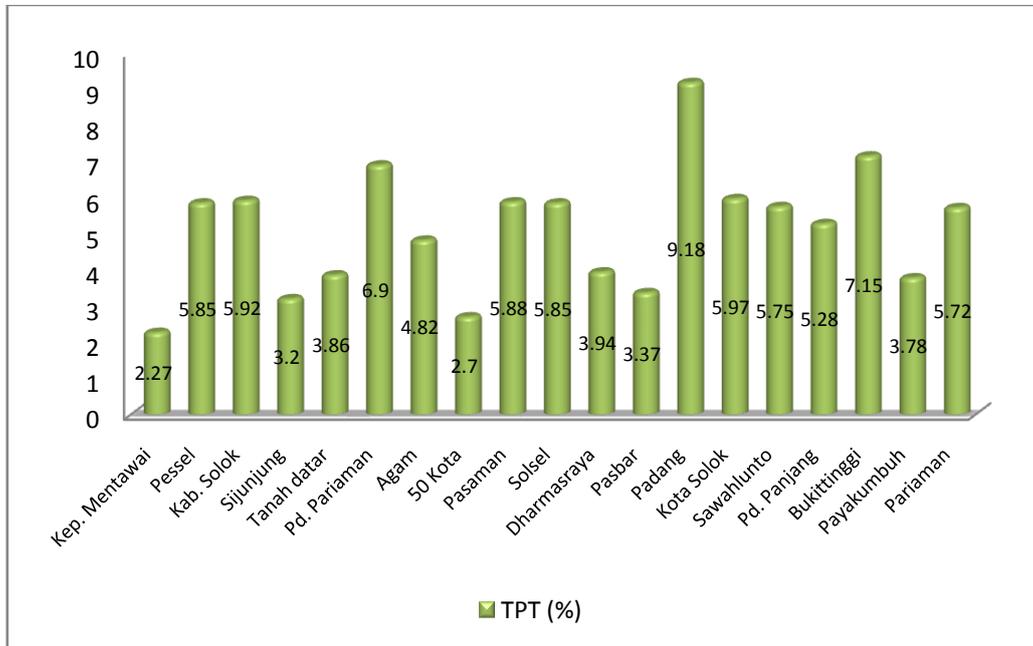
Tabel 3.3. 46 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Penduduk Sumatera Barat Agustus 2017 - Agustus 2018

Status Ketenagakerjaan	Agustus 2017	Agustus 2018
	(Ribu Orang)	
Penduduk Usia Kerja	3746,83	3794,40
Angkatan Kerja	2483,67	2552,13
Bekerja	2344,97	2410,45
Pengangguran	138,70	141,68
Bukan Angkatan Kerja	1263,16	1242,27
Sekolah	418,37	421,95
Mengurus RT	692,81	656,76
Lainnya	151,98	163,57
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,58	5,55
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,29	67,26



Tingkat pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Agustus 2018 dapat dilihat pada grafik 3.23.

Grafik 3. 23 Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2018



Sumber data: Berita Resmi Statistik Nomor 64/11/13/Th XXII tanggal 5 November 2018

Berdasarkan grafik 3.23 diketahui bahwa dari 19 kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat di Kota Padang yaitu sebesar 9,18%. Sedangkan TPT terendah berada di Kabupaten Kepulauan mentawai yaitu sebesar 2,27%. Sebanyak 9 kabupaten/Kota se Sumatera Barat memiliki TPT di bawah TPT Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota memiliki TPT di atas TPT Provinsi.

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria kedua*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.47



Tabel 3.3 47 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja tingkat pengangguran

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Tingkat pengangguran	5,55	5,58	111,2	113,62	5,6

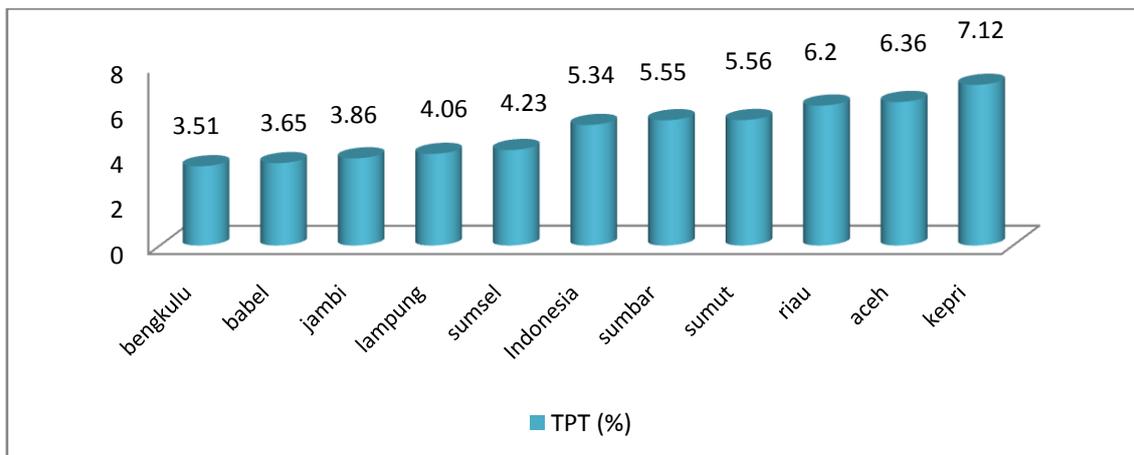
Berdasarkan tabel 3.3.47 diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,03% dibandingkan realisasi tahun 2017. Artinya, persentase penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk yang menganggur. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka tahun 2017-2018 >100% menunjukkan realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan. Akan tetapi, dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tingkat pengangguran tahun 2017, capaian kinerja tahun 2018 menunjukkan penurunan sebesar 2,42%.

Untuk tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan 5,6%, sedangkan realisasi tahun 2018 telah mencapai 5,55%, artinya kondisi tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sudah lebih baik dan melebihi target dibanding angka yang ditargetkan di tahun 2021. Oleh karena itu, target 2021 akan disempurnakan kembali.

Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Sumatera, TPT Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke enam. TPT terendah berada di Provinsi Bengkulu dan tertinggi berada pada Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran Nasional sebesar 5,34%, angka TPT Sumatera Barat masih berada 0,21% di atas angka TPT Nasional dan berada pada urutan 23 secara Nasional jika dibandingkan dengan Provinsi lain se Indonesia, sebagaimana tergambar pada grafik 3.24.



Grafik 3. 24 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018



Dalam menurunkan Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat Tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan upaya-upaya terkait ketenagakerjaan, antara lain :

1. Pengembangan dan penguatan kompetensi dengan mewujudkan Balai Latihan Kerja menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dan tempat uji kompetensi bertaraf internasional.
2. Mengembangkan dan menyempurnakan Kurikulum pelatihan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja di dalam negeri maupun luar negeri.
3. Bidang pelatihan dan dan penempatan tenaga kerja juga menjalankan fungsi penempatan lulusan di pasar kerja, yaitu mempertemukan lulusan dengan lowongan kerja melalui penyelenggaraan job fair.
4. Membentuk Kios 3 *in* 1 (pelatihan-sertifikasi-penempatan) guna meningkatkan partisipasi kalangan pendidikan dalam menciptakan tenaga kerja yang berkeahlian guna menekan pengangguran.
5. Mensosialisasikan dan mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan di Kabupaten/Kota untuk mendorong pelaksanaan program magang dalam negeri di Kabupaten/Kota. Kemudian melakukan Pembinaan program magang mandiri antar kabupaten/Kota se Sumatera Barat untuk



meningkatkan peluang tenaga kerja mendapatkan pembelajaran bekerja melalui program magang di perusahaan.

6. Mengintensifkan monitoring kepada binaan-binaan yang telah dilatih dan diberi bimbingan konsultasi produktivitas, agar dapat diberikan bimbingan perbaikan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi. Dengan demikian, tingkat produktivitas tenaga kerja maupun perusahaan dapat dipertahankan bahkan mengalami peningkatan secara konsisten.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P Tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya tingkat pengangguran terbuka adalah sebesar Rp.12.135.004.963,- dan terealisasi Rp.11.462.442.353,- atau 94,96 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 672.562.610,- (5,54%).

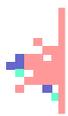
Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (12 Kegiatan), Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha (15 Kegiatan), Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (8 kegiatan), Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja (9 kegiatan), dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah (1 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian indikator kinerja tingkat pengangguran. Capaian indikator kinerja sebesar 111,2% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 94,97% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



MISI 5 MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Misi kelima RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”. Untuk mewujudkan misi ini perlu dilakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pemeliharaan lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 2 tujuan untuk mencapai misi kelima RPJMD tahun 2016-2021. Pencapaian tujuan dan evaluasi serta analisis pencapaiannya diuraikan sebagai berikut:



Tujuan 5.1: Meningkatkan Fungsi Infrastruktur untuk Pengembangan Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Tujuan pertama misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan tersebut telah ditetapkan 2 indikator kinerja yang realisasi dan capaiannya tergambar pada tabel 3.3.48.

Tabel 3.3 48 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.1

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100	38
2	Rasio Elektrifikasi (%)	93,63	93,83	100,21	89,41

Berdasarkan tabel 3.3.48 dapat diketahui:

1. Indikator kinerja tujuan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap target 36 ruas jalan terealisasi 36 ruas jalan dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.
2. Indikator kinerja tujuan rasio elektrifikasi target 93,63% terealisasi 93,83% dengan tingkat capaian 100,21% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.



Berdasarkan realisasi 2 indikator tujuan 5.1 yang tercantum pada tabel 3.3.48 tersebut dapat diketahui bahwa tujuan pertama misi 5 tercapai dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh:

1. Tahun 2018, sebanyak 36 ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar daerah sudah dalam kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi penurunan jumlah ruas jalan dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Akan tetapi, secara total jumlah jalan dalam kondisi mantap di tahun 2018 meningkat dari 15,383 Km menjadi 1099,033 Km dibandingkan dengan total jumlah jalan dalam kondisi mantap di tahun 2017.
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang berlistrik di tahun 2018 yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi Provinsi Sumatera Barat sebesar 4,42% di tahun 2018. Secara absolut jumlah rumah tangga yang berlistrik di tahun 2018 sebanyak 1.202.389 RT atau meningkat 69.617 RT dibandingkan tahun 2017.

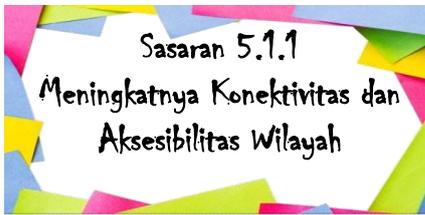
Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai meningkatnya fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah antara lain:

1. Pembangunan jalan pada 19 ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten/kota se Sumatera Barat dan pembangunan jembatan di 2 wilayah.
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada 16 ruas jalan dan jembatan Provinsi.
3. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 2 unit yaitu di Kabupaten Solok dan di Kabupaten Pasaman
4. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 70 unit (35 unit di Kabupaten Pasaman. 15 unit di Kabupaten Pesisir Selatan dan 20 unit di Kabupaten Solok.
5. Memantau pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.

Untuk mencapai tujuan Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah telah ditetapkan 4 sasaran strategis.



Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian keempat sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 49 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100

Jumlah ruas jalan Provinsi Sumatera Barat ada 58 ruas jalan. Untuk mendukung koneksi antar daerah maka ruas jalan yang ada harusnya dalam kondisi mantap. Berdasarkan hal tersebut, ruas jalan dalam kondisi mantap > 72% diharapkan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi, penetapan target juga mempertimbangkan anggaran yang tersedia untuk pemeliharaan ruas jalan. Oleh karena itu, untuk tahun 2018 jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 36 ruas jalan menurun sebanyak 2 ruas jalan dibandingkan dengan kondisi ruas jalan kondisi mantap di tahun 2017.

Dari tabel 3.3.49 dapat dilihat indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap target 36 ruas jalan terealisasi 36 ruas jalan dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dari jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatra Barat dengan kondisi mantap $\geq 72\%$ berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dari 58 ruas jalan Provinsi Sumatera Barat yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebanyak 36 ruas jalan



terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$. Ruas jalan Provinsi tahun 2018 dalam kondisi mantap $\geq 72\%$ diuraikan pada tabel 3.3.50.

Tabel 3.3 50 Ruas jalan Provinsi Tahun 2018

No	Nama ruas	Kemantapan Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		(Km)	%	(Km)	%
1	Simancung - Tanjung Ampalu	9,581	86,471	1,499	13,529
2	Tanjung Ampalu - Sijunjung	17,772	88,860	2,228	11,140
3	Simp.Sikabau - Simp.Koto Baru	24,416	84,193	4,584	15,807
4	Simp.Koto Baru - Tanjung Simalidu	9,446	79,378	2,454	20,622
5	Indrapura - Muara Sakai	5,754	78,822	1,546	21,178
6	Sicincin - Kuraitaji	14,412	87,664	2,028	12,336
7	Panti - Simpang Empat	60,674	81,738	13,556	18,262
8	Simp. Empat - Sasak	15,922	79,610	4,078	20,390
9	Air Balam - Air Bangis	12,520	99,365	0,080	0,635
10	Baso - Bts Batusangkar (Balai Selasa)	26,034	90,427	2,756	9,573
11	Bts Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	9,400	90,385	1,000	9,615
12	Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	22,188	72,510	8,412	27,490
13	Sitangkai - Tanjung Ampalu	14,772	85,486	2,508	14,514
14	Bts Kota Payakumbuh - Sitangkai	41,343	81,689	9,267	18,311
15	Junction - Abaisiat	12,400	98,413	0,200	1,587
16	Sijunjung - Tanah Badantung	3,720	84,545	0,680	15,455
17	Simp.Padang Aro -Lubuk Malako	16,942	84,710	3,058	15,290
18	Padang sawah - Kumpulan	34,601	94,797	1,899	5,203
19	Batas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	39,811	84,975	7,039	15,025
20	Batusangkar - Ombilin	16,517	89,233	1,993	10,767
21	Solok- Alahan Panjang	39,545	82,730	8,255	17,270
22	Lubuk Basung - Sungai Limau	22,218	72,000	8,682	28,000
23	Simp Duku (Ketaping) - Pariaman	18,618	90,820	1,882	9,180
24	Pangkalan Kt.Baru- Sialang - Gelugur	69,837	94,438	4,113	5,562
25	Simp.Koto Mambang - Balingka	39,400	100,000	0,000	0,000
26	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	41,112	93,224	2,988	6,776
27	Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	12,096	85,363	2,074	14,637
28	Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (Tpa Regional)	2,050	100,000	0,000	0,000
29	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	26,100	91,901	2,300	8,099
30	Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting	23,950	79,833	6,050	20,167
31	Pintu Angin - Lubuak Saiyo	5,500	100,000	0,000	0,000
32	Rao - Rokan (Batas Riau)	29,500	89,394	3,500	10,606
33	Lubuk Sikaping - Talu	26,400	94,286	1,600	5,714
34	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	31,363	72,600	11,837	27,400
35	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1,200	100,000	0,000	0,000
36	Simpang SP II - Kantor Camat	4,100	80,392	1,000	19,608

Sumber data: Dinas PUPR Prov Sumbar



Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.51.

Tabel 3.3 51 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	38	100	-	40

Dari tabel 3.3.51 diketahui bahwa 36 jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap di tahun 2018 atau mengalami penurunan sebanyak 2 ruas jalan dengan kondisi jalan mantap dibandingkan dengan kondisi tahun 2017. Secara absolut, panjang jalan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi mantap di tahun 2018 sebanyak 1099,033 Km atau meningkat sebanyak 15,383 Km dibandingkan dengan kondisi jalan mantap di tahun 2017. Capaian indikator kinerja jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap di tahun 2018 menunjukkan nilai 100% yang berarti realisasi indikator kinerja ini tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja ini tahun 2017-2018 tidak dapat dibandingkan karena indikator kinerja ini baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018.

Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap tahun 2018 sebanyak 36 ruas jalan menunjukkan pencapaian 90% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap ditargetkan 40 ruas jalan atau meningkat sebanyak 4 ruas jalan dari realisasi di



tahun 2018. Dikarenakan jalan dalam kondisi mantap merupakan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya untuk dapat mencapai target tersebut.

Hambatan/kendala dalam meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap antara lain tidak semua ruas jalan yang dipelihara/ditingkatkan kondisinya setiap tahun,

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 untuk meningkatkan jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan pada 19 ruas jalan provinsi di wilayah Kabupaten/kota se Sumatera Barat dan pembangunan jembatan di 2 wilayah. Selama tahun 2018, Pembangunan /peningkatan jalan tersebut meliputi:
 - a. Pembangunan/peningkatan jalan menuju daerah terisolir 15,62 Km
 - b. Pembangunan/peningkatan jalan menuju daerah wisata 6,83 Km
 - c. Pembangunan jalan menuju pelabuhan laut/udara 9,2 Km
 - d. Peningkatan jalan 17,66 Km
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pada 16 ruas jalan dan jembatan Provinsi.

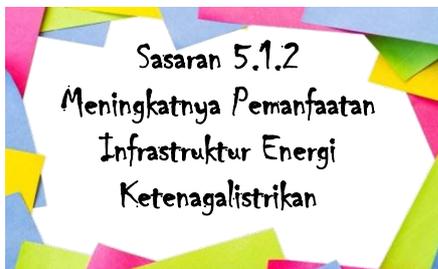
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah sebesar Rp 442.698.758.899,- dan terealisasi Rp 401.071.057.294,- atau 90,60%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 41.627.701.605,- (9,4%).

Anggaran tersebut tersebar pada 13 program sebagai berikut: Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi (22 kegiatan), Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi (16 kegiatan), Program Peningkatan



Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan (3 kegiatan), Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (21 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (6 kegiatan), Program Perencanaan Penataan Ruang (8 kegiatan), Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (3 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah (1 kegiatan), Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkerataapian (4 kegiatan), Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas (6 kegiatan), Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut (4 kegiatan), Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ (1 kegiatan) dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (22 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 90,60% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 52 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Rasio elektrifikasi (%)	93,63	93,83	100,21

Rasio elektrifikasi menggambarkan jumlah rumah tangga yang terlistriki di Sumatera Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menargetkan rasio elektrifikasi dapat ditingkatkan dari tahun ke tahun. Untuk



tahun 2018, rasio elektrifikasi ditargetkan 93,63% atau meningkat sebesar 4,22% dari rasio elektrifikasi tahun 2017 (89,41%).

Dari tabel 3.3.52 dapat dilihat indikator kinerja rasio elektrifikasi target 93,63% terealisasi 93,83% dengan tingkat capaian 100,21% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

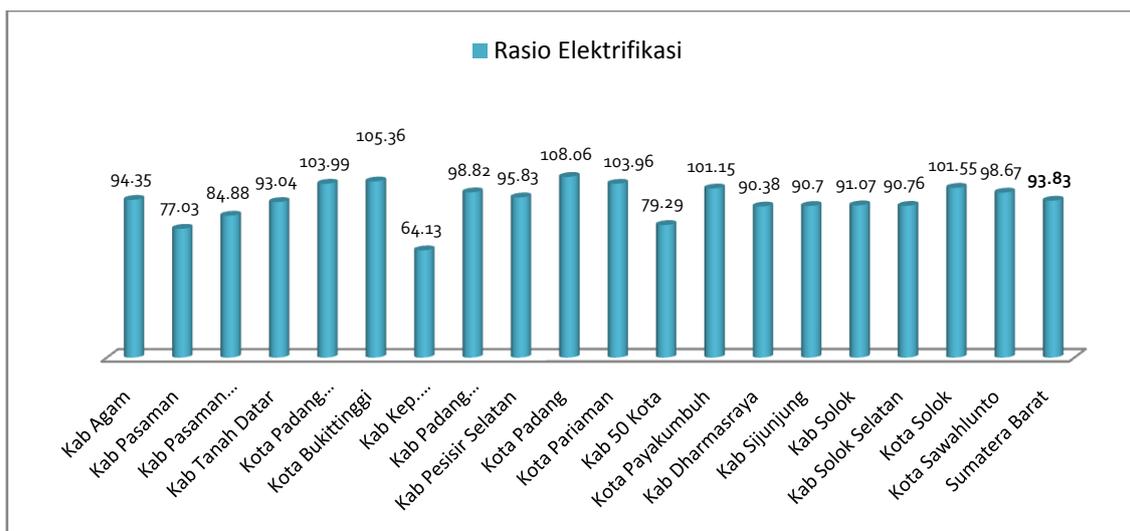
Realisasi indikator kinerja rasio elektrifikasi diukur berdasarkan data dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat yang dihitung dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah rumah tangga yang ada di Sumatera Barat, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio elektrifikasi} = \frac{1.202.389}{1.281.452} \times 100 = 93.83\%$$

Ket: Jumlah RT yang terlistriki s/d tahun 2018 = 1.202.389 RT (1.185.151 RT Pelanggan PLN dan 17.238 RT Non PLN)
Jumlah RT s/d tahun 2018 = 1.281.452 RT

Rasio elektrifikasi Sumatera Barat sebesar 93,83% merupakan akumulasi dari rasio elektrifikasi 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2018. Rasio elektrifikasi kabupaten/kota se Sumatera Barat tergambar pada grafik 3.25.

Grafik 3. 25 Rasio elektrifikasi Kabupaten/Kota Tahun 2018



Sumber data: Dinas ESDM Prov Sumbar



Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.53.

Tabel 3.3 53 Perbandingan realisasi. capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja rasio elektrifikasi

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Rasio Elektrifikasi (%)	93,83	89,41	100,21	100,95	99,96

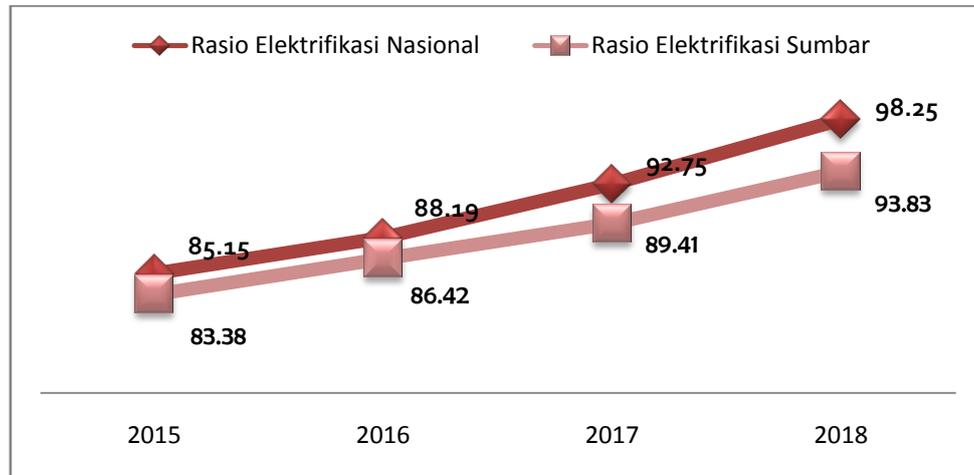
Dari tabel 3.3.53 diketahui bahwa rasio elektrifikasi di tahun 2018 sebesar 93,83% atau mengalami peningkatan sebesar 4,42% dibandingkan dengan rasio elektrifikasi di tahun 2017. Capaian indikator kinerja rasio elektrifikasi di tahun 2018 dan 2017 menunjukkan nilai >100% yang berarti realisasi indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017, capaian tahun 2018 menurun sebesar 0,74%.

Rasio elektrifikasi tahun 2018 sebesar 93,83% menunjukkan pencapaian 93,87% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, rasio elektrifikasi ditargetkan 99,96% atau meningkat 6,13% dari realisasi di tahun 2018. Dengan mempertimbangkan peningkatan rasio elektrifikasi dari tahun 2017-2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Dibandingkan dengan rasio elektrifikasi nasional, rasio elektrifikasi Sumatera Barat dari tahun 2015-2018 masih berada di bawah nasional dengan perbedaan yang terus meningkat dari tahun 2015-2018. Selisih tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 4,42%. Perbandingan rasio elektrifikasi nasional dengan Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik 3.26.



Grafik 3. 26 Perbandingan Rasio Elektrifikasi Nasional dengan Rasio Elektrifikasi Sumatera Barat Tahun 2015-2018



Sumber data: Dinas ESDM Prov Sumbar

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 untuk meningkatkan rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebanyak 2 unit yaitu di Kabupaten Solok dan di Kabupaten Pasaman
2. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 70 unit (35 unit di Kabupaten Pasaman, 15 unit di Kabupaten Pesisir Selatan dan 20 unit di Kabupaten Solok.
3. Memantau pembangunan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.

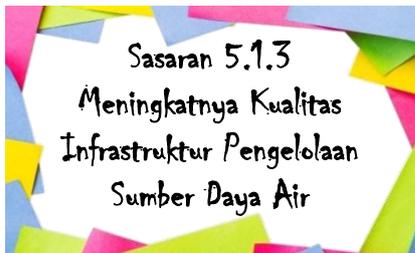
Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan rasio elektrifikasi di tahun 2018 antara lain belum adanya akses jalan yang memadai untuk mencapai daerah yang belum terlistriki. Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengkoordinasikan perangkat daerah terkait untuk membangun infrastruktur jalan yang memadai di daerah yang belum berlistrik.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan adalah sebesar Rp 8.020.102.636,- dan terealisasi Rp 7.755.839.140,- atau 96,70 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 264.263.496,- (3,3 %).



Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistikan (10 kegiatan), Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan energi (3 kegiatan), Program Pengelolaan Mineral dan Batubara (10 kegiatan), Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi air tanah (6 kegiatan), dan Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (3 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pemanfaatan infrastruktur energi ketenagalistrikan. Capaian indikator kinerja sebesar 100,21% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 96,70% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 54 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	59,60	59,12	99,19

Kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2018 ditargetkan 59,60% atau meningkat sebesar 3,31% dari tahun 2017 (56,29%).

Dari tabel 3.3.54 dapat dilihat indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air target 59,60% terealisasi 59,12% dengan tingkat capaian 99,19% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.



Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi, persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air dan persentase volume tampungan sumber-sumber air dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air} = \frac{68.72\% + 59.75\% + 48.90\%}{3} = 59.12\%$$

Ket: persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi tahun 2018 = 68.72%
 persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air tahun 2018 = 59.75%
 persentase volume tampungan sumber-sumber air tahun 2018 = 48.90%

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.55.

Tabel 3.3 55 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air	59,12	56,29	99,19		68,33

Dari tabel 3.3.55 diketahui bahwa persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air di tahun 2018 sebesar 59,12% atau mengalami peningkatan sebesar 2,83% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017. Capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 99,19% yang berarti realisasi indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk capaian di tahun 2017 tidak dapat dihitung karena di tahun



2017 indikator kinerja persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air tahun 2018 sebesar 59,12% menunjukkan pencapaian 86,52% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air ditargetkan 68,33% atau meningkat 9,21% dari realisasi di tahun 2018. Dengan mempertimbangkan peningkatan persentase rata-rata peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air dari tahun 2017-2018 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimis dapat mencapai target tersebut.

Peningkatan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air didukung oleh:

1. Peningkatan kinerja layanan infrastruktur irigasi

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan luas daerah irigasi fungsional sebanyak 1.975 ha, sehingga total luas Daerah irigasi fungsional sampai dengan tahun 2018 menjadi 44.670 ha. Untuk mencapai peningkatan kinerja layanan irigasi di tahun 2018 telah dilaksanakan rehabilitasi pada 35 Daerah Irigasi dengan total penanganan ± 13.358 km saluran pembawa, rehabilitasi ringan 5 unit bendung, 17 unit bangunan, pembuatan 18 m penahan tebing, pembuatan 24 m talang dan 11 unit pintu air. Rincian rehabilitasi 35 Daerah Irigasi dapat dilihat pada tabel 3.3.56.

Tabel 3.3 56 Daerah irigasi yang direhabilitasi di Tahun 2018

No	Daerah Irigasi	No	Daerah Irigasi
1	D.I Amping Parak	19	D.I Bdr. Batang Lembang Kabupaten Solok - Kota Solok
2	D.I Bandar Halim	20	D.I Batang Parika Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
3	D.I Bandar Pekonina Kabupaten Solok Selatan	21	D.I Bdr. Gadang II Paninjauan Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
4	D.I Bdr. Panjang Selayo	22	D.I Bdr. Gadang Darek Kabupaten Tanah Datar - Kota Padang Panjang
5	D.I Batang Selo	23	D.I Bdr. Pamujan Kabupaten Solok - Kota Solok



No	Daerah Irigasi	No	Daerah Irigasi
6	D.I Bandar Galo Gandang	24	D.I Rimbo Tampurung Kabupaten Pasaman Barat
7	D.I Lubuk Gobing	25	D.I Batang Tabik Kabupaten 50 Kota - Kota Payakumbuh
8	D.I Batang Talawi	26	D.I Bandar Sungai Aro Kabupaten Solok Selatan
9	D.I Bdr. Bangko	27	D.I Bdr. Batu Hampa Kabupaten Agam - Kota Bukittinggi
10	D.I Koto Tuo	28	D.I Batang Tingkarang Kabupaten Pasaman
11	D.I Gunung Nago	29	D.I Kapar Ampu Kabupaten Pasaman Barat
12	D.I Sawah Aru	30	D.I Lubuak Sariak Kabupaten Pesisir Selatan
13	D.I Ladang Laweh	31	D.I Baramban III Lurah
14	D.I Koto Kandis	32	D.I Batang Gumarang Kabupaten Agam
15	D.I Bintungan	33	D.I Sicaung Kabupaten Padang Pariaman
16	D.I Bandar Batang Dareh	34	D.I Talang Kemuning Jaya Kabupaten Pesisir Selatan
17	D.I Bandar Sangkir Garagahan	35	D.I Malepang Kabupaten Pesisir Selatan
18	D.I Batang Sianok		

Sumber data: Dinas PSDA Prov Sumbar

2. Peningkatan kawasan terlindungi dari daya rusak air

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan luas kawasan terlindungi dari daya rusak air sebesar 53,09 ha, sehingga total luas kawasan yang dapat terlindungi sampai tahun 2018 menjadi 1.870,13 ha. Untuk meningkatkan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air di tahun 2018 telah dilakukan pembangunan infrastruktur (9.575,06 m) pada 55 lokasi pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Pembangunan infrastruktur pada 55 lokasi pengendalian banjir dan pengamanan pantai di tahun 2018 diuraikan pada tabel 3.3.57.

Tabel 3.3 57 Lokasi pengendalian banjir dan pengamanan pantai di Tahun 2018

No	Lokasi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
1	Tebing Batang Palangai Kabupaten Pesisir Selatan
2	Tebing Batang Surantiah Kabupaten Pesisir Selatan
3	Batang Painan Kabupaten Pesisir Selatan
4	Tebing Batang Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
5	Tebing Batang Siguntur Kabupaten Pesisir Selatan
6	Tebing Batang Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
7	Tebing Batang Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
8	Batang Lumpo Kabupaten Pesisir Selatan
9	Tebing Batang Palangki Kabupaten Sijunjung
10	Tebing Batang Piruko Kabupaten Sijunjung
11	Tebing Batang Sangir Kabupaten Solok Selatan
12	Batang Lurus-Maransi Kota Padang



No	Lokasi Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
13	Tebing Batang Sungai Sapih Kota Padang
14	Tebing Batang Lembang Kota Solok - Kabupaten Solok
15	Pantai Bungus Kota Padang
16	Muaro Sungai Batang Kandis Punggasan Kabupaten Pesisir Selatan
17	Tebing Batang Guo Belimbing Kota Padang
18	Tebing Batang Gn . Sariak Kota Padang
19	Tebing Batang Salido Kab. Pesisir Selatan
20	Tebing Batang Kumuih Kab. Sijunjung
21	Tebing Batang Kumbang Kab. Pesisir Selatan
22	Tebing Bt . Ampek Koto Mudiak Kec. Batang Kapas Kab. Pesisir Selatan
23	Tebing Sungai Batang Kapas Kec . Batang Kapas Kab.Pesisir Selatan
24	Tebing Anak Sungai Lolo Bancah Kec. KPGD Kab. Solok Selatan
25	Tebing Batang Belimbing Kota Padang
26	Tebing Batang Lagan Nagari Lagan Mudiak Punggasan Kab. Pesisir Selatan
27	Tebing Batang Gawan Kota Solok
28	Tebing Batang Laweh Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan
29	Tebing Sungai Galodo Kp. Pasar Nagari Barung - Barung Belantai Kab. Pesisir selatan
30	Tebing Ampiang Parak Kenagariaian Ampiak Parak Timur Kec . Sutura Kab. Pesisir Selatan
31	Tebing Batang Sinamar Kabupaten 50 Kota
32	Tebing Sungai Antokan Kabupaten Agam
33	Batang Kalampaian Kabupaten Padang Pariaman
34	Tebing Sungai Batang Sungai Sariak Malai Kabupaten Padang Pariaman
35	Tebing Batang Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman
36	Batang Maligi Kabupaten Pasaman Barat
37	Tebing Batang Tambuo. Nagari Persiapan Mudiak Labuah Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat
38	Tebing Batang Asik
39	Tebing Batang Mandiangin. Nagari Persiapan Bancah Kariang. Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
40	Tebing Batang Partupangan Jorong Langgam Kinali Kecamatan Kinali Kab. Pasaman Barat
41	Batang Mandiangin. Nagari Persiapan Bancah Kariang. Kec. Kinali Kab. Pasaman Barat
42	Tebing Batang Katiak Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kab. Agam
43	Tebing Batang Lakitan Kampung Subarang Tarok Kenagarian Lakitan Selatan Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan
44	Tebing Anak Batang Surantiah Batu Bala Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan
45	Tebing Batang Gn . Sariak Kp. Lapau Manggis Kota Padang
46	Tebing Batang Surantih Kenagarian Aur Duri Kec . Sutura Kab. Pesisir Selatan
47	Tebing Batang Surantih Kenagarian Gn. Malelo Kec. Sutura Kab. Pesisir Selatan
48	Tebing Bataang Surantih Kenagarian Gunuang Mudik Selatan Kab. Pesisir Selatan
49	Tebing Batang Painan Kab. Pesisir Selatan
50	Tebing Batang Bayang Sani Kenagarian Kapeh Panji Kampung Jambak Kec. Bayang Kab. Pesisir Selatan
51	Tebing Batang Tarusan Kanagarian Barung Barung Balantai Timur Kab.Pesisir Selatan
52	Tebing Batang Tarusan Nagari Barung - Barung Belantai Tengah Kab. Pesisir Selatan
53	Tebing Batang Palangai Kaciak Kab. Pesisir Selatan
54	Tebing Batang Palangai Timur Kab . Pesisir Selatan
55	Tebing Batang Lagan Kenagarian Lagan Mudik Punggasan Kec. Linggo sari Baganti Kab. Pesisir Selatan

Sumber data: Dinas PSDA Prov Sumbar



3. Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air sebanyak 22.160 m³, sehingga total tampungan sumber-sumber air sampai tahun 2018 menjadi 287.287 m³. Untuk meningkatkan kapasitas tampungan sumber-sumber air, di tahun 2018 telah dibangun 1 embung yaitu embung Talayo Parayun Kabupaten Solok yang dapat menampung ± 22.160 m³.

Kendala yang dihadapi dalam *meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air* adalah sebagai berikut:

1. Pekerjaan fisik rehabilitasi Daerah irigasi harus disepakati dengan petani pemakai air karena jadwal penutupan air irigasi terkait dengan musim tanam.
2. Rendahnya kinerja penyedia jasa serta faktor cuaca yang ekstrim

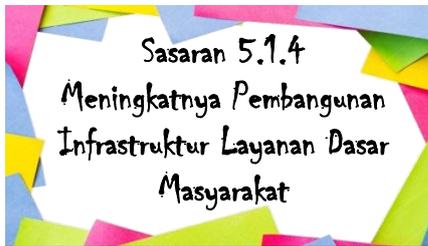
Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air adalah sebesar Rp 163.973.049.447,- dan terealisasi Rp 150.966.867.529.11,- atau 92,07%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.006.181.917.89,- (7,93%).

Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program pengembangan dan pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan kewenangan Provinsi lainnya (74 kegiatan), Program Pengendalian banjir dan pengamanan pantai (97 kegiatan), Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya (17 kegiatan), Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku (4 kegiatan) dan Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi (14 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur pengelolaan sumber daya air. Capaian indikator kinerja sebesar 100,21% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar

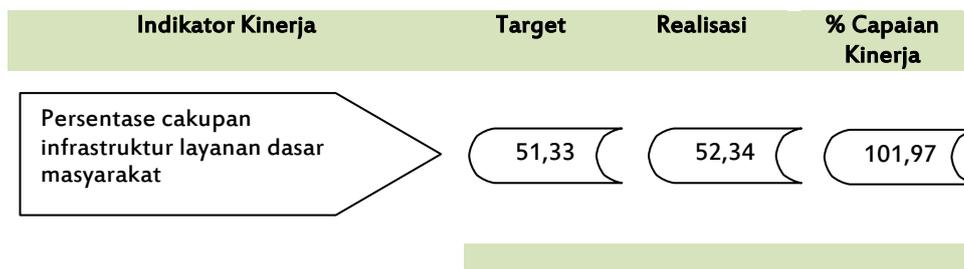


92,07% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 58 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.1.4



Cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat dalam hal ini meliputi pemenuhan air minum, sanitasi dan perumahan yang layak. Pemenuhan layanan dasar masyarakat diharapkan akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, di tahun 2018 cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat ditargetkan 51,33%.

Dari tabel 3.3.58 dapat dilihat indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat target 51,33% terealisasi 52,34% dengan tingkat capaian 101,97% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur dengan menjumlahkan cakupan air minum, cakupan sanitasi dan penurunan rumah tidak layak huni dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat} = \frac{76.04\% + 75.19\% + 5.8\%}{3} = 52.34\%$$

- Ket: Cakupan air minum tahun 2018 = 76.04%
 Cakupan sanitasi tahun 2018 = 75.19%
 Persentase penurunan rumah tidak layak huni tahun 2018 = 5.8%



Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.59.

Tabel 3.3 59 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat	52,34	-	101,97	-	56,33

Dari tabel 3.3.59 diketahui bahwa persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat di tahun 2018 sebesar 52,34%. Capaian indikator kinerja ini di tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 101,97% yang berarti realisasi indikator kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk realisasi dan capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator kinerja persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018.

Persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat tahun 2018 sebesar 52,34% menunjukkan pencapaian 92,92% dari target tahun terakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Untuk tahun 2021, persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat ditargetkan 56,33% atau meningkat 3,99% dari realisasi di tahun 2018. Untuk mencapai target tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan mengoptimalkan upaya dan sumber daya karena indikator kinerja ini terkait dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

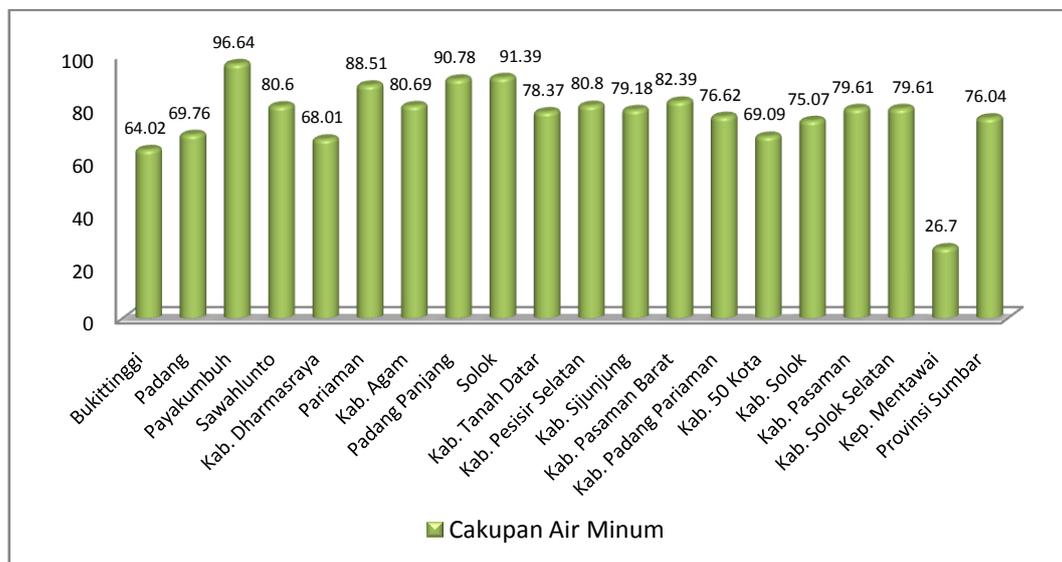
Cakupan layanan dasar masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi dan perumahan yang layak huni. Oleh karena itu peningkatan persentase cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat didukung oleh:



1. Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum

Akses masyarakat terhadap air minum mengalami peningkatan sebesar 0,21% menjadi 76,04 di tahun 2018. Dari jumlah penduduk 5.060.063 jiwa sebanyak 3.847.492 jiwa (76,04%) sudah memiliki akses layanan air minum. Sebanyak 1.823.419 jiwa (36,04%) jaringan pipa PDAM, 515.016 jiwa (10,18%) dan 1.509.058 (29,82%) non perpipaan. Cakupan akses penyediaan air minum pada 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2018 tergambar pada grafik 3.27.

Grafik 3. 27 Cakupan akses penyediaan air minum Kabupaten/kota tahun 2018



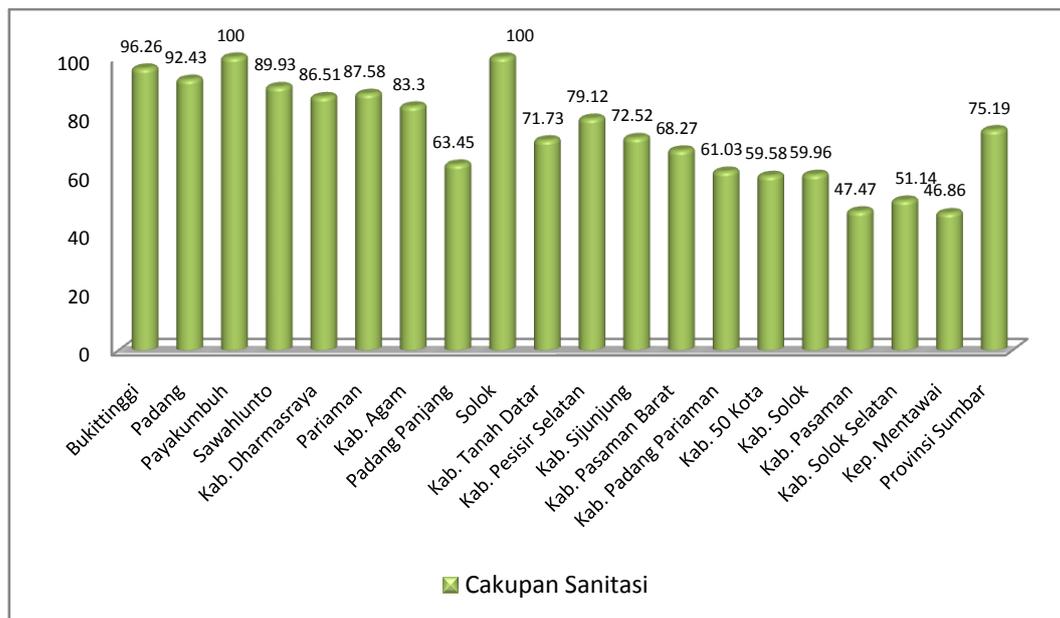
Sumber data: Dinas PUPR Prov Sumbar

2. Akses masyarakat terhadap sanitasi

Akses masyarakat terhadap sanitasi belum dapat ditingkatkan secara maksimal pada tahun 2018. Dibandingkan dengan tahun 2017 akses masyarakat terhadap sanitasi menurun sebesar 0,69% di tahun 2018. Pada tahun 2018 dari 1.241.663 KK sebanyak 933.606 rumah tangga sudah bersanitasi. Cakupan akses sanitasi pada 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2018 tergambar pada grafik 3.28.



Grafik 3. 28 Cakupan akses sanitasi Kabupaten/kota tahun 2018

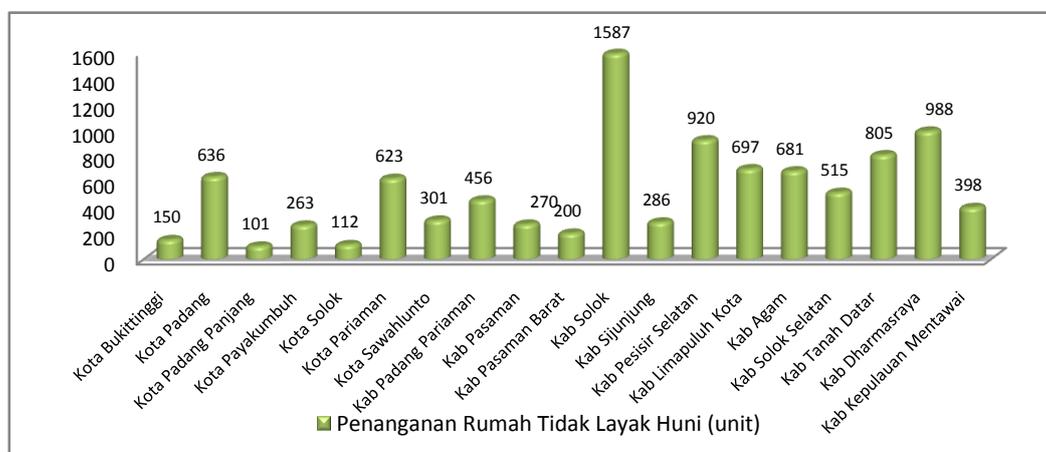


Sumber data: Dinas PUPR Prov Sumbar

3. Penurunan rumah tidak layak huni

Rumah tidak layak huni dari tahun 2017-2018 mengalami penurunan dengan persentase penurunan yang mengalami peningkatan sebesar 2,71 di tahun 2018. Secara absolut jumlah rumah layak huni di tahun 2017 sebanyak 172.154 unit menurun sebanyak 9.989 unit (5,8%) di tahun 2018. Penanganan rumah tidak layak huni di tahun 2018 tersebar di 19 Kabupaten/kota sebagaimana tergambar pada grafik 3.29.

Grafik 3. 29 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten/kota tahun 2018



Sumber data: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov Sumbar



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan infrastruktur layanan dasar masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan kinerja SPAM Regional melalui pembangunan pipa distribusi sepanjang 738.092 meter
2. Pembentukan Pokja sanitasi Provinsi yang melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi kabupaten/kota
3. Koordinasi dengan instansi terkait yang berperan dalam meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat adalah sebesar Rp 12.663.424.801,- dan terealisasi Rp 9.049.197.739.50,- atau 71,46%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 3.614.227.061.50,- (28,54%).

Anggaran tersebut tersebar pada 7 program sebagai berikut: Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional (1 kegiatan), Program Pengembangan Perumahan (7 kegiatan), Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (6 kegiatan), Program Pengelolaan Pertanahan (7 kegiatan), Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi (4 kegiatan), Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota (5 kegiatan) dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah (3 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat. Capaian indikator kinerja sebesar 101,97% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 71,46% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

**Tujuan 5.2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup**

Tujuan kedua misi 5 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Untuk mengetahui bagaimana kualitas lingkungan hidup ditetapkan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Realisasi dan capaian IKLH digambarkan pada tabel 3.3.60.

Tabel 3.3 60 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan 5.2

No	Indikator Kinerja	2018			2017
		Target	Realisasi	% Capaian	Realisasi
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,63	76,7	110,15	76,67

IKLH Provinsi Sumatera Barat merupakan indeks pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat. IKLH memberikan informasi kepada para pengambil keputusan daerah terkait dengan kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

IKLH diharapkan dalam kondisi baik ($74 < \text{IKLH} \leq 82$). Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor maka target IKLH di tahun 2018 ditetapkan 69,63 (kategori cukup).

Dari tabel 3.3.60 diketahui indikator kinerja tujuan IKLH target 69,63 terealisasi 76,7 dengan tingkat capaian 110,15 termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{IKLH} = 30\% \times 77,29 + 30\% \times 88,37 + 40\% \times 67,5 = 76,7$$

Ket: Indeks Kualitas Air tahun 2018 = 77,29
 Indeks Kualitas Udara tahun 2018 = 88,37
 Indeks tutupan hutan/indeks kualitas tutupan hutan= 67,5

Berdasarkan tabel 3.3.60 diketahui bahwa realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami peningkatan sebesar 0,03 menjadi 76,70 di tahun 2018. Nilai IKLH 76,70 termasuk kategori baik. Hal ini menunjukkan tujuan meningkatnya



kualitas lingkungan hidup dapat tercapai dengan baik. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan IKLH antara lain:

1. Mempertahankan kualitas air Provinsi Sumatera Barat dalam kategori Baik.
Indeks kualitas air (IKA) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018 menunjukkan tren meningkat sebesar 1,6. Tahun 2017 IKA Provinsi Sumatera Barat adalah 75,69 dan tahun 2018 adalah 77,29.
2. Mempertahankan kualitas Udara Provinsi Sumatera Barat dalam kategori sangat baik.
Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018 menunjukkan tren menurun sebesar 1,5. Kendati demikian, IKU tahun 2017 dan 2018 masih tergolong kategori sangat baik. Tahun 2017 IKU Provinsi Sumatera Barat adalah 89,87 dan tahun 2018 adalah 88,37.
3. Meningkatkan kualitas hutan/tutupan lahan Provinsi Sumatera Barat
Indeks Kualitas Hutan/tutupan lahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang sama yaitu 67,5 termasuk kategori cukup.

Untuk mencapai tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup telah ditetapkan 3 sasaran strategis. Evaluasi dan analisis terhadap pencapaian ketiga sasaran strategis tersebut dijelaskan sebagai berikut:



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas air dan udara dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 61 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1. Indeks Kualitas Air	65,63	77,29	117,77
2. Indeks Kualitas Udara	82,9	88,37	106,6
Rata-rata capaian			112,18



Rata-rata capaian 2 indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar 112,18% termasuk kategori keberhasilan memuaskan. Uraian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:



Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) diharapkan dalam kondisi baik ($74 < IKA \leq 82$). Akan tetapi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor maka target IKA di tahun 2018 ditetapkan 69,63 (kategori kurang).

Dari tabel 3.3.61 dapat dilihat indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) target 65,63 terealisasi 77,29 dengan tingkat capaian 117,77% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja indeks kualitas air diperoleh dengan menghitung nilai Indeks Pencemaran Air (IPA) pada 11 (sebelas) dari total 84 (delapan puluh empat) sungai lintas kabupaten/kota di Sumatera Barat yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Lembang, Sungai Batang Ombilin, Sungai Pangian, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, Sungai Batang Sinamar, Sungai Batang Masang Gadang, Sungai Batang Selo dan Sungai Batang Lasi. Nilai IPA tersebut dikonversi menjadi nilai IKA. Kategori dan kisaran IKA dapat dilihat pada tabel 3.3.62.

Tabel 3.3 62 Kategori dan Kisaran IKA

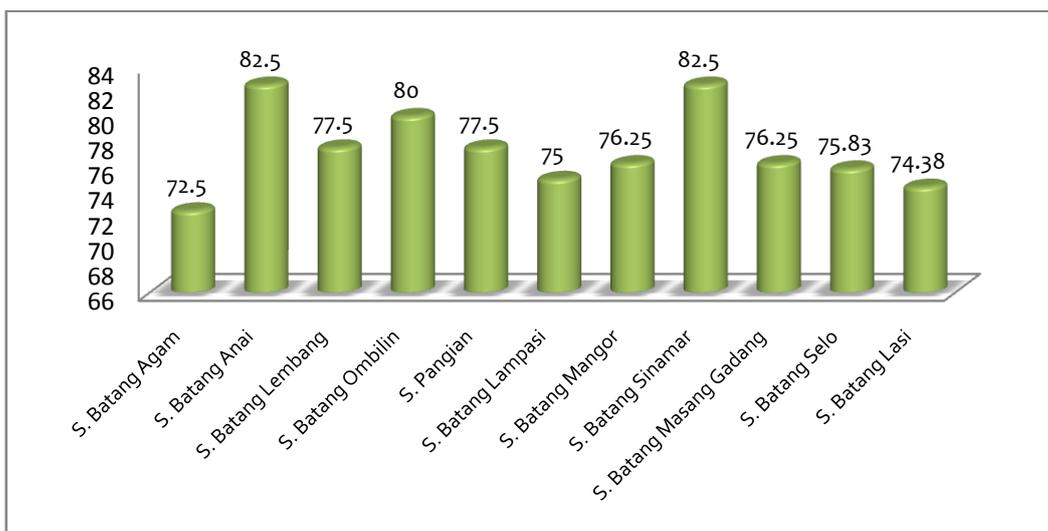
KATEGORI	KISARAN IKA
Unggul	$IKA > 90$
Sangat Baik	$82 < IKA \leq 90$
Baik	$74 < IKA \leq 82$
Cukup	$66 < IKA \leq 74$
Kurang	$58 < IKA \leq 66$
Sangat Kurang	$50 < IKA \leq 58$
Waspada	$IKA < 50$

Sumber data: DLH Prov Sumbar

Nilai Indeks Kualitas Air 11 (sebelas) sungai yang dipantau di tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 3.30.



Grafik 3. 30 IKA 11 (sebelas) sungai yang dipantau di tahun 2018



Sumber data: DLH Prov Sumbar

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.63.

Tabel 3.3 63 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA)

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks Kualitas Air	77.29	75.69	117.77		65.98

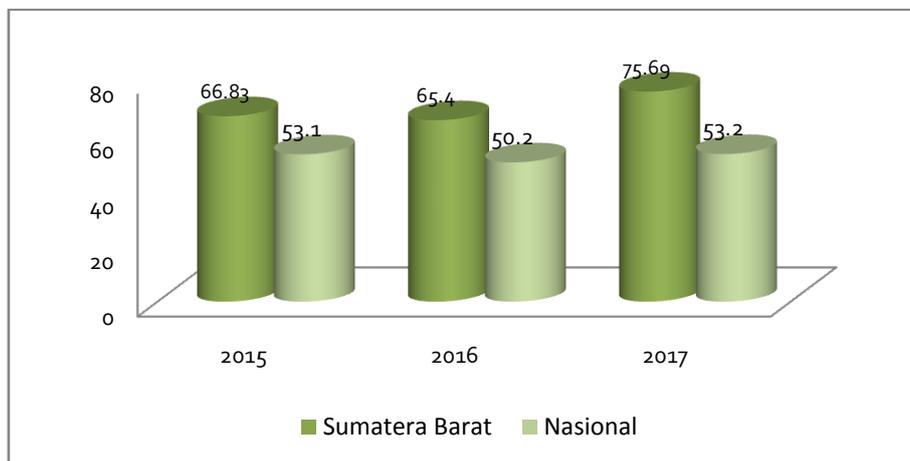
Dari tabel 3.3.63 diketahui bahwa indeks kualitas air di tahun 2018 sebesar 77,29 atau mengalami peningkatan sebesar 1,6 (2,11%) dibandingkan dengan indeks kualitas air di tahun 2017. Capaian indikator kinerja indeks kualitas air di tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 117,77% yang berarti realisasi indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk capaian di tahun 2017 tidak dapat dihitung karena di tahun 2017 indikator kinerja indeks kualitas air tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



Untuk tahun 2021, indeks kualitas air ditargetkan 65,98% atau lebih rendah 11,31% dari realisasi di tahun 2018. Dikarenakan pencapaian tahun 2018 lebih tinggi dari target 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target yang ditetapkan di tahun 2021.

Dari tahun 2015-2017 IKA Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan IKA di tingkat Nasional. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan metode perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perbandingan IKA nasional dengan IKA Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.31.

Grafik 3. 31 Perbandingan Nilai IKA nasional dengan IKA Provinsi Sumatera Barat



Sumber data: DLH Prov Sumbar

Kendala yang ditemui dalam meningkatkan kualitas air sungai antara lain:

1. Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai
2. Masih belum terkelolannya limbah cair domestik sehingga limbah domestik masuk ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan Indeks Kualitas Air adalah:



1. Meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk mengelola sungai dan sumber pencemar sungai-sungai.
2. Sinergitas program dan kegiatan dengan instansi vertikal kementerian
3. Peningkatan tutupan vegetasi pada daerah hulu yang dapat menurunkan parameter TSS serta sedimentasi di sungai.
4. Kegiatan normalisasi dan pemulihan sempadan sungai di beberapa sungai di Sumatera Barat.
5. Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota terhadap buangan usaha/kegiatan.

2

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) diharapkan dalam kondisi minimal baik ($74 < IKA \leq 82$). Oleh karena itu, target IKU di tahun 2018 ditetapkan 82,9 (kategori sangat baik).

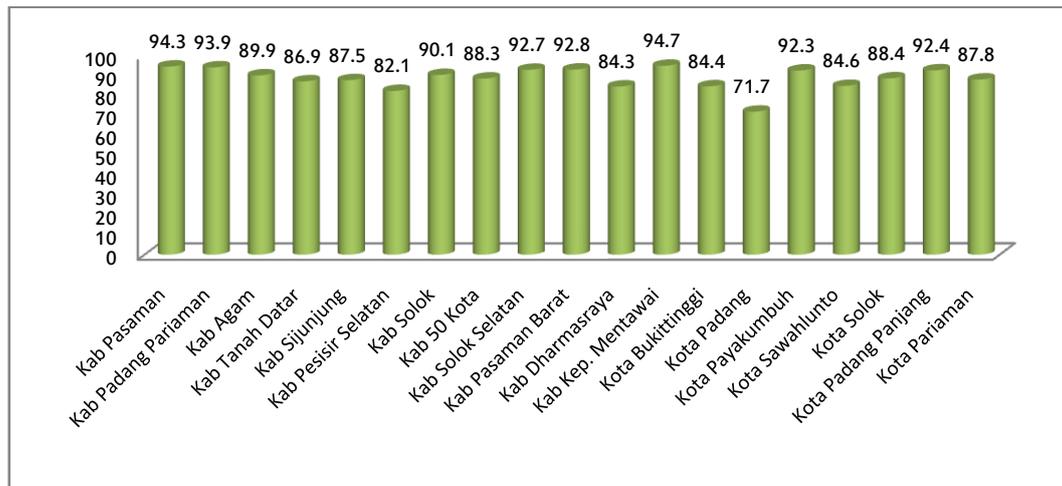
Dari tabel 3.3.61 dapat dilihat indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) target 82,9 terealisasi 88,37 dengan tingkat capaian 106,6% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien *metode passive sampler* di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO_2 dan SO_2 . Khusus untuk kota Padang juga dilakukan pemantauan dengan metode otomatis kontinu dengan menggunakan alat *Air Quality Monitoring System* (AQMS) yang memberikan data setiap 30 menit setiap harinya.

Indeks Kualitas Udara (IKU) 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat tahun 2018 tergambar pada grafik 3.32.



Grafik 3. 32 Indeks Kualitas Udara 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat



Sumber data: DLH Prov Sumbar

Dari grafik 3.32 dapat dilihat ada 9 (sembilan) Kabupaten/kota yang nilai IKUnya lebih rendah dari nilai IKU Provinsi. Kabupaten/kota tersebut merupakan pusat kegiatan yang padat aktivitas dan transportasinya di Provinsi Sumatera Barat. Nilai IKU terendah ada di Kota Padang (71,7) dan yang tertinggi ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai (94,7).

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.64.

Tabel 3.3 64 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks Kualitas Udara	88.37	89.87	106.6		83.58

Dari tabel 3.3.64 diketahui bahwa indeks kualitas udara di tahun 2018 sebesar 88,37 atau mengalami penurunan sebesar 1,5 (1,67%) dibandingkan dengan Indeks Kualitas Udara di tahun 2017. Penurunan IKU di tahun 2018 disebabkan oleh faktor antropogenik (berhubungan dengan aktivitas manusia) dan faktor

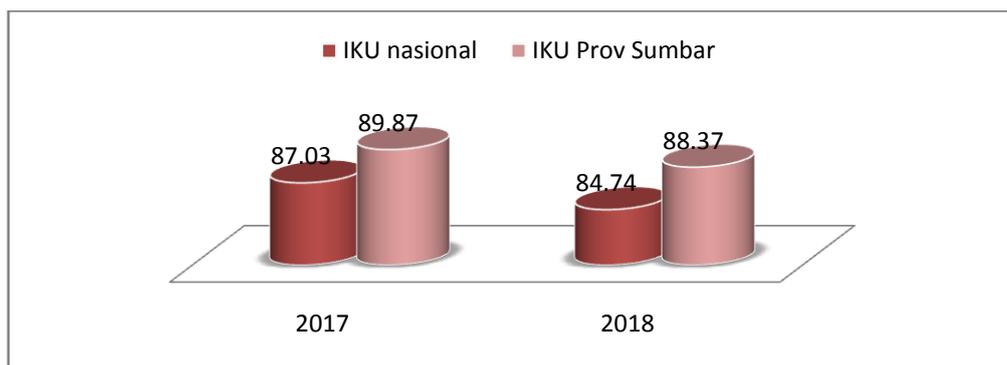


alam. Faktor antropogenik antara lain peningkatan jumlah kendaraan roda dua/empat, kegiatan industri dan peningkatan jumlah penduduk. Untuk faktor alam seperti kondisi curah hujan, arah angin dan suhu udara. Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Udara di tahun 2018 menunjukkan nilai sebesar 106,6% yang berarti realisasi indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk capaian di tahun 2017 tidak dapat dihitung karena di tahun 2017 indikator kinerja Indeks Kualitas Udara tidak ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk tahun 2021, Indeks Kualitas Udara ditargetkan 83,58% atau lebih rendah 4,79% dari realisasi di tahun 2018. Dikarenakan pencapaian tahun 2018 lebih tinggi dari target 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target yang ditetapkan di tahun 2021.

Dari tahun 2017-2018 IKU Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan IKU di tingkat Nasional. Baik IKU Nasional maupun Provinsi Sumatera Barat menunjukkan penurunan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan IKU nasional dengan IKU Provinsi Sumatera Barat digambarkan pada grafik 3.33.

Grafik 3. 33 Perbandingan IKU Nasional dengan IKU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2018



Sumber data: DLH Prov Sumbar

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks kualitas udara adalah sebagai berikut:



1. Upaya pengurangan emisi kendaraan bermotor melalui program *car free day*
2. Penataan transportasi publik seperti pemakaian trans padang
3. Penambahan ruang terbuka hijau di kabupaten/kota

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas air dan udara adalah sebesar Rp 8.500.327.569,- dan terealisasi Rp 8.187.504.831,- atau 96,32%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 312.822.738,- (3,68 %).

Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (17 kegiatan), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (3 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (4 kegiatan), Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan (4 kegiatan) dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan (2 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas air dan udara. Capaian indikator kinerja sebesar 106,6% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 96,32% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas hutan dan lahan dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 65 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	62,69	67,5	107,67



IKTL merupakan bentuk penyempurnaan dari indeks tutupan hutan. Jika sebelumnya ITH hanya mengukur tutupan lahan di kawasan hutan dibagi luas kawasan hutan. IKTL memasukkan komponen tutupan lahan di luar kawasan hutan dan belukar di dalam dan di luar kawasan hutan dibagi luas total wilayah provinsi.

Dari tabel 3.3.65 dapat dilihat indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) target 62,69 terealisasi 67,5 dengan tingkat capaian 107,67% termasuk kategori keberhasilan memuaskan.

Realisasi indikator kinerja IKTL diukur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$IKLH = 100 - ((84.3 - (0.49 \times 100)) \times \frac{50}{54.3}) = 67.5$$

Ket: ITH tahun 2018 = 0.49

$$ITH = \frac{1.932.797 + ((193.326 + 37.212) \times 0.6)}{4.229.730} = 0.49$$

Ket: Luas hutan kondisi baik tahun 2018 = 1.932.797
 Luas belukar dalam kawasan hutan tahun 2018= 193.326
 Luas belukar dalam kawasan hutan tahun 2018= 37.212

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.66.

Tabel 3.3 66 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	67,5	67,5	107,67		61,41

Berdasarkan tabel 3.3.66 diketahui bahwa indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan tahun 2017-2018 menunjukkan nilai yang sama. Hal ini

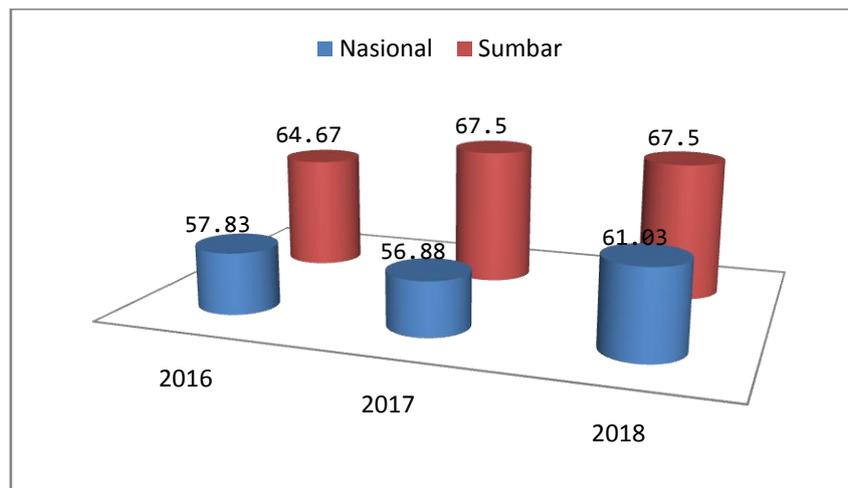


dikarenakan perbedaan luas wilayah yang digunakan sebagai data perhitungan di tahun 2017 dan 2018. Capaian indikator ini tahun 2018 >100%, yang artinya realisasi tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja tahun 2018 ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2017 dikarenakan indikator kinerja indeks kualitas tutupan lahan baru ditetapkan sebagai indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018.

Untuk tahun 2021, indeks kualitas tutupan lahan ditargetkan 61,41% atau lebih rendah 6,09 dari realisasi di tahun 2018. Dikarenakan pencapaian tahun 2018 lebih tinggi dari target 2021 maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menyempurnakan kembali target yang ditetapkan di tahun 2021.

Dari tahun 2016-2017 IKTL Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 2,83 dan untuk tahun 2018 tidak mengalami peningkatan. Sementara itu, tren IKTL di tingkat nasional dari tahun 2016-2018 berfluktuatif. Untuk tahun 2016-2018 secara keseluruhan IKTL Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan dengan IKTL Nasional. Perbandingan IKTL Provinsi dengan Nasional tergambar pada grafik 3.34.

Grafik 3. 34 Perbandingan IKTL Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional tahun 2016-2018



Sumber data: DLH Prov Sumbar

Upaya yang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas tutupan lahan antara lain:



1. Menurunkan luas lahan kritis seluas 4.226 Ha yang berasal dari penanaman yang dilakukan pada tahun 2013 sebanyak 5.514 Ha.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA dengan memberikan bantuan sarana prasarana, pembinaan dan sosialisasi kepada 450 orang anggota Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PHBN).
3. Menurunkan laju kerusakan hutan dengan cara rehabilitasi hutan dan lahan seluas 1.816 ha (reboisasi kawasan hutan 986 ha dan rehabilitasi di luar kawasan hutan seluas 830 ha) dan membangun dam penahan sebanyak 12 unit.
4. Meningkatkan penurunan jumlah titik panas (*hotspot*). Jumlah titik panas yang terjadi di tahun 2018 sebanyak 58 titik panas lebih rendah dari yang ditargetkan. Akan tetapi, lebih tinggi dibandingkan dengan titik panas di tahun 2017 (50 titik panas). Pengendalian jumlah hotspot didukung oleh pengawasan dan pencegahan dini yang optimal oleh Satgas Damkarhutla, pemantauan melalui satelit NOAA, iklim dan curah hujan.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas hutan dan lahan adalah sebesar Rp 50.867.337.183,- dan terealisasi Rp 44.008.303.571,- atau 86,52%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 6.859.033.612,- (13,48%).

Anggaran tersebut tersebar pada 8 program sebagai berikut: Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan (8 kegiatan), Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (4 kegiatan), Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan (13 kegiatan), Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (5 kegiatan), Program Pengendalian Kebakaran Hutan (10 kegiatan), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (8 kegiatan), Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (4 kegiatan) dan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam (6 kegiatan).



Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas hutan dan lahan. Capaian indikator kinerja sebesar 107,67% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 86,52% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



Gambaran pencapaian sasaran Menurunnya resiko bencana dilihat berdasarkan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja berikut ini:

Tabel 3.3 67 Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Sasaran 5.2.3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	73	100

Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana diharapkan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, di tahun 2018 kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 73% meningkat 1% dibandingkan dengan kondisi di tahun 2017 (72%).

Dari tabel 3.3.67 dapat dilihat indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana target 73% terealisasi 73% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

Kejadian bencana yang ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 73% di tahun 2018. Artinya, 73% dari bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018 dapat ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana.



Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana} = \frac{807}{1.106} \times 100\% = 73\%$$

Ket: Jumlah kejadian bencana yang bisa ditangani di Prov. Sumbar tahun 2018 = 807 kejadian
Jumlah kejadian bencana di Prov Sumbar tahun 2018 = 1.106 kejadian

Rincian kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat selama tahun 2018 diuraikan pada tabel 3.3.68.

Tabel 3.3 68 Peristiwa per Jenis Bencana di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Jenis Bencana	Jumlah
1	Abrasi Pantai	2
2	Abrasi Sungai	0
3	Amruknya kubah mesjid	1
4	Banjir	113
5	Banjir Bandang	19
6	Banjir Rob	1
7	Erupsi gunung api	2
8	Gelombang Pasang	0
9	Gempa Bumi	2
10	Hanyut tenggelam	56
11	Kebakaran	18
12	Kebakaran lahan	44
13	Kecelakaan Laut	3
14	Ledakan Tambang	0
15	Longsor	200
16	Orang Hilang	17
17	Orang Terdampar	1
18	Pergerakan Tanah	3
19	Puting Beliung	622
20	Tersambar Petir	2
21	Tuba Belerang	0
Total		1.106

Sumber data: BPBD Provinsi Sumbar

Capaian indikator kinerja ini dihitung menggunakan rumus *metode pengukuran kriteria yang pertama*.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2018 dengan tahun 2017 serta target tahun terakhir RPJMD digambarkan pada tabel 3.3.69.



Tabel 3.3 69 Perbandingan realisasi, capaian tahun 2017-2018 dan target 2021 indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana

No	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian		Target
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	72	100	100	75

Berdasarkan tabel 3.3.69 diketahui bahwa indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana tahun 2017-2018 menunjukkan peningkatan. Secara absolut jumlah bencana yang terjadi di tahun 2018 lebih tinggi 381 kejadian dibandingkan tahun 2017. Begitu juga dengan jumlah kejadian bencana yang ditangani tahun 2018 lebih tinggi sebanyak 285 kejadian dibandingkan dengan tahun 2017. Capaian indikator ini tahun 2017-2018 adalah 100%, yang artinya realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk tahun 2021, indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana ditargetkan 75%. Dengan mempertimbangkan pencapaian di tahun 2017-2018 maka target tahun 2021 optimis dapat dicapai.

Hambatan dalam menangani persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana antara lain:

1. Keterbatasan anggaran dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan bencana.
2. Kurangnya kesiapan tim yang turun ke lokasi bencana disebabkan kejadian bencana yang terjadi dalam waktu yang berturut-turut di daerah Kab/Kota.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana:



1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan pembinaan/pelatihan anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kab/Kota se Sumatera Barat.
2. Koordinasi peningkatan kapasitas kelembagaan kesiapsiagaan
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengurangan risiko bencana dengan melakukan pembinaan terhadap kelembagaan pengurangan risiko bencana baik di Provinsi dan Kab/kota, Kelompok Siaga Bencana (KSB) atau Satuan tugas (Satgas) penanggulangan bencana yang sudah mulai terbentuk di tingkat nagari/desa/kelurahan di Sumatera Barat.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran menurunnya risiko bencana adalah sebesar Rp 8.283.319.760,- dan terealisasi Rp 7.258.908.305,- atau 87,63%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.024.411.455,- (12,37%).

Anggaran tersebut tersebar pada 5 program sebagai berikut: Program Peningkatan Mitigasi Bencana (4 kegiatan), Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (7 kegiatan), Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana (4 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan (2 kegiatan) dan Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana (2 kegiatan).

Program yang dilaksanakan sudah menunjang pencapaian sasaran strategis menurunnya risiko bencana. Capaian indikator kinerja sebesar 100% lebih tinggi dari realisasi anggarannya sebesar 87,63% yang berarti kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.



3.4. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.891.180.778.760,- (*Dua Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi
Belanja Langsung Kegiatan	2.546.611.344.842	2.300.967.749.222,29
Belanja Langsung Pokok	344.569.433.918	316.154.006.795,8
Total	2.891.180.778.760	2.617.121.756.018,09

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 diuraikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4. 1 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	39,190,565,630	37,125,396,350	94,73
2	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	13,278,319,984	12,346,238,005	92,98
3	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	46,888,595,897	42,950,572,277	91,60
4	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	42,299,127,382	31,050,774,529	73,41
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	106,598,717,758	97,643,079,107	91,60
6	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	763,353,170,839	708,310,711,603	92,79
7	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	581,463,492,669	502,554,927,756	86,43
8	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	160,703,493,023	150,870,959,259	93,88
9	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	11,427,552,866	11,124,903,828	97,35
10	Meningkatnya Nilai Ekspor	5,415,955,580	3,984,583,281	73,57



NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
11	Menurunnya Tingkat dan Pengangguran Kemiskinan	80,986,032,919	74,707,924,818	92,25
12	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	442,698,758,899	401,071,057,294	90,60
13	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	8,020,102,636	7,755,839,140	96,70
14	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	163,973,049,447	150,966,867,529	92,07
15	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat	12,663,424,801	9,049,197,740	71,46
16	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	8,500,327,569	8,187,504,831	96,32
17	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	50,867,337,183	44,008,303,571	86,52
18	Menurunnya resiko bencana	8,283,319,760	7258908305	87,63
TOTAL		2.546.611.344.842	2.300.967.749.222,29	90,35

Dari tabel 3.4.1 diketahui bahwa:

1. Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2018 untuk mencapai 18 sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar Rp. 2.546.611.344.842,- atau 88,08% dari total anggaran belanja langsung tahun 2018.
2. Sebesar 11,92% dari total anggaran belanja langsung dianggarkan untuk belanja langsung pokok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi yang tersebar pada 5 Program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3. Realisasi anggaran tahun 2018 yang mendukung pencapaian 18 sasaran strategis adalah sebesar Rp. 2.300.967.749.222,29 (90,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 245.643.595.619,71 (9,65%).



4. Sisa anggaran sebesar Rp. 274,059,022,741.91,- (9,48%) mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Memenuhi maksud Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Output dari implementasi SAKIP adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada masyarakat terhadap kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018. Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 memberikan informasi kepada stakeholders atas keberhasilan/kegagalan pencapaian 18 sasaran strategis yang diukur oleh 24 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.
2. Untuk pencapaian 18 strategis tersebut telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.546.611.344.842,- atau 88,08% dari total anggaran belanja langsung tahun 2018 (Rp. 2.891.180.778.760), dengan realisasi sebesar Rp. 2.300.967.749.222,29 (90,35%).
3. Kategori keberhasilan 24 indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 10 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori Memuaskan dengan capaian > 100%.



- b. Sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori sangat baik dengan capaian >85% -100%.
 - c. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori baik dengan capaian >75% -85%.
 - d. Sebanyak 1 Indikator Kinerja Utama berhasil dengan kategori kurang baik dengan capaian \leq 55%.
4. Sasaran strategis Meningkatnya Pertumbuhan Investasi yang diukur oleh indikator kinerja persentase pertumbuhan investasi berhasil dengan capaian kinerja tertinggi sebesar 360,98%.
5. Sasaran strategis Meningkatnya Nilai Ekspor yang diukur oleh indikator kinerja peningkatan nilai ekspor berhasil dengan capaian kinerja terendah sebesar -1.102,5%.

4.2. LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dirancang untuk pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan mengimplementasikan SAKIP, diharapkan akan mendorong pelaksanaan *Money Follows Program*. Artinya alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP sehingga kinerja yang ditargetkan dapat dicapai dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholders. Upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:



1. Meningkatkan komitmen dan pemahaman pimpinan dan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk menerapkan SAKIP.
2. Menyempurnakan tujuan, sasaran, indikator kinerja dalam dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kerangka berpikir logis dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 tentang penetapan hasil rekomendasi tim penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Memanfaatkan Cascading Kinerja yang telah dirumuskan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran.
4. Meningkatkan peran Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 untuk mengawal implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Menyusun perjanjian kinerja sampai ke level individu/staf yang dijadikan acuan dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.
6. Mengintegrasikan aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 telp (0751) 31961 – 39263 Fax (0751) 31841
e-mail : inspprovsumbar@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2018 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 27 Maret 2019

INSPEKTUR,

Drs. H. MARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601211 198203 1 007

HASIL PENGUKURAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	Realisasi	% Capaian
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA					
I	MISI I				
	Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"				
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	75.9	62.5	82.35
	1.2 Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1.2.1 Indeks Kerukunan	75.9	62.5	82.35
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	1.2 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100.00
	2.1 Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	2.1.1 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	10	100.00
II	MISI 2				
	Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	64	65.45	102.27
	1.1 Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB	BB	100
	1.2 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	68	76	111.76
		1.2.2 Indeks e-Goverment	2.6	2.43	93.46
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Indeks Integritas Pelayanan Publik	3.01	3.18	105.65
		1.3.2 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80	78.83	98.54

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	Realisasi	% Capaian
III	MISI 3				
	Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.27	71.24	99.96
	1.1 Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat	1.2.1 Harapan lama sekolah 1.2.2 Rata-rata lama sekolah	14.4 8.72	13.94 8.72	96.81 100.00
	1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	2.1.1 Angka harapan hidup	69.06	68.78	99.59
IV	MISI 4				
	Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah				
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	5.78 0.329	5.14 0.305	88.93 107.29
	1.1 Meningkatkan Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	42.7	42.83	100.30
	1.2 Meningkatkan Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	4.1	14.8	360.98
	1.3 Meningkatkan Nilai Ekspor	1.3.1 Peningkatan Nilai Ekspor	2	-22.05	-1,102.50
	1.4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	6.48 6.25	6.55 5.55	98.92 111.20
V	MISI 5				
	Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1.2 Rasio elektrifikasi	36 93.63	36 93.83	100.00 100.21
	1.1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	36	100.00
	1.2 Meningkatkan Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	93.63	93.83	100.21
	1.3 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	59.60	59.12	99.19

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	Realisasi	% Capaian
1.5	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	51.33	52.34	101.97
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.63	76.7	110.15
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	65.63	77.29	117.77
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	82.9	88.37	106.60
2.2	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	62.69	67.5	107.67
2.3	Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	73	100.00

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IRWAN PRAYITNO**
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Padang, November 2018

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA				
I MISI I				
Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"				
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama	1.1 Indeks Kerukunan	75.9	Satpol PP, Badan Kesbangpol
	1.2 Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	1.2.1 Indeks Kerukunan	75.9	Satpol PP, Badan Kesbangpol
2	Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan	2.1 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	Dinas Kebudayaan
	2.1 Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	2.1.1 Persentase peningkatan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	10	Dinas Kebudayaan
II MISI 2				
Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional				
1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi	1.1 Indeks Reformasi Birokrasi	64	OPD terkait 8 Area Perubahan
	1.1 Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	1.1.1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	B. Keuda, Biro AP2BMD
		1.1.2 Nilai Evaluasi SAKIP	BB	Biro Organisasi
	1.2 Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	1.2.1 Indeks Profesionalitas ASN	68	Badan Kepegawaian Daerah
		1.2.2 Indeks e-Government	2.6	Dinas KOMINFO
	1.3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.3.1 Indeks Integritas Pelayanan Publik	3.01	Biro Organisasi
		1.3.2 Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik	80	Biro Organisasi

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
III MISI 3 Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi				
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.27	Lintas Perangkat Daerah
1.1	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	1.2.1 Harapan lama sekolah 1.2.2 Rata-rata lama sekolah	14.4 8.72	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan
1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1.1 Angka harapan hidup	69.06	Dinas Kesehatan, RSUD
IV MISI 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah				
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 1.2 Indeks Gini	5.78 0.329	
1.1	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	1.1.1 Jumlah Pendapatan per Kapita (Rp. Juta)	42.7	Lintas Perangkat Daerah
1.2	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	1.2.1 Persentase Pertumbuhan investasi	4.1	Dinas Penanaman Modal & PTSP
1.3	Meningkatnya Nilai Ekspor	1.3.1 Peningkatan Nilai Ekspor	2	Disperindag
1.4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	1.4.1 Tingkat Kemiskinan 1.4.2 Tingkat Pengangguran	6.48 6.25	Lintas Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah
V MISI 5 Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
1	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 1.2 Rasio elektrifikasi	36 93.63	
1.1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	1.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.2	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	1.2.1 Rasio elektrifikasi	93.63	Dinas ESDM
1.3	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	1.3.1 Persentase Rata-rata Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	59.60	Dinas PSDA

NO	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018	SKPD PENANGGUNG JAWAB/ SUMBER DATA
1.5	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	1.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat	51.33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.63	
2.1	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	2.1.1 Indeks Kualitas Air	65.63	Dinas Lingkungan Hidup
		2.1.2 Indeks Kualitas Udara	82.9	Dinas Lingkungan Hidup
2.2	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	2.2.1 Indeks Tutupan Hutan	62.69	Dinas Kehutanan
2.3	Menurunnya resiko bencana	2.3.1 Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	73	BPBD

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
A	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama	39,190,565,630.00	
1	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	523,883,500.00	B. Kesbangpol
2	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1,347,927,432.00	
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1,810,904,881.00	
4	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,705,410,460.00	
5	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	418,962,700.00	Satpol PP dan Damkar
6	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3,506,547,763.00	
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	151,063,500.00	
8	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	967,553,265.00	
9	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	538,520,785.00	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama	20,941,871,253.00	Biro Bina Mental dan Kesra
11	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	5,648,728,299.00	
12	Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan	1,629,191,792.00	
B	Meningkatnya Pelestarian nilai-nilai Budaya	13,278,319,984.00	
1	Program Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya	1,314,040,160.00	D. Kebudayaan
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya	99,838,170.00	
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	3,848,740,909.00	
4	Program Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya	359,238,530.00	
5	Program Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya	4,503,481,210.00	
6	Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya.	3,152,981,005.00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
C	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan Akuntabel	46,888,595,897.00	
1	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	5,617,670,709.00	B. Keuangan Daerah
2	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	611,956,026.00	
3	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	8,097,838,030.00	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2,135,873,129.00	Biro Umum
5	Program Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	213,100,000.00	Inspektorat Provinsi
6	Program Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum	7,417,989,282.00	
7	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	734,287,650.00	Bappeda
8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1,531,661,863.00	
9	Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	9,811,321,675.00	
10	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat	521,052,825.00	Biro Organisasi
11	Program Peningkatan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3,213,398,567.00	Biro Adm Pengelolaan Aset Daerah
12	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	4,261,431,800.00	Biro Pemerintahan
13	Program Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah	711,545,600.00	
14	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	2,009,468,741.00	
D	Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien	42,299,127,382.00	
1	Program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur	8,718,575,786.00	BKD, BPSDM dan Biro Organisasi
2	Program Pendidikan Kedinasan	12,612,674,216.00	
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1,611,545,070.00	
4	Program Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah	1,446,340,048.00	
5	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	83,991,000.00	D. Komunikasi dan Informatika
6	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	90,258,987.00	
7	Program Informasi dan Komunikasi Publik	917,664,134.00	
8	Program Keterbukaan Informasi	2,360,281,141.00	
9	Pengelolaan e-Government Provinsi Sumatera Barat	3,333,746,094.00	
10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1,599,067,614.00	
11	Program Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9,319,960,920.00	Biro Humas
12	Program Pengembangan Data dan Informasi	205,022,372.00	
E	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	106,598,717,758.00	
1	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan	6,900,007,692.00	Balitbang
2	Program Peningkatan Pelayanan Publik	2,648,125,524.00	B. Penghubung, B. Keuda
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	268,580,826.00	D. Kearsipan dan Perpustakaan
4	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Sistem Kearsipan	464,104,345.00	
5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan	2,948,320,577.00	
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	384,879,728.00	Setda, B. Penghubung
7	Program Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	432,417,447.00	
8	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	2,800,801,316.00	
9	Program Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	4,977,135,147.00	
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	13,407,418,586.00	
11	Program Manajemen Perubahan	184,500,800.00	
12	Program Pembangunan Materi Hukum	1,193,913,128.00	
13	Program Peningkatan Budaya Hukum	49,385,000.00	
14	Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM	336,527,500.00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
15	Program Sarana dan Informasi Hukum	125,484,800.00	Setda, B. Penghubung
16	Program Peningkatan Penataan Perundang-Undangan	783,753,400.00	
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,082,100,268.00	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan capil
18	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan	1,135,120,300.00	
19	Program Pengembangan Data dan Informasi	37,880,000.00	
20	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	64,438,261,374.00	Sekretariat DPRD
F	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	763,353,170,839.00	
1	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMA	399,716,044,575.00	D. Pendidikan
2	Program Peningkatan Akses, Perluasan dan Mutu Pendidikan SMK	266,094,673,870.00	
3	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	5,706,158,115.00	
4	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	40,057,061,722.00	
5	Program Pendidikan Berkarakter	1,351,696,940.00	
6	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	32,936,015,307.00	
7	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	3,124,036,150.00	D. Pemuda Olahraga
8	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	10,987,624,495.00	
9	Program Pengembangan Organisasi Pemuda dan Manajemen Olahraga	489,958,600.00	
10	Program Peningkatan Penyadaran Kepemudaan	1,769,061,810.00	
11	Program Manajemen Layanan Teknis Lainnya	304,117,905.00	
12	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	675,631,350.00	Biro Bina Mental dan Kesra
13	Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan	141,090,000.00	
G	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	581,463,492,669.00	
1	Program Obat dan Pembekalan Kesehatan	9,302,946,572.00	D. Kesehatan, 4 RSUD
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	12,819,413,916.00	
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1,513,406,114.00	
4	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	919,119,989.00	
5	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	846,255,198.00	
6	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular/Tidak Menular)	2,314,114,732.00	
7	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	155,066,813,420.00	
8	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/RS. Paru/ RS. Mata	423,000,000.00	
9	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	852,591,860.00	
10	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	543,968,982.00	
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	35,098,629,425.00	
12	Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah	347,681,634,891.00	
13	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	1,806,250,000.00	
14	Program Diversifikasi Pangan	740,160,000.00	D. Pangan
15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5,247,613,000.00	
16	Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi	50,000,000.00	D. Pengendalian Penduduk, KB, kependudukan dan capil
17	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak	100,000,000.00	
18	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	150,000,000.00	
19	Program Pelayanan Kontrasepsi	155,000,000.00	
20	Program Peningkatan Pengendalian Penduduk	306,048,000.00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
21	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	2,460,460,475.00	D. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
22	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	174,016,915.00	
23	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	241,448,665.00	
24	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan	1,281,347,365.00	
25	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak	1,067,327,980.00	
26	Program Peningkatan Perlindungan Khusus Anak	301,925,170.00	
H	Meningkatnya Jumlah Pendapatan Masyarakat	160,703,493,023.00	
1	Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis	8,916,907,545.00	D. Tanaman Pangan dan Holtikultura, D. Peternakan dan Keswan dan D Kelautan Perikanan
2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas	33,575,475,189.00	
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	19,509,783,904.00	
4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	7,679,252,015.00	
5	Program Pengembangan Ekonomi Maritim	10,051,282,500.00	
6	Program Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	8,115,275,310.00	
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	15,071,174,038.00	
8	Program Pengamanan Sumber Daya Hewani	3,529,338,910.00	
9	Program Pembedayaan Penyuluhan	518,819,000.00	
10	Program Peningkatan SDM Pertanian	1,412,631,250.00	
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Pertanian	1,309,000,000.00	D. Pariwisata
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	13,466,013,007.00	
13	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	11,219,587,350.00	D. Perindustrian dan Perdagangan
14	Program Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3,486,189,050.00	
15	Program Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	1,253,761,200.00	
16	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	1,012,631,764.00	D. Koperasi dan UKM
17	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	3,404,143,050.00	
18	Program Pengembangan Kewilayahan Industri	2,225,509,441.00	
19	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1,963,887,500.00	
20	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90,550,000.00	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3,770,479,350.00	
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	1,587,547,350.00	
23	Program Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	6,613,127,900.00	
24	Program Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal	921,126,400.00	
I	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	11,427,552,866.00	
1	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Relisasi Investasi	3,797,846,700.00	D. Penanaman Modal dan PTSP
2	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	4,491,539,725.00	
3	Program Kerjasama Pembangunan	3,138,166,441.00	
J	Meningkatnya Nilai Ekspor	5,415,955,580.00	
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	5,415,955,580.00	D. Perindag
K	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	80,986,032,919.00	
1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	217,070,620.00	D. Sosial
2	Program Pembinaan Anak Terlantar	6,668,077,240.00	
3	Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Eks Trauma	2,938,531,175.00	
4	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Lansia	2,672,534,121.00	

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN	
5	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, dan Penyakit Sosial Lainnya)	879,396,600.00	D. Sosial	
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	3,569,775,000.00		
7	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	24,404,887,505.00		
8	Program Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	497,293,180.00		
9	Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	168,845,970.00		
10	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna	500,340,000.00		D. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Program Penanggulangan Kemiskinan	939,296,890.00		
12	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	9,474,765,145.00		
13	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha	941,768,600.00		
14	Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	8,654,049,090.00		
15	Program Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Nagari	3,105,072,950.00		
16	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1,838,500,000.00	Biro Bina mental	
17	Program Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial	1,380,823,870.00		
18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	7,662,716,745.00	D. Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
19	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diverifikasi Usaha	2,111,340,800.00		
20	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	772,966,000.00		
21	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja	1,377,395,418.00		
22	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	210,586,000.00		
L	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	442,698,758,899.00		
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	204,488,943,817.00	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	65,298,230,300.00		
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Binamargaan	1,982,623,465.00		
4	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	157,341,202,743.00		
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1,463,838,965.00		
6	Program Perencanaan Penataan Ruang	4,929,252,510.00		
7	Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	479,701,250.00		
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	302,700,755.00		
9	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkerataapian	484,574,050.00	D. Perhubungan	
10	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	1,582,308,404.00		
11	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	983,765,870.00		
12	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	243,725,560.00		
13	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	3,117,891,210.00		
M	Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Energi Ketenagalistrikan	8,020,102,636.00		
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	4,387,779,020.00	D. Energi Sumber Daya Mineral	
2	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Energi	394,598,000.00		
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	2,003,192,070.00		
4	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	905,855,746.00		
5	Program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	328,677,800.00		

NO	SASARAN/PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
N	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	163,973,049,447.00	
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi Lainnya	53,058,519,033.00	D. Pengelolaan Sumber Daya Air
2	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	1,290,918,400.00	
3	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	98,579,931,923.00	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1,953,966,265.00	
5	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya	9,089,713,826.00	
O	Meningkatnya pembangunan infrastruktur layanan dasar masyarakat	12,663,424,801.00	
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,254,423,000.00	D. Perumahan Permukiman dan Pertanahan
2	Program Pengembangan Perumahan	1,623,188,392.00	
3	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4,556,321,659.00	
4	Program Pengelolaan Pertanahan	983,000,000.00	D. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	638,335,750.00	
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kab/Kota	2,771,215,000.00	
7	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	836,941,000.00	
P	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	8,500,327,569.00	
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2,569,575,720.00	D. Lingkungan Hidup
2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	240,078,000.00	
3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,351,597,100.00	
4	Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan	712,410,100.00	
5	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan	3,626,666,649.00	
Q	Meningkatnya Kualitas Hutan & Lahan	50,867,337,183.00	
1	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	9,880,165,060.00	D. Kehutanan
2	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	4,253,399,935.00	
3	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	4,937,286,025.00	
4	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	1,184,109,440.00	
5	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	12,298,000,000.00	
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	4,519,931,510.00	
7	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	983,290,313.00	
8	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	12,811,154,900.00	
R	Menurunnya resiko bencana	8,283,319,760.00	
1	Program Peningkatan Mitigasi Bencana	1,465,219,080.00	BPBD
2	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	3,854,398,480.00	
3	Program Pemulihan Daerah Pasca Bencana	1,671,600,200.00	
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	583,625,500.00	
5	Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana	708,476,500.00	
TOTAL		2,546,611,344,842.00	

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO

